

SEJARAH SOSIAL

SRI MASTUTI PURWANINGSIH
THOMAS NUGROHO AJI



Penerbit
Unesa University Press

SRI MASTUTI PURWANINGSIH
THOMAS NUGROHO AJI

SEJARAH SOSIAL

Diterbitkan Oleh

UNESA UNIVERSITY PRESS

Anggota IKAPI No. 060/JTI/97

Anggota APPTI No. 133/KTA/APPTI/X/2015

Kampus Unesa Ketintang

Gedung C-15 Surabaya

Telp. 031 – 8288598; 8280009 ext. 109

Fax. 031 – 8288598

Email : unipress@unesa.ac.id

unipressunesa@gmail.com

vii,142 hal., Illus, 15,5 x 23

ISBN : 978-602-449-462-9

copyright © 2020 Unesa University Press

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun baik cetak, fotoprint, microfilm, dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga Buku Ajar ini bisa selesai pada waktunya.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman yang telah berkontribusi dengan memberikan ide-idenya sehingga makalah ini bisa disusun dengan baik dan rapi.

Kami berharap semoga Buku Ajar ini bisa menambah pengetahuan para mahasiswa. Namun terlepas dari itu, kami memahami bahwa Buku Ajar ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya Buku Ajar selanjutnya yang lebih baik lagi.

Penulis

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	iii
Tabel	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Visi Sejarah dan Teori	1
B. Pengabaian Keilmuan	6
BAB 2 TEORI MULTIDIMENSIONAL APPROACH DALAM PENULISAN SEJARAH	10
A. Pendekatan Multidimensional Dalam Ilmu Sejarah	10
B. Relasi Ilmu Sejarah Dengan Ilmu Ilmu Sosial	14
C. Mengapa Pentingnya Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Ilmu Sejarah	18
D. Relevansi Metodologi Sejarah Dengan Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial Apakah Relevan	22
E. Konsep-Konsep dan Teori-Teori Dalam Analisis Historis ..	29
F. Pandangan dan Tanggapan Terhadap Multidimensional	32
BAB 3 MODEL-MODEL KASUS	38
A. Kerusuhan Tionghoa Di Surakarta Tahun 1980	38
B. Kriminalitas Masa Kolonial Di Batavia Tahun 1870-1930	62
C. Pembangkangan Penduduk Terhadap Tuan-Tuan Tanah Di Kota Surabaya Pada Awal Abad ke – XX	87
D. Pemikiran Feminisme Kartini	106
E. Ratu Adil, Rusuh Sosial: Perbanditan Jawa Masa Kolonial	124

DAFTAR PUSTAKA.....	130
GLOSSARIUM.....	136

TABEL

Tabel 1 Kasus – kasus kriminal yang terjadi di Batavia pada tahun 1891	67
Tabel 2 Kalsifikasi hukuman menurut suku bangsa, jenis kelamin dan empat jenis penting perilaku kejahatan	69
Tabel 3 Klasifikasi hukuman menurut usia dan jenis kelamin	70
Tabel 4 Daftar Orang – Orang yang dihukum mati	72
Tabel 5 Kasus – kasus kriminal yang masuk di pengadilan pada tahun 1891	74
Tabel 6 Klasifikasi hukuman menurut pekerjaan dan empat kelompok penting dari perilaku kejahatan	74

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Visi Sejarah dan Teori

Apakah dimungkinkan, pembelajaran sejarah memimpikan suatu pandangan bahwa terdapat hubungan yang layak antara sejarah dan teori sosial? Sejarah dan Teori Sosial dari Peter Burke melihat, teori sosial dan budaya dari sudut pandang implementasi kesejarahan, Sedangkan beberapa ahli menggali sumber teoretis terutama dengan kontribusi mereka terhadap implementasi tersebut, diantaranya Julia Adams, Elisabeth Clemens, Ann Shola Orloff, dimana ketiganya fokus pada sosiologi sejarah, tetapi secara luas dalam pencarian mereka untuk penggunaan teori yang valid. Robert Goodin, Charles Tilly, dan kolaborasi mereka berusaha untuk bergerak dengan mengabaikan konfrontasi modernisme dan postmodernisme, menganggap serius bagaimana konteks proses politik memengaruhi proses-proses berfikir antara sejarah dan teori sosial dan pemahaman para cendekiawan tentang keterkaitan antara keduanya. Dapat disebutkan bahwa tiga visi hubungan antara sejarah dan teori sosial adalah sebagai pengertian praktis, fenomenologi budaya, dan konstruktivisme sistematis.

Meskipun Burke memberi label bukunya edisi kedua, itu sebenarnya berada di urutan ketiga dari esai 1980-nya yang ringkas tentang sosiologi dan sejarah. Buku pertama diterbitkan dalam seri Universitas Terbuka yang disebut *Controversies in Sociology*, diedit oleh T. B. Bottomore dan M. J. Mulkey. Para ahli sosiologi dan

Sejarah menyerukan diakhirinya “dialog seperti orang tuli” antara para sejarawan di satu sisi, dan sosiolog dan antropolog sosial di sisi lain. Keterhubungan dari kedua ilmu tersebut dapat dilakukan terutama dengan menyebutkan sejumlah topik sosiologis dan antropologis - metode komparatif, model, struktur dan fungsi, peran sosial, dan sebagainya - yang relevan dengan menggunakan analisis historis. Atau sebaliknya.

Tapi itu juga menawarkan penjelasan singkat dari Herbert Spencer, Karl Marx, Fernand Braudel, William H. McNeill, Emmanuel Le Roy Ladurie, dan Nathan Wachtel, dengan mempertanyakan apakah keempat sejarawan itu menunjuk ke arah model-model perubahan sosial “yang akan lebih mempertimbangkan keragaman? dan tren jangka panjang dari model sebelumnya, dan menentukan jalur alternatif dari pandangan sebelumnya.”

Sosiologi dan Sejarah Burke membanyangi edisi kedua Teori Sejarah dan Sosialnya seperti layaknya hantu penghuni sebelumnya. Kedua buku dimulai dengan "dialog tuli," meskipun sekarang "diferensiasi sejarah dan sosiologi" menjadi "diferensiasi sejarah dan teori," seperti "konvergensi sosiologi dan sejarah" menjadi "konvergensi teori dan sejarah. "

Buku baru Burke mencurahkan secara penuh untuk model dan metode, memperluas daftar tema dari ilmu sosial yang dapat menginformasikan analisis sejarah, selain itu Burke lebih membahas masalah pengetahuan secara lebih terbuka, menambahkan bab tentang postmodernitas dan postmodernisme, tetapi masih memusatkan diskusi tentang perubahan sosial model Spencer, Marx, dan alternatifnya.

Sejarah dan Teori Sosial memberi jauh lebih banyak perhatian dan penekanan pada filsafat, analisis sastra, dan teori umum daripada buku-buku pendahulunya. Tokoh-tokoh seperti Ernst Gombrich, Mikhail Bakhtin, Thomas Kuhn, dan Michel Foucault (semuanya kecuali Foucault lebih banyak tidak dimunculkan pada jilid pertama, dan Foucault muncul di buku-buku sebelumnya sebagai sejarawan “kegilaan” yang cukup menarik untuk dikaji daripada dipandang sebagai seorang filsuf sosial subversif) untuk masa sekarang dianggap sebagai tokoh dan dengan pemikiran yang penting serta sebagai ahli teori yang harus diperhitungkan. Namun kedua buku berkonsentrasi pada pelajaran apa yang bisa dipelajari sejarawan dan analisis sosial dari satu sama lain ketika sejarah dan ilmu social masih mengejar pekerjaan mereka sendiri. Teori Sejarah dan Sosial memancarkan pengertian praktis.

Dapat dilihat pada pemikiran Burke di emporium teori sosial untuk mengambil hal-hal menarik, menginspeksinya dengan penuh rasa ingin tahu untuk melihat apakah hal-hal tersebut itu dapat digunakan (kombinasi sejarah dan ilmu social) untuk tujuan yang berguna di berbagai karya dan analisisnya sendiri.

Pengertian praktis Burke membatasi bagian yang dapat dan harus dimainkan oleh teori dalam karya sejarawan. Burke tidak memiliki harapan untuk membangun sejarah dunia sintetis, menguji teori zaman dengan bukti sejarah, atau bahkan mengidentifikasi variasi sistematis antara tempat dan waktu melalui perbandingan disiplin.

Sebaliknya, Burke mengasumsikan bahwa para sejarawan mencoba memahami waktu, tempat, fenomena, dan transformasi tertentu yang oleh para teoretikus dapat menyediakan alat deskripsi dan

penjelasan yang efektif. Sebagai contoh, sosiolog Erving Goffman muncul sebagai sumber wawasan tentang bagaimana para abdi dalem, penasihat raja atau ratu, dan pelukis Renaissance Italia berusaha untuk mewakili diri mereka sendiri dan satu sama lain daripada sekedar sebagai inspirasi untuk berpikir tentang bagaimana "proses beradab" Norbert Elias benar-benar menghasilkan efeknya pada perilaku individu. Demikian pula, Burke menggunakan Thorstein Veblen dan Pierre Bourdieu untuk tidak membuka ruang diskusi tentang variasi dalam sistem ketidaksetaraan tetapi untuk menyoroti frekuensi para elit sejarah mengiklankan posisi mereka dengan terlibat dalam konsumsi yang mencolok. Kami menonton perseptif sejarawan sosial dan budaya memindai teoretikus sosial untuk mengetahui cara melakukan pekerjaan lokalnya — dan, selanjutnya, karya lokal sejarawan lain — dengan lebih efektif.

Di akhir bukunya, Burke memperkuat kesan itu dengan mengamati:

“Sekarang akan menjadi jelas, jika tidak jelas sejak awal, bahwa empiris dan teoretikus bukanlah dua kelompok yang saling berhubungan erat, tetapi dua ujung spektrum. Pinjaman konseptual cenderung terjadi dari disiplin ilmu di sisi teoretis. Jadi, sejarawan meminjam dari antropolog, yang meminjam dari ahli bahasa, yang meminjam dari ahli matematika. Sebagai imbalannya, para sejarawan, seperti ahli etnografi, menawarkan pengingat akan kompleksitas dan beragamnya pengalaman dan institusi manusia yang secara teori pasti disederhanakan. Keragaman ini tidak menyiratkan bahwa ahli

teori salah untuk menyederhanakan. Ketika saya mencoba untuk berdebat di atas. . . penyederhanaan adalah fungsi mereka, kontribusi mereka pada pembagian kerja antara pendekatan dan Tiga Visi Sejarah dan Disiplin. Namun apa yang disarankan oleh varietas ini adalah bahwa teori tidak pernah bisa hanya "diterapkan" ke masa lalu".

Dimulai dengan melihat visi yang jelas tentang sejarah sebagai gudang kekayaan manusia, dan teori sebagai seperangkat alat dan kompartemen untuk mengatur kekayaan tersebut.

Sebagian karena kebutuhan dan sebagian karena pilihan, visi Burke tentang hubungan antara sejarah dan teori mengecualikan sejumlah besar teori yang oleh sejarawan lain dianggap relevan, atau bahkan penting, bagi usaha mereka. Karena kebutuhan, program Burke mengecualikan pertimbangan serius ontologi dan epistemologi.

Bahkan diskusi tentang postmodernitas dan postmodernisme berkonsentrasi pada konstruksi sosial, desenterasi, anti-Eurosentrisme, dan globalisasi daripada masalah eksistensi dan pengetahuan historis. Burke melaporkan dengan sangat jeli dan tepat bahwa "dekonstruksi, poststrukturalisme, dan perkembangan terkait," jika didefinisikan secara tepat, telah membuat sedikit kemajuan dalam sejarah arus utama. Dengan kepekaan praktisnya tentang sejarah, Burke bergabung dengan konsensus, tetapi tetap bersikap skeptis terhadap inovasi radikal, baik filosofis maupun metodologis.

Sumber teoretis yang tersedia dalam ilmu sosial, linguistik, geografi, dan psikologi sosial hampir hilang dari perhitungan Burke. Pemikiran berupa teori ekonomi Nearabence juga perlu mendapat

perhatian khusus sebagai model teori ekonomi formal. Di antara para ekonom, hanya AV Chayanov, John D. Hicks, Albert Hirschman, Charles Kindleberger, Witold Kula, David Landes, Karl Polanyi, WW Rostow, Thorstein Veblen, dan Amartya Sen — yang terakhir tak terelakkan karena kritiknya yang terkenal akan model pilihan rasional, “*Rational Fools*” — membuat penampilan dalam karya-karya mereka. Mereka muncul sebagai sejarawan “semu”, bukan sebagai ilmuwan yang menghasilkan teori ekonomi formal. Mereka lebih mendekatkan diri pada pendekatan kesejarahan dibandingkan sebagai seorang ilmuwan ekonomi sejati.

B. Pengabaian Keilmuan

Kemungkinan besar pengabaian tersebut mencerminkan ketidaknyamanan Burke sendiri dengan analisis formal dan kuantitatif terutama dalam menganalisis aspek kesejarahan;

Bagaimanapun, Burke juga mengabaikan yang pandangan atau pengaruh kuat sejarah ekonomi yang bersifat kuantitatif, dan sebagian besar non-kuantitatif, pengaruh analisis kelembagaan ekonomi, sebagaimana diwakili oleh Douglass North, pada dua dekade terakhir sejarah ekonomi. Secara implisit tetapi dapat dimengerti, ia mengambil titik rujukannya untuk menjembatani dialog sejarah-teori tentang sejarah sosial dan budaya interpretatif yang lebih dikuasai.

Lebih mengejutkan lagi, Burke mengabaikan dua "persimpangan" yang mungkin diharapkan olehnya untuk ditekankannya: perubahan budaya dalam sejarah, dan perubahan historis dalam ilmu sosial. Dalam sejarah, antusiasme pascaperang untuk ilmu sosial berlangsung sekitar tiga

dekade, tetapi selama tahun 1970-an terjadi pemecahan disiplin kelilmuan sosial menjadi dua bagian yang berbeda: pertama, kelompok minoritas yang berspesialisasi dalam bidang sintetik dan sosial-ilmiah seperti sejarah ekonometrik, sejarah demografis, dan sejarah perkotaan kuantitatif; kedua, mayoritas yang beralih dari ekonomi, demografi, dan sosiologi menuju antropologi budaya sebagai sumber utama inspirasi sosial-ilmiah. Dalam ilmu-ilmu sosial pada waktu yang hampir bersamaan, analisis komparatif historis memperoleh kembali prestise dan energi yang telah hilang selama beberapa decade masa empirisme abstrak.

Mungkin kedua “persimpangan” dua kelompok ini telah terlalu dini membentuk pemikiran Burke terhadap sejarah dan teori sosial. Tetapi ketiadaan kedua aliran ini memungkinkan Burke berbicara seolah-olah sejak tahun 1950 atau lebih telah terjadi pemulihan hubungan antara ilmu sosial dan sejarah dan telah meningkat terus menerus daripada mengambil zig-zag berulang. Ketidakhadiran mereka juga memberikan kualitas abadi untuk analisis Burke, dan dengan demikian mengecilkan sejauh mana masalah yang ia tawarkan dengan refleksi yang bijaksana adalah masalah perjuangan pahit dalam sejarah dan ilmu sosial.

Untuk rasa perjuangan yang kuat, dapat di baca dalam karya Adams, Clemens, Orloff, dan kontributornya, *Remaking Modernity*. Buku dengan jumlah halaman lebih dari 600 menjelaskan dua analisis yaitu: pertama, menafsirkan perubahan dalam praktik sosiologi historis, yang didefinisikan secara luas, sejak Perang Dunia II; dan kedua, untuk menjelaskan apa yang bisa kita sebut sebagai fenomenologi budaya sebagai alternatif yang lebih baik daripada kisah proses sosial yang deterministik dan eksternalis yang oleh sebagian besar penulis buku

dianggap lebih menonjol pada abad ke-20. Bahkan, Burke dengan baik mengantisipasi kecenderungan terhadap karya sebelumnya yang dapat ditemukan di karya Adams, Clemens, dan Orloff:

“Akan tetapi, dewasa ini, baik strukturalisme maupun Marxisme sering ditolak sebagai determinis, dan penekanannya ada pada kreativitas kolektif. Apa yang dulunya dianggap obyektif, fakta sosial yang keras, seperti gender atau kelas atau komunitas, sekarang dianggap “dibangun secara budaya” atau “dibentuk.” Berbeda dengan kaum strukturalis, poststrukturalis menekankan hak pilihan manusia dan juga perubahan, tidak demikian halnya. banyak konstruksi seperti rekonstruksi, proses penciptaan berkelanjutan. Untuk alasan ini “esensialisme” adalah salah satu penghinaan terbesar dalam kosa kata mereka”.

Tetapi Adams dan kawan-kawan mengambil poststrukturalisme dengan suatu perbedaan, dengan program penyusunan dan pengembangan kembali premis sosiologi historis. Secara ontologis, buku mereka meneruskan pandangan tentang kesadaran manusia individu sebagai situs utama dan sumber proses sosial. Secara epistemologis, ia menekankan penafsiran kesadaran — karenanya, perlakuan terhadap teks-teks yang mendokumentasikan kesadaran itu — sebagai sarana untuk pengetahuan tentang proses sosial historis. Secara metodologis, ini menyiratkan pendekatan hermeneutik, walaupun tanpa menyebutkan istilah tersebut.

Gelombang ketiga tahun 1990-an dan sesudahnya, menurut kronologi ini, menolak problematika Marxis demi penekanan pada budaya, kesadaran, dan interpretasi. Oleh karena itu, “baik aktor dan

hubungan di antara mereka dipahami sebagai pembentukan oleh budaya dan konjungtur sejarah, daripada sebagai refleksi dari beberapa sistem hubungan ekonomi yang mendasarinya.

Dalam versi Richard Biernacki, misalnya, pergeseran dari gelombang kedua ke gelombang ketiga melibatkan perpindahan dari penalaran akhir ke rekonstruksi situasi di mana aktor sosial bertindak. Tindakan menjadi bukan mengejar tujuan yang jelas dengan sarana instrumental, tetapi “penemuan pemecahan masalah.

Karena, seperti yang ditunjukkan oleh Biernacki, Max Weber mengorganisasikan sebagian besar analisisnya seputar skema sarana, sebuah kejutan menunggu pembaca *Remaking Modernity*.

Untuk buku yang paling banyak dibahas dan dikutip penulis tidak lain adalah karya Max Weber. Dalam buku ini, pandangan Weber tumbuh subur, sedangkan pandangan Marx memudar, sementara Foucault dan (lebih mengejutkan) Emile Durkheim bertahan sebagai sumber inspirasi dalam kajian ilmu social modern.

BAB 2

Pendekatan Teori Multidimensional Dalam Penulisan Sejarah

Oleh: Indriyanto

A. Pendekatan Multidimensional Dalam Ilmu Sejarah

Manusia merupakan penentu dari arti atau makna dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu atau dikatakan sebagai makhluk yang diberikan kemampuan untuk memaknai suatu peristiwa pada masa lalu.

Sejarah dalam pengertian sebagai rekonstruksi masa lampau, dalam perkembangannya mengalami banyak perdebatan dan saling mengklaim tentang cara yang tepat untuk merekonstruksi kejadian tersebut. Menariknya pemikiran kritis tersebut sebenarnya sudah muncul masa-masa Yunani kuno dan mencapai puncaknya pada decade setelah perang dunia ke-2. Beberapa ilmuwan berupaya untuk menyempurnakan instrumen metodologis dan analitisnya. Dalam perkembangan masa sekarang ini telah muncul suatu gagasan pemikiran dalam penulisan sejarah yang menggunakan pendekatan multidimensional, yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan bantuan konsep-konsep dan teori-teori dari berbagai cabang ilmu sosial untuk menganalisis peristiwa masa lampau (baca: sejarah). Di Indonesia, pendekatan multidimensional ini prakarsai oleh Prof.Dr.Sartono Kartodirdjo, ha ini dapat digali dari tulisannya yang berjudul *The Peasant Revolt of Banten in 1888*.

Tulisan-tulisan sejarah yang memang pada sebagian besar sejarawan ditulis dalam bentuk deskriptif naratif bahkan oleh orang yang berkecimpung di dunia sejarah, model ini sangatlah menonjol. Uraian peristiwa sejarah ini biasanya dideskripsikan saja dan miskin aspek teori dan metodologi. Saat ini, teori dan metodologi mulai dimunculkan apabila seorang penulisan sejarah tidak hanya sekedar bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian, tetapi bermaksud menerangkan peristiwa atau kejadian itu dengan mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungannya, konteks sosial-kulturalnya. Dengan kata lain penggunaan teori dan paradigm dalam mengkaji peristiwa sejarah, secara mendalam hendak dilakukan analisis tentang faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual tentang unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji. (Sartono Kartodirdjo, 1988: 2)

Terhadap hal tersebut dalam melakukan pengkajian dan analisis dibutuhkan instrumen analitis yang dapat dioperasionalkan fungsinya, sehingga relevan dengan permasalahan yang sedang dianalisis. Langkah penting dalam membuat analisis sejarah ialah dengan menyediakan suatu kerangka pemikiran atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan digunakan dalam membuat analisis itu.

Pendekatan multidimensional dalam sejarah merupakan aspek pokok keilmuan sejarah. Meskipun demikian, tidaklah menghalangi dipergunakannya konsep-konsep dan metode-metode ilmu-ilmu bantu guna memperkaya dan memperdalam penguraian deskripsi atau narasi sejarah (Kartodirdjo, 1982: vii) Jadi, menurut

Sartono, instrument yang akan digunakan haruslah sesuai dengan produk yang hendak dihasilkan.

Metode dalam memahami suatu peristiwa sejarah dapat dilakukan melalui berbagai model metodologis atau perspektif teoritis dan atau perspektif ekonomis, sosiologis, politikologis, dan kultural-antropologis. Khusus pada kegiatan analitis terhadap sejumlah aspek dari fenomena-fenomena yang kompleks itu dapat dikhususkan atau disendirikan dan berbeda dari yang lain, dan hal tersebut harus dilakukan setepat dan berhati-hati sehingga tidak menimbulkan perbedaan pemahaman pada konteks yang menjadi perhatian dari suatu peristiwa sejarah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membayangkan bahwa apabila beberapa factor tersebut dipertemukan maka dapat menyebabkan terjadinya peristiwa sejarah. Menurut Sartono, masing-masing factor tersebut memiliki peristiwanya sendiri sebelum akhirnya disatukan atau menyatukan sendiri menjadi peristiwa lainnya lagi. Pertimbangan teoritis dapat dilakukan dan dapat dibahas secara terpisah aspek-aspek itu sebagai faktor-faktor kondisional dari peristiwa sejarah. (Kartodirdjo, 1984: 24)

Dengan demikian menurut Sartono ada keterkaitan antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya perubahan dan pembaharuan metodologi. Perubahan metodologi itu diantaranya adalah upaya melakukan *rapproachment*. Hal ini berakibat pada setiap pelaksanaan penyusunan design riset tentunya membutuhkan kerangka konseptual referensi yang utuh

dimana di dalamnya terdapat instrumen analitis yang mampu memberikan kemampuan peneliti untuk menganalisis data.

Rapproachment antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial difokuskan pada implementasi konsep-konsep dan teori-teorinya. Sejarah bersifat empiris (nyata), maka tentunya harus didasarkan atau berpangkal pada fakta-fakta yang telah disaring dari berbagai macam sumber sejarah (aspek kritis Sejarah), sedangkan teori dan konsep digunakan hanya sebagai alat untuk mempermudah analisis dan sintesis. Di samping itu dalam menggarap analisis sejarah, hipotesis dan teori sangat membantu cara kerja para peeliti atau ilmuwan sejarah supaya tidak berantakan dalam melakukan penelitian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fakta-fakta sejarah tidak boleh digunakan untuk mendukung pembenaran suatu teori, demikian pula sebaliknya, teori yang tidak dapat menerangkan fakta-fakta perlu ditinggalkan.

Ilmu-ilmu sosial pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 mengalami perkembangan yang cukup signifikan atau bisa dikatakan telah banyak memberikan pandangan-pandangan baru bagi ilmu-ilmu lainnya khususnya bagi ilmu sejarah, sehingga bagi ilmu sejarah terbuka kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan adaptasi terhadap kedudukannya, khususnya pada metodologisnya, yaitu dengan cara mengarahkan dirinya pada ilmu-ilmu sosial. Kemudian, apa yang melatarbelakangi penyesuaian ilmu sejarah terhadap ilmu-ilmu sosial itu? Terdapat beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu: 1) Perluasan problem areas serta tema-tema baru menuntut agar sejarah lebih bersifat analitis dan tidak naratif semata-mata; 2) Dengan

adanya kemungkinan meminjam alat-alat analitis atau kerangka konseptual dari ilmu-ilmu sosial ada potensi lebih besar bagi sejarah untuk mengungkapkan pelbagai dimensi gejala-gejala sejarah; 3) Sebagai umpan balik dari perkembangan itu terciptalah jenis-jenis sejarah baru yang lebih banyak memakai pendekatan social-scientific, yaitu suatu jenis sejarah yang berbeda secara mendasar dari sejarah naratif. (Kartodirdjo, 1990: 255)

B. Relasi Ilmu Sejarah dengan Ilmu-ilmu Sosial

Muncul pertanyaan kritis dengan pemahaman apa itu ilmu-ilmu sosial, dan apa yang menjadi sasarannya, tujuan, serta hubungannya antara satu dengan lainnya. Ilmu-ilmu sosial di sini adalah semua ilmu pengetahuan atau disiplin-disiplin akademis yang memfokuskan studinya pada manusia dalam relasi sosialnya. Karena masalah manusia dalam kehidupan masyarakat mencakup pengertian yang luas maka untuk dapat mempelajari dan memahami secara mendalam diperlukan suatu pembagian lapangan perhatian yang secara khusus memusatkan pada salah satu segi dari tingkah laku manusia dalam pergaulannya yang dilola dalam kesatuan-kesatuan lapangan studi. (Djoko Suryo, 1980: 1) Beberapa nama bidang studi kemudian dilabeli berdasarkan perilaku kehidupan masyarakat yang menjadi pusat pengamatannya. Yang termasuk dalam kelompok ilmu sosial adalah ilmu ekonomi, sosiologi, anthropologi sosial, ilmu politik, psikologi sosial, dan sejarah. Masing-masing disiplin ilmu tersebut memiliki sejarahnya perkembangannya, model pengamatan, permasalahan, sumber-sumber bahan metode penelitian masing-masing.

Ketika sejarah dimasukkan dalam bagian ilmu social, maka terdapat sejumlah pendapat mengenai hal tersebut. Pertama, bahwa sejarah dikualifikasikan sebagai bidang "ilmu" baru pada kisaran abad ke-19. Sebelum-sebelumnya, pada kisaran abad ke-18 sejarah dianggap hanya sebagai bagian dari kajian seni.

Dalam perkembangannya, ilmu sejarah dianggap lebih bersifat keilmuan dikarenakan memiliki ciri-ciri struktur sistem. Sebelum dianggap sebagai suatu sistem, sejarah hanyalah peristiwa yang disampaikan secara naratif oleh manusia terhadap peristiwa masa lampau, dan hanya terbatas membahas masalah; apa, kapan, di mana, dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi, sehingga minus atau miskin analitis. Maka dari itu dalam studi sejarah yang konvensional ini tidak menonjolkan unsur persoalan sebab-akibat (kausalitas) sebagai pusat penggarapannya.

Sedangkan perkembangan ilmu sejarah setelah abad ke-18 dilihat sebagai system tentunya menghendaki adanya sistematisasi dalam penggarapan sasaran studinya. Artinya ilmu sejarah memiliki kerangka kerja konseptual yang jelas dan memiliki peralatan metodologis dalam menganalisis sasaran yang dipelajarinya sehingga mampu mengungkapkan kausalitas secara tajam sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas dari suatu peristiwa.

Bila dicermati terhadap sasaran objek kajiannya, maka studi sejarah dibandingkan dengan studi bidang ilmu sosial lainnya tidaklah banyak berbeda. Terkait persoalan penggambaran serta model analisis, bagi sejarah ataupun ekonomi ataupun, antropologi dan juga ilmu-ilmu

social lainnya, adanya pembagian tersebut dianggap saling melengkapi dan membantu. Analisis tentunya membutuhkan suatu penggambaran. Hal ini tentunya dalam proses penggambaran atau pemerikan yang memadai adalah penggambaran yang kompleks tergantung pada cukupnya factor-faktor penyebab yang ada di dalamnya. (Kartodirdjo, 1970: 61-68) Sebagai contoh perbandingan antara sejarah dengan sosiologi. Sejarah mempelajari yang unik, sedangkan sosiologi mempelajari yang umum. Tanpa perhubungan antara keduanya, maka tidak akan diperoleh eksplanasi. Sosiologi lebih mementingkan generalisasi, tetapi segi keunikan historisnya tetap diperlukan. Sebaliknya dalam sejarah, sekalipun sasarannya lebih diarahkan pada keunikan, tetapi juga tidak berarti mengabaikan sifat-sifat yang umum. Sebagai contoh dalam sejarah diperlukan juga konsep-konsep umum untuk mengkonseptualisasikan gejala sejarah, seperti tercermin dalam penggunaan konsep feodalisme, borjuasi, kapitalisme, dan lain-lain.

Terdapat pertanyaan mengenai hubungan kausalitas antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya? Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hubungan antara sejarah dengan sosiologi, tercermin dalam ungkapan yang berbunyi "Sejarah adalah sosiologi dengan persoalan kompleks. Sosiologi adalah sejarah tanpa persoalan kompleks". Dalam perkembangan kedua disiplin saling berhubungan erat, sehingga timbul jenis-jenis pendekatan interdisipliner antara keduanya. Beberapa Penulis yang menggunakan pendekatan sosiologis dalam kajian sejarah (sociological history) antara lain: Caulanges, Giots, Pirenne, Maunier, Maitland, Stephenson, Marc Bloch. Tema yang diambil

oleh penulis ini antara lain memusatkan pada lahir dan berkembangnya masyarakat tertentu, terutama yang berhubungan dengan masalah demografi, ekonomi, dan perpindahan penduduk. Kesemuanya memusatkan sejarah Eropa pada periode klasik atau pertengahan. Ada pula yang memusatkan pada masalah case-study tentang daerah kebudayaan. Contohnya: Howard Beeker, Jacob Burchard, Max Weber, Toynbee, dan lain-lain.

2. Hubungan antara sejarah dengan ilmu politik. Secara konvensional sejarah politik dalam hal ini banyak menampilkan segi politik secara menonjol. Dalam hubungannya dengan kedua disiplin ini melahirkan apa yang disebut pendekatan ilmu politik, dan pendekatan institusional, pendekatan legalistis, pendekatan kekuasaan, pendekatan nilai dan pengaruh, pendekatan kelompok, dan sebagainya.
3. Hubungan antara sejarah dan anthropologi juga erat terutama bagi sejarah karena mendapat manfaat dengan pendekatan kulturalnya. Anthropologi lazim mengkaji suatu komunitas dengan pendekatan sinkronis, yaitu seperti membuat suatu pemotretan pada momentum tertentu mengenai pelbagai bidang atas aspek kehidupan komunitas, sebagai bagian dari satu kesatuan atau sistem serta hubungan satu sama lain sebagai subsistem dalam suatu sistem. Rasanya gambaran sinkronis ini tidak memperlihatkan pertumbuhan atau perubahan. Justru dalam studi anthropologi diperlukan pula penjelasan tentang struktur-struktur sosial yang berupa lembaga-lembaga, pranata, sistem-sistem, kesemuanya akan dapat diterangkan secara lebih jelas apabila diungkapkan pula bahwa struktur itu adalah produk dari

perkembangan di masa lampau. Hal ini akan dapat dijelaskan eksistensinya dengan melacak perkembangan sejarahnya. (Kartodirdjo, 1988: 165)

4. Hubungan antara sejarah dengan ekonomi. Sepanjang sejarah modern telah muncul kekuatan-kekuatan ekonomi pasar internasional maupun nasional. Dengan demikian, juga menyangkut soal metodologis untuk memahami perkembangan itu. Hubungan antara keduanya memungkinkan sejarah memperoleh hipotesa-hipotesa dan model-model yang berhubungan dengan tindakan sosial dalam hubungannya dengan alokasi sumber kehidupan dan pemilihan alternatifnya. (Suryo, Ibid: 7)

C. Mengapa Penting Ilmu-ilmu Sosial bagi Ilmu Sejarah

Sejak masa Perang Dunia ke-2, kegiatan dan karya-karya sejarah sudah mulai bergeser dan lazim untuk menggunakan pendekatan ilmu sosial. Rapproachment atau proses saling menggunakan atau saling mendekatkan diri antara ilmu sejarah dan ilmu-ilmu sosial dijelaskan oleh Sartono oleh karena beberapa sebab, antara lain: (Kartodirdjo, 1988: 130)

1. Pendekatan sejarah dengan model deskriptif-naratif dianggap tidak memadai dalam model eksplanasi terhadap berbagai macam masalah atau gejala yang serba kompleks. Akibat kompleksitas objek yang sedang dikaji dalam sejarah sehingga dibutuhkan beberapa atau salah satu pendekatan yang mampu mengungkapkan, dan menjelaskan persoalan objek tersebutnya.
2. Rapproachment dianggap sebagai metode yang dianggap lebih memadai untuk menjelaskan persoalan pada poin 1..

3. Pasca perang Dunia Ke-2 telah berkembang sedemikian hebatnya kajian ilmu social bahkan teori dan konsep sosial banyak digunakan sebagai instrument atau alat analitis yang relevan analisis historis/kesejarahan.
4. Kajian studi sejarah tidak hanya informatif tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana saja (*what, who, when, where and how*), tetapi sudah meluas pada aspek yang lebih luas, misalnya struktur masyarakat, pola kelakuan, kecenderungan proses dalam berbagai bidang, dan lain-lain..

Perlu diakui bahwa dalam periode tersebut di atas ilmu sejarah menerima pengaruh besar dari kemajuan pesat ilmu sosial, antara lain perspektivisme yang menonjol, sehingga terasa perlu mengadakan perubahan metodologis yang lebih canggih serta lebih produktif.

Pendekatan sejarah konvensional menurut Sartono tidak banyak memiliki alat analisis, hal itu dikarenakan kelemahan ilmuan sejarah dalam memunculkan atau menciptakan teori dan konsep-konsep secara khusus dan menurut Sartono lebih banyak menggunakan bahasa kehidupan sehari-hari dan common sense serta minim menggunakan istilah-istilah keilmuan resmi.

Upaya mendekatkan dan menyatukan antara ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu social lainnya tentunya diarahkan pada proses integrasi antara pengkajian sejarah dengan ilmu-ilmu sosial, sekaligus juga mendorong terjadinya pengkajian sejarah yang memiliki rasa” interdisipliner.

Menurut Ankersmit ditinjau dari aspek teoritis diuraikan keuntungannya yaitu: (F.R. Ankersmit, 1987: 246-247)

1. Dengan bantuan teori-teori ilmu sosial yang menunjukkan hubungan antara berbagai faktor (sebagai contoh penyajian tentang angka inflasi, pendapatan nasional, pengangguran, angka kematian, angka kelahiran, angka migrasi dan sebagainya), uraian-uraian mengenai suatu kondisi pada masa lalu dapat disajikan secara terperinci, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
2. Teori sosial ilmiah dan ilmu sejarah mampu mengadakan hubungan antara berbagai variabel. Ini dapat mendorong ilmuan sejarah meneliti sebuah atau berbagai macam aspek dari masa lalu yang sesuai dengan variabel tertentu. Dengan bantuan atau menggunakan teori dari ilmu sosial lain, ilmuan sejarah dapat melacak hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Misalnya, sebuah teori mengenai hubungan antara penghematan dengan investasi. Teori tersebut dapat membantu ilmuan sejarah untuk meneliti dan mengkaji peristiwa ekonomi berupa peristiwa penghematan yang terjadi di Inggris pada abad ke-18, dan dengan demikian dapat menambah dimensi baru kepada diskusi mengenai latar belakang terjadinya Revolusi Industri di Inggris. Dengan pendekatan interdisipliner akan dan dapat memunculkan minat penelitian sejarah sendiri serta membuka jalan untuk memberi jawaban baru kepada pertanyaan-pertanyaan lama yang selama ini tidak bisa atau tidak muncul dalam penelitian-penelitian sejarah sebelumnya.
3. Akibat yang dapat diharapkan ialah kaitan yang diadakan oleh suatu teori sosial, serta permasalahan yang ditimbulkan oleh teori itu, juga

akan memberi tempat baru kepada permasalahan tersebut dalam tinjauan sejarah. Teori-teori sosial dapat membantu ilmuan sejarah, agar dapat menyusun pengetahuannya mengenai masa silam dalam struktur yang paling memadai.

4. Teori-teori dalam ilmu sosial, biasanya berkaitan dengan struktur umum dan supra-individual di dalam kenyataan sosio-historis. Oleh karena itu, teori-teori tersebut dapat menganalisis perubahan-perubahan yang mempunyai jangkauan luas. Suatu pendekatan sosio-historis dapat membantu ilmuan sejarah atau ilmuan sosial, bila ingin mengamati dan memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan ribuan orang yang secara realita tidak berada di dalam satu lokasi. Hal yang menarik adalah bagaimana sejarah saat ini juga difokuskan pada kajian-kajian terhadap orang-orang atau masyarakat “kelas” bawah. Hal ini dapat dilihat pada kajian sejarah yang sering ditampilkan oleh Prof. Sartono Kartodirdjo, bahwa perspektif historis dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial akan memberi tempat bagi rakyat kecil yang selama ini dianggap tidak memainkan peran dalam sejarah dimana selama ini kajian tokoh dalam sejarah selalu menampilkan tokoh-tokoh kelas “atas”. Dengan kata lain rakyat kecil menjadi objek atau dramatis personal.
5. Bila teori-teori dalam ilmu-ilmu sosial memang dapat diandalkan dan dipercaya, maka dengan mempergunakan teori-teori itu, kajian sejarah dapat melepaskan diri dari tuduhan subjektivitas yang sering diberikan kepada ilmuan sejarah. Penelitian sejarah yang ditopang oleh teori-teori sosial dapat menunjang objektivitas keilmuan sejarah itu sendiri.

Konsep-konsep dan teori-teori ilmu-ilmu sosial itu diakui sangat perlu. Meskipun demikian, tidak satu pun di antaranya memberikan jalan keluar yang siap pakai begitu saja diambil tanpa pengujian yang hati-hati, pengadaan eksperimen, dan adaptasi. Para sejarawan sendiri harus mencari data dan metode ilmu sosial yang dapat memperluas lingkup dan makna penelitian mereka. Mereka harus menentukan sendiri apa yang harus diubahsesuaikan, dan apa yang harus dipadukan dalam kombinasi-kombinasi baru secara bebas, untuk dapat memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh mereka sendiri. (Ibrahim Alfian, 1985: 14)

D. Relevansi Metodologi Sejarah dengan Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial Apakah Relevan?

Konsep sejarah secara sistematis menurut Sartono dapat menjelaskan keterkainnya dengan ilmu-ilmu social lainnya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: (Kartodirdjo, 1988: 131)

1. Sejarah sebagai suatu sistem

Suatu sistem terdiri atas unsur-unsur atau aspek-aspek yang merupakan suatu kesatuan. Tentang bagaiman cara kerja suatu sistem, maka perlu dilakukan analisis dengan bantuan ilmu-ilmu sosial. Dalam sistem yang besar sedikitnya terdapat terdapat empat komponen yaitu kultur, biologi, ekologi, dan personality (pribadi) dimana masing-masing komponen tersebut memiliki fungsi masing-masing tetapi saling terkait untuk membentuk suatu sistem. Di sini diperlukan pendekatan interdisipliner untuk menganalisis terjalinya fungsi berbagai komponen itu (ilmu kemanusiaan, Biologi, Ekologi, dan

Psikologi). Biologi dan Ekologi sendiri memerlukan pembagian lebih lanjut atau pelbagai disiplin.

Pada subsistem kebudayaan, terdapat tiga unsur yang mendukungnya, yaitu ekonomi, sosial, dan politik, yang kesemuanya merangkum dalam satu subsistem yaitu kebudayaan itu sendiri.

Ekonomi sebagai sistem jaringan atau distribusi komoditi sangat ditentukan oleh sistem sosial, seperti stratifikasi sosialnya. Masyarakat sebagai sistem jaringan atau distribusi hubungan sosial yang sebagai sistem sangat ditentukan oleh politik yaitu terkait dengan sistem distribusi kekuasaan. Dengan demikian jelaslah terdapat hubungan yang saling pengaruh mempengaruhi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga komponen itu pada hakekatnya sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, maka ketiganya dapat dicakup dalam kebudayaan sebagai suatu sistem. Jika manusia menghadapi proses politik sebagai gejala sejarah maka untuk mengetahui proses itu, bagaimana pekerjaannya, perlu dilacak struktur kekuasaan yang ada di “belakangnya” sedangkan struktur politik dengan sendirinya kembali pada aspek politiknya, yang seperti dijelaskan di atas mempunyai dimensi sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Tidak dapat diingkari bahwa tanpa bantuan kerangka konseptual dari ilmu-ilmu sosial, gejala politik tersebut di atas sukar dianalisis dan dipahami jalannya prosesnya. Secara akademik, hal tersebut tidak langsung berurusan dengan hubungan sebab akibat, tetapi lebih banyak dengan kondisi-kondisi dalam berbagai macam dimensinya.

Selanjutnya gejala ekonomis dan sosial perlu ditelaah juga dari aspek politik dan kulturalnya. Kombinasi antara berbagai macam

perspektif akan mampu mengekstrapolasikan interdependency antara berbagai aspek atau unsur. Dengan demikian gambaran gejala akan memperoleh lebih banyak relief. Di sini terdapat keuntungan pendekatan ilmu sosial, ialah menyoroti secara multi perspektivitas atau multidimensionalitas. Sebaliknya bentuk naratif hanya mampu memberi gambaran “datar” sehingga mudah terjebak dalam determinisme.

Dengan demikian, ilmu-ilmu sosial lain bersama dengan metode-metodenya dapat digunakan untuk menunjang terwujudnya keterangan sejarah, sehingga gambaran kenyataan sejarah lebih penuh menampakkan diri. Namun demikian, ilmu-ilmu tadi perlu dibatasi pada jabatannya sebagai penunjang ilmu sejarah dalam usahanya menerangkan masa lampau tersebut. (Poespoprodjo, 1987: 62) Sebagai contoh misalnya Sartono Kartodirdjo dalam Pemberontakan Petani Banten Tahun 1888, menyatakan: “Dalam menganalisis konflik-konflik sosial dalam masyarakat Banten, kita harus memperhatikan sistem-sistem nilai tradisional dan keagamaan, sebagai suatu kekuatan konservatif yang menentang westernisasi ...” Sartono mencoba menggali korelasi antara kecenderungan-kecenderungan sosial dan peristiwa-peristiwa politik di satu pihak dan pola-pola kultural di pihak lain melibatkan suatu pendekatan sosio-antropologis. (Kartodirdjo, 1984: 26) Sementara untuk memperoleh pemahaman yang lengkap mengenai determinan-determinan gerakan sosial, diperlukan perhitungan tentang proses politik sebagai suatu konsep yang mengacu kepada interaksi antara berbagai unsur sosial yang bersaing untuk

memperoleh alokasi otoritas. Analisis semacam ini perlu menggunakan konsep-konsep ilmu politik.

2. Kecenderungan Penulisan Sejarah Struktural

Tipikal atau kebiasaan penulisan sejarah struktural tidak bisa dilepaskan terhadap pemahaman masalah masyarakat yang terikat pada struktur-struktur tertentu, sehingga perlu penjelasan yang lebih komprehensif tentang struktur itu sendiri. Sudah barang tentu penjelasan tentang struktur juga tidak bisa dilepaskan dengan sejarah prosessual. Ini berarti unsur struktur dan proses merupakan pijakan perspektif historis bilamana akan membahas peristiwa masa lampau secara kritis dan analitis.

Dengan perlengkapan metodologi baru, seperti penggunaan pendekatan ilmu sosial, studi sejarah kritis memperluas daerah pengkajiannya, sehingga terbukalah kemungkinan melakukan pemfokusan aspek atau dimensi baru dari pelbagai gejala sejarah. Kalau pada umumnya segi prosessual yang menjadi fokus perhatian sejarawan dengan pendekatan ilmu sosial dapatlah digarap aspek strukturalnya. Selanjutnya dipahami bahwa banyak aspek prosessual yang hanya dapat dimengerti apabila dikaitkan dengan aspek strukturalnya, bahkan dapat dikatakan pula bahwa proses hanya dapat "berjalan" dalam kerangka struktural. (Kartodirdjo, 1988: 134) Selanjutnya Sartono Kartodirdjo memberikan contoh, bahwa tindakan manusia dalam pergaulan senantiasa mengikuti kebiasaan, adat atau pola kehidupan yang berlaku dalam masyarakat itu. Pola atau kebiasaan yang mantap menimbulkan suatu kelembagaan, seperti adat-istiadat, etika, etiket, upacara, dan sebagainya. Dengan demikian kelakuan manusia dalam

masyarakat selalu distrukturasikan sesuai dengan tradisi atau konvensi. Di sini struktur kelakuan yang mantap melatarbelakangi tindakan atau kelakuan tertentu seseorang. Apabila tidak ada struktur yang melandasinya, maka tindakan itu sukar "diramalkan" atau "ditafsirkan" oleh sesamanya, jadi timbul kekalutan sosial, suatu keadaan yang tidak mungkin kehidupan bersama secara teratur dan beradab. Meskipun demikian, bagaimanapun menariknya sejarah struktural, akan tetapi sejarah bukanlah sejarah apabila tidak memuat cerita tentang bagaimana terjadinya. Oleh karena itu seyogyanya campuran antara sejarah prosessual dan struktural yang paling memadai. Committee SSRC menjelaskan, "The fundamental problem of historical study is the analysis of change over time. *Some social science have found it possible, in general, to push the problem of time into the background.* (SSRC, 1954: 24) Sejarah struktural dapat diibaratkan kerangka tanpa daging, jadi tanpa kehidupan. Sebaliknya sejarah prosessual tanpa struktur tidak mempunyai bentuk. Kehidupan hanya dapat dimasukkan dalam konstruk apabila ada naratif yang mempunyai rethorik yang menggairahkan.

Suatu analisis struktural dari riset sosiologi sangat penting untuk digunakan dalam mengkaji struktur masyarakat masa lampau. Contoh populer tentang hal ini adalah studi Floyd Hunter mengenai struktur kekuasaan masyarakat Atlanta, Georgia. Tesis dasar yang dicoba untuk didokumentasikan ialah bahwa sebagian besar kekuasaan yang efektif dalam masyarakat itu terpusat pada individu yang jumlahnya sangat kecil. Secara lebih khusus ia membuat hipotesis bahwa di belakang pemerintah yang terpilih secara resmi di Atlanta, berdiri pula beberapa elit tidak resmi yang sangat berkuasa yang merupakan orang-orang yang

sebenarnya "membawa" masyarakatnya. Dengan menguasai sumber-sumber vital, bisnis, dan industri besar, fasilitas komunikasi, perbankan dan aktivitas keuangan lainnya, serta mengatur partai-partai politik, dan diduga dapat mendominasi semua keputusan dan program utama. Sebagai akibat yang wajar dari tesis ini bahwa tidak seorang pun di luar struktur kekuasaan yang sangat terpusat, benar-benar mempunyai kontrol terhadap kepentingan masyarakat. (Olsen, 1968: 212) Konsep sosiologi ini sangat penting dalam analisis sejarah yang ingin mengetahui struktur kekuasaan dalam perkembangannya di negara Atlanta.

Dalam masalah struktur ini, sejarawan yang ingin membuat bagian analisis ilmu pengetahuan bagi kepentingan pemikirannya, tidak hanya digunakan untuk kepentingan sejarah saja, tetapi juga untuk kepentingan analisis studi lainnya. Namun demikian, sejarah sangat penting untuk menggunakan konsep dari ilmu pengetahuan ini. SSCR, misalnya mengatakan bahwa "There are two other ways of viewing and interpreting the subject matter of history. One is terms of the structure of the situation in which events take place ...". (SSCR, 95).

Demikian halnya dengan masalah proses, James Thomson dan William McEwen mengajukan argumentasi bahwa tujuan organisasi tidaklah statis, tetapi agak berubah-ubah oleh adanya interaksi di dalam organisasi itu sendiri, dan antara organisasi dengan lingkungannya. Menurut mereka penempatan organisasi harus dilihat sebagai suatu proses yang terus menerus yang selalu sensitif menerima tekanan-tekanan sosial. (Olsen, 1968: 217) Dari contoh ini maka dapat disimpulkan bahwa peranan proses tidak bisa diabaikan dalam melihat

suatu perkembangan. Sementara sejarah itu sendiri mempunyai titik tekan analisis pada perkembangan atau proses.

Apabila kita bertolak dari pendapat bahwa setiap proses sejarah adalah momentum-momentum dari perubahan sosial. Di satu pihak kejadian sejarah atau peristiwa merupakan proses, dan di pihak lain dapat dipandang sebagai aktualisasi dari suatu struktur. Dengan perkataan lain setiap struktur merupakan aspek statis dari suatu proses, dan sebaliknya setiap proses merupakan aspek dinamis dari suatu struktur. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut: Tindakan atau kelakuan manusia pada saat tertentu selalu mengikuti pola tertentu sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya., dengan perkataan lain menurut pranata sosialnya. Ini berarti bahwa kelakuan atau aksi itu telah dibentuk atau distrukturasikan. Pada umumnya struktur sendiri berubah karena adanya pengaruh dari lingkungan, seperti dicontohkan misalnya adanya disorganisasi dan disintegrasi pola peranan. Namun demikian suatu destrukturasi akan diikuti oleh restrukturasi. Justru di sini dapat diobservasi proses-proses yang mulai membentuk dan memantapkan pola kelakuan baru sehingga akhirnya muncul struktur baru. (Kartodirdjo, 1988: 124).

Antropolog Radcliffe Brown dalam bukunya *Structure and Function in Primitive Society* menjelaskan tentang fenomena sosial yang ditekankan pada hubungan antara kelompok dan individu sebagai organisme, yang disebut dengan istilah "struktur sosial". Menurut Brown, inilah yang merupakan studinya sebagai seorang antropolog sosial. Di sinilah letak antropologi sosial sebagai ilmu alam, yang

menentukan ciri-ciri umum struktur sosial masyarakat sebagai kesatuan komponen. Dimensi struktur sosial menurut Brown ialah: 1) Hubungan diadik, yaitu hubungan sosial dari individu pada individu yang lain; 2) hubungan deferensial, yaitu hubungan sosial mereka dengan individu atau kelompok yang berbeda-beda. Dengan demikian, realitas konkret dalam struktur sosial adalah rangkaian hubungan yang benar-benar ada, yang terjadi pada suatu waktu. Dengan kata lain, bahwa hubungan aktual individu-individu dan kelompok-kelompok individu berubah dari tahun ke tahun atau dari hari ke hari. Adapun bentuk sosialnya juga mengalami perubahan tetapi sedikit demi sedikit. Struktur sosial itu ada dan dapat dipahami dengan pendekatan pada masyarakat sederhana (individu) maupun masyarakat yang kompleks atau manusia dalam sistem struktur. (Brown, 1965: 188 et.seq.) Dengan demikian teranglah bahwa peranan ilmu sosial sangat penting untuk memahami masyarakat secara mendalam dan ini sangat berguna bagi sejarah.

Oleh karena itu pendekatan struktural merupakan implikasi metodologis dari ilmu sejarah karena mau tidak mau sejarah akan menggunakan pendekatan analitis dan multidimensional, bila melakukan rapproachment terhadap ilmu-ilmu sosial lainnya.

E. Konsep dan Teori Dalam Analisis Historis

Pada bagian lain di bab in menjelaskan beberapa alasan dan latar belakang serta relevansi ilmu-ilmu sosial bagi kepentingan analisis sejarah, maka di bawah ini akan disajikan bagaimana hal tersebut diimplementasikan dalam konteks yang sesungguhnya.

Beberapa ilmuan mengatakan bahwa masalah metodologi tentunya berkaitan erat dengan masalah teori. Teori sebagaimana dikemukakan oleh Percy S. Cohen, dibagi dalam empat kelompok besar, yaitu: 1) Teori-teori analitis, seperti logika dan matematika; 2) teori-teori normatif, seperti etika dan estetika; 3) Teori-teori saintifik; dan 4) Teori-teori metafisis.

Cohen mengatakan bahwa teori saintifik memiliki ciri khas universal karena teori saintifik dianggap menjelaskan factor-faktor yang memunculkan fenomena.

Fungsi teori dalam disiplin ilmu sejarah yaitu memiliki tujuan untuk mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti, menyusun kategori-kategori untuk mengorganisasikan hipotesis-hipotesis yang melaluinya berbagai-bagai macam interpretasi data dapat diuji, dan memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Teori membekali dan memberikan pemahaman kepada peneliti dan ilmuan dengan sejumlah bahan analitik yang dapat diajukan terhadap fenomena yang ditelitinya. (Ibrahim Alfian, Supplement buku Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis: 5)

Sartono menggunakan pendekatan yang pernah digunakan Henry A. Landsberger sebagai kerangka analisis dalam *The Role of Peasant Movement* (1968) dalam mencari pengertian tentang asal-usul, perkembangan, dan akibat-akibat pergerakan yang bersifat protes social (baca: social movement atau gerakan social). Sartono menggunakan aspek-aspek analitis yang menjadi kerangka penelitiannya yaitu: 1) Struktur politik ekonomi pedesaan Jawa di abad XIX dan abad XX; 2)

basis massa pergerakan sosial; 3) kepemimpinan pergerakan-pergerakan sosial; 4) ideologi-ideologi pergerakan, dan 5) dimensi kultural yang bersifat mendorong pergerakan sosial. (Ibid., p. 6)

Dalam mengkaji masalah nasionalisme, Sartono Kartodirdjo menggunakan konsep dari psikologi sosial. Nasionalisme dapat dilihat sebagai fakta sosio-psikologis, terutama pada tingkat pembentukannya, seperti yang terjadi di zaman Pergerakan Nasional. Kesadaran kelompok, sentimen dan kehendak kelompok yang dinyatakan pada berbagai organisasi nasional, merupakan wujud dan institusionalisasi tindakan kelompok. Bentuk tindakan oleh kelompok nasionalisme dalam pengamatan Sartono memiliki tiga aspek yang dapat dibedakan, yaitu: a) aspek kognitif; b) aspek orientasi nilai / tujuan; dan c) aspek afektif. (Kartodirdjo, 1992: 245)

Terhadap kejadian berupa gejolak social di masyarakat, menurut analisis Smelser gejolak sosial dapat terjadi apabila terdapat sejumlah *necessary conditions* atau factor pencetus yang berturut-turut terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Kekondusifan struktural (*structural condusiveness*), yaitu kondusif atau tidaknya struktur sosial budaya masyarakat terhadap gejolak sosial;
- b. Ketegangan struktural (*structural strain*) yang timbul, misalnya berupa ancaman dan deprivasi ekonomi;
- c. Penyebaran keyakinan yang dianut (*the spread of generalized belief*). Dalam hal ini situasi harus dibuat bermakna bagi para pelaku yang potensial, sumber ketegangan dan cara-cara menghadapinya harus diidentifikasi;

- d. Faktor pencetus ide (*the precipitating factor*) berupa sesuatu yang dramatik;
- e. Mobilisasi untuk mengadakan aksi (*mobilization into action*). Dalam kondisi ini peranan pemimpin sangat penting. Situasi dapat dimulai dengan adanya kepanikan, timbulnya permusuhan, dan diteruskan dengan agitasi untuk reform atau revolusi;
- f. Pengoperasian kontrol sosial (*the operation of social control*). (Ibid. Lihat juga: Neil J. Smelser, 1962: 15-17)

F. Pandangan Terhadap Pendekatan Multidimensional

Penerapan pendekatan multidimensional bukan tanpa kondisi pro dan kontra, bahkan beberapa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak yang kontra terhadap pengkajian sejarah yang berorientasi pada ilmu-ilmu sosial, antara lain: (F.R. Ankersmit, 1987: 247-250)

1. Dua keberatan yang sifatnya praktis, yaitu bahan yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah sering tidak lengkap, sehingga kurang memberi pegangan untuk menerapkan teori-teori dari ilmu sosial. Hal ini muncul pada kisaran abad ke -19.
2. Sering juga pendekatan sosio-historis dipersalahkan karena kepeminatannya tidak mencakup keseluruhan peristiwa sejarah karena beberapa ilmuan hanya menaruh minat terhadap beberapa bagian dari masa silam yang diteliti dengan bantuan ilmu-ilmu sosial.
3. Kajian ilmuan sejarah tradisional dianggap hanya menampilkan kajian sejarah secara luas daripada suatu pendekatan ilmu social yang dapat menampilkan data-data secara kuantitatif.

4. Pendekatan terhadap masa lampau yang mempergunakan teori-teori dari ilmu sosial lainnya hanya dapat diandalkan sejauh teori itu dapat diandalkan. Kesahihan teori-teori sosial sering disangsikan, apalagi kalau dibandingkan dengan bobot ilmiah yang terkandung dalam ilmu alam.
5. Suatu teori ilmu sosial tidak dapat digeneralisasikan secara universal, tetapi hanya berlaku terhadap suatu bagian dari masa silam yang ingin diteliti. Jadi, pekerjaan yang harus dilakukan seorang peneliti sejarah justru bertambah, tidak diperhemat. Mempergunakan teori-teori dari ilmu sosial hanya mempunyai fungsi heuristik, artinya memberi ide kepada seorang sejarawan untuk meneliti ini dan itu.
6. Keberatan terakhir tidak merupakan terhadap penggunaan teori-teori ilmu sosial, melainkan lebih merupakan sebuah peringatan, apa yang dapat dan apa yang tidak dapat diharapkan dari ilmu-ilmu sosial, bagi pengkajian sejarah. Bila seorang sejarawan melukiskan sebagian dari masa silam, maka dalam buku atau karangan yang membahas bagian dari masa silam, ia menampilkan suatu gambaran mengenai bagian masa silam itu. Tentunya supaya gambaran itu berbeda daripada gambaran-gambaran yang pernah dilukiskan oleh sejarawan-sejarawan terdahulu. Ilmu-ilmu sosial hanya berguna untuk memerinci detail-detail dalam sebuah uraian historis. Bila seorang sejarawan kita tafsirkan sebagai seorang guru gambar mengenai bagian-bagian dalam masa silam, maka ilmu-ilmu bantu, artinya membantu seorang sejarawan mengadakan seleksi apa yang merupakan masalah parsial saja, bila dipandang dari perspektif uraian historis seluruhnya.

Apabila dilihat perkembangan dari gagasan metodologi multidimensional ini, khususnya di Indonesia, maka sangat menarik apa yang diungkapkan oleh Taufik Abdullah, bahwa pertama multidimensional approach, dikatakannya masih merupakan suatu harapan, karena dari sudut metodologis tidak banyak terjadi perubahan yang berarti. Kedua, ada dimensi yang dilupakan bila tidak dikatakan hilang, oleh sejarawan profesional Indonesia pasca multidimensional approach, yaitu dimensi "makna" dari hasil penulisan mereka. Benarkah demikian?

Pembahasan masalah penggunaan kajian social dalam kajian sejarah harus berangkat dari ciri ilmu sejarah itu sendiri, yaitu bahwa berbicara tentang sejarah adalah berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah tuntas. Setiap hasil penulisan sejarah adalah rethinking kembali terhadap kajian masa lampau yang pernah ditulis oleh penulis masa lalu.

Dari beberapa hal di atas kenyataan bahwa dalam karya sejarah terkesan masih didominasi oleh sejarawan konvensional. Apa yang dihasilkan oleh multidimensional approach lebih merupakan gagasan teoritis bahkan terkesan menjadi gangguan. Hal itu dibuktikan dengan beberapa disertasi yang masih terikat dengan pertanyaan konvensional dan adanya "perdebatan terselubung" dari disertasi-disertasi produk setelah multidimensional approach dipopulerkan. Berbeda ketika melihat tulisan karya Sartono Kartodirdjo. Tulisan disertasi Djoko Suryo yang mencoba menonjolkan model *quanto-history*, Ibrahim Alfian yang mencoba melakukan pendekatan *cluster of events*, suatu yaitu pendekatan dengan model interpretasi teks. Ketiga studi ini merupakan contoh yang cukup

ekstrim bila ditarik pada konsekuensi logisnya karena memperdebatkan asumsi teoritis yang berbeda. Di samping itu, Sutjipto yang lebih melakukan penekanan sumber yang exhaustive, Kuntowijoyo dan Onghokham yang menekankan pada masalah tematis dengan kecermatan konseptualisasi.

RUJUKAN

- Aitken, Hugh G.J. (ed.), 1954. *The Social Science in Historical Study*. New York: SSRC.
- Alfian, Ibrahim, “Sejarah dan Permasalahan Masa Kini” dalam *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Sastra Universitas Gajahmada* Yogyakarta, 12 Agustus 1985.
- Brown, A.R. Radcliffe, 1965. *Structure and Function in Primitive Society*. New York: The Free Press.
- Indriyanto, “Gagasan Teori dan Metodologi Sejarah Masih Mencari Sosoknya” *makalh* tugas MK Kapita Selekt, 1992/1993.
- Kartodirdjo, Sartono, “Metodologi Max Weber dan Wilhelm Diltthey”, dalam *Lembaran Sejarah* No. 6 Tahun 1970. Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Budaya UGM.
- Kartodirdjo, Sartono, 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono, 1984. *Pembrontakan Petani Banten Tahun 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kartodirdjo, Sartono, 1988. *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: P.AU. Universitas Gajahmada.
- Kartodirdjo, Sartono, 1990. *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*. Yogyakarta: Universitas Gajahmada Press.
- Kartodirdjo, Sartono, 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*. Jilid II. Jakarta: Gramedia.

- Ankersmit, F.R., 1987. *Refleksi Tentang Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Mayerhoff, Hans (ed.), 1959. *The Philosophy of History in Our Time an Anthology*. New York: Anchor Books.
- Olsen, Marvin E., 1968. *The Process of Social Organization*. New Delhi: Oxford and IBH Publishing Co.
- Poespoprodjo, 1987. *Subjektivitas dalam Historiografi*. Bandung: Remaja Karya.
- Suryo, Djoko, “Sekitar Masalah Sejarah dengan Ilmu-ilmu Sosial: Sebuah Catatan”, dalam *Bacaan Sejarah* No. 4 Tahun 1980. Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Budaya Universitas Gajahmada.

BAB 3

MODEL-MODEL KASUS

A. KERUSUHAN TIONGHOA DI SURAKARTA TAHUN 1980

YUNI ISTIKHAH

Rasialisme anti Tionghoa dalam catatan sejarah terjadi kembali di Surakarta pada 1912 / 1913 yang merupakan pusat kapital, produksi dan perdagangan batik. selanjutnya terjadi kerusuhan secara masif yang terjadi di Kudus pada tahun 1918 yang merupakan daerah pusat produksi rokok kretek di Jawa Tengah.¹ Pada tahun 1931 juga terjadi kerusuhan di Pekalongan bahkan pasca kemerdekaan juga terjadi peristiwa kerusuhan di Tangerang pada tahun 1946.²

Pada masa Orde Baru banyak warga keturunan Tionghoa dikatakan sebagai pendukung dari aktivitas PKI, sehingga terjadi pengawasan terhadap aktivitas warga keturunan Tionghoa dalam berbagai segi kehidupan. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 pengaturan tentang segala aktivitas keagamaan, kepercayaan dan adat isitiadat Tionghoa.

Secara historis peristiwa Kerusuhan anti Tionghoa di Surakarta kali pertama terjadi pada tahun 1912 di daerah Laweyan yaitu konflik antara SI (Sekerat islam) dengan pedagang Ti onghoa. Pada masa akhir Orde Lama tahun 1965 banyak warga keturunan Tionghoa yang

¹ Peter Carey. *Orang Jawa dan masyarakat Cina*. (Jakarta : Pustaka azet, 1986)

²Takashi Shiraishi. *Hantu Digoel (Politik Pengamanan Zaman Kolonial)*. (Yogyakarta: LKIS, 2001). Hlm: 57

dihubungkan dengan PKI, sehingga terjadi penyerangan rumah – rumah dan toko – toko milik Tionghoa. Peristiwa kerusuhan anti Tionghoa kembali terjadi di Surakarta dan Jawa tengah pada masa pemerintahan Soeharto yaitu tahun 1980 dan Mei 1998.

Di Surakarta telah terbentuk kelompok etnisitas³ yang terjadi sejak masa kolonial, yang berasal dari imigrasi orang – orang Eropa, Arab dan tionghoa. Sehingga di Surakarta terbentuk masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam etnis. Perbedaan etnis itu mengakibatkan terjadinya perbedaan nilai, kepercayaan dan simbol yang dapat dijadikan pemicu konflik serta kerenggangan dalam hubungan interaksi sosial yang ada. Interaksi sosial antar etnik pada masyarakat majemuk bukanlah hal mudah, karena dalam masyarakat terbentuk hubungan yang multikultur, sehingga dalam realitanya sering terjadi konflik antar etnik seperti terjadinya kerusuhan antar pribumi (etnik jawa) dan non pribumi (etnik tionghoa). Piere L van de Berge menjelaskan beberapa karakteristik kelompok masyarakat seringkali memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain, memiliki struktur sosial yang terbagi – bagi dalam lembaga – lembaga yang bersifat non komplementer, kurang mengembangkan konsensus diantaranya para anggotanya terhadap nilai – nilai yang bersifat mendasar, secara relatif seringkali mengalami konflik – konflik diantara kelompok yang lain, secara relatif integrasi sosial tumbuh diatas paksaan

³ Cris Barker (terjemahan Nurhadi). *Cultur Studies Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: Kreasi wacana, 2004). Hlm: 201. Dijelaskan bahwa konsep etnisitas adalah budaya yang berpusat pada kesamaan norma, nilai kepercayaan, simbol dan praktek budaya. Etnisitas sendiri dibentuk oleh cara kita berbicara dengan identitas kelompok dan mengidentifikasi diri dengan tanda dan simbol yang membangun etnisitas.

dan saling ketergantungan dibidang ekonomi dan adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas dara kelompok yang lain.⁴

Konflik antar kelompok seringkali timbul karena adanya perjalanan sejarah konflik, persaingan, kebencian, prasangka ras, baik itu yang bersifat individu maupun kelompok yang dihubungkan dengan alasan sosial, ekonomi, politik maupun ideologi yang melatarbelakanginya.⁵ Untuk memahami konflik kerusuhan anti tionghoa di Surakarta kita harus mengetahui hubungan sejarah konflik yang pernah terjadi maupun tindakan penguasa dan hubungan sosial antara *Pri-nonpri* di Surakarta.

Peristiwa anti Tionghoa yang dilakukan oleh penduduk pribumi dalam realitanya melakukan sebuah kerusuhan dengan melakukan berbagai bentuk penyerangan, pelemparan, pembakaran, dan acancaman. Semua tindakan itu termasuk aksi kolektif atau gerakan sosial massa yang ditujukan dengan kekerasan kolektif.⁶

Kekerasan dalam bentuk kerusuhan yang dilakukan oleh pribumi telah dilakukan oleh generasi dahulu sehingga melahirkan opini yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Hal inilah yang mengakibatkan prasangka ras secara turun – temurun yang suatu saat bisa meletus menjadi konflik besar.

⁴ Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm: 41

⁵ Riza Sihbudi dan Moch Nurhasim, *Kerusuhan Sosial di Indonesia*. (Jakarta : Gramedia, 2001). Hlm: 13

⁶ Dalam pengertian luasnya kekerasan kolektif dilakukan oleh segerombolan orang (mob) dan kumpulan orang banyak (crowd) dan dalam pengertian sempitnya dilakukan oleh geng, pendapat ini diungkapkan oleh D. Douglas dan Frances Caput Waksler dalam Thomas Santose. *Teori – teori Kekerasan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia). Hlm: 9

Menurut Robert Guur yang menyatakan bahwa individu yang melakukan sebuah tindakan pemberontakan atau kekerasan sebelumnya dilatarbelakangi oleh situasi seperti timbulnya ketidakadilan, munculnya kemarahan, pada sumber kemarahan tersebut.⁷ Kondisi kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh sistem pembangunan negara yang ada, masa Orde Baru merupakan pemerintahan yang bersifat monolitik, kekuasaan tunggal yang banyak dikuasai oleh militer serta pembangunan ekonomi yang bersifat kapitalis. Masalah yang ada di rakyat menjaid sebuah keresahan serta tuntutan untuk melakukan sebuah perubahan, adanya latarbelakang serta sejarah bersama yang dialami oleh rakyat dapat memicu terjadinya konflik yang ditunjukkan dengan gerakan sosial massa atau aksi kolektif.

Kekerasan kolektif yang terjadi pada kelompok etnik menurut Kleden bukan hanya didasarkan pada perbedaan etnik dan budaya karena perbedaan itu hanya menyebabkan kesulitan komunikasi, tetapi hubungan antar etnik menimbulkan permusuhan dan kekerasan kalau perbedaan antar etnik yang satu dengan yang lain disertai dengan dominasi politik atau ekonomi oleh etnik yang satu terhadap etnik yang lainnya. Dominasi itu akan menimbulkan penguasaan oleh yang kuat dibidang politik atau perbedaan yang terlalu besar antar etnik terhadap penguasaan aset dan penghasilan ekonomi, akan mengakibatkan muncul perlawanan dari pihak yang mengalami depresi atau ketergantungan. Dan akan terjadi konflik apabila terjadi eskalasi

⁷*Ibid.*

antara pihak yang menguasai dan pihak yang merasa dikuasai dapat berkembang menjadi kekerasan.⁸

Kota Surakarta merupakan kota yang multietnik karena dikota ini terdapat berbagai kelompok etnik. Hal ini dapat terlihat berdasarkan data historis bahwa ada kelompok – kelompok etnis dan suku bangsa sudah menempati Surakarta sejak masa kolonial belanda. Pada wilayah Surakarta pada tahun 1905 memiliki penduduk berjumlah 1.593.056 terdiri dari pribumi 1.577.966, eropa 3.335, Timur Asing 11.725, sedangkan tahun 1920 total penduduk 2.049.547 terdiri atas pribumi 2.029.843, Eropa 5.003, Timur Asing 14.701 dan tahun 1930 total penduduk 2.564.848 terdiri atas pribumi 2.535.594, Eropa 6.554, Timur Asing 22.669.⁹ adanya perbedaan kelompok etnis berpengaruh pada lahirnya stratifikasi sosial dimana golongan paling atas adalah penduduk Eropa, golongan kedua adalah Timur Asing, sedangkan pribumi menempati posisi paling bawah.

Setelah masa kemerdekaan sensus penduduk berdasarkan ras atas suku bangsa tidak ada. Yang ada hanya pembagian penduduk didasarkan pada kewarganegaraannya. Pada tahun 1950 penduduk Tionghoa di kota besar (Kobes) Surakarta berjumlah 23.697 jiwa, Tahun 1952 berjumlah 25.836, tahun 1969 sebesar 30.669 (termasuk 9.862 diantaranya berstatus WNA) dan pada tahun 1971 sebesar 30.948 jiwa (termasuk 9.862 diantaranya berstatus WNA).¹⁰

⁸ Achmad Habib, *Konflik Antar Etnik Di Pedesaan Pasang Surut Hubungan Cina – Jawa*, (Yogyakarta: LKIS, 2004). Hlm: 25

⁹ *Ibid.*, hlm: 96

¹⁰ *Ibid.*, hlm: 97

Pembahasan terhadap aspek kuantitatif terhadap etnis Tionghoa kebanyakan di dasarkan pada informasi dari sensus tahun 1930. Dari hasil sensus orang awam dan politikus memperkirakan dan memproyeksi jumlah prosentase penduduk etnis Tionghoa. Sebagai contoh Skinner (1963) memperkirakan bahwa pada tahun 1961 terdapat penduduk Tionghoa antara 2,3 juta dan 2,4 juta penduduk etnis Indonesia. Surya dinata pada tahun 1978 memperkirakan etnis Tionghoa sebanyak 2,8 % dari jumlah penduduk Indonesia, pada awal tahun 1970 – an yaitu 3,6 juta jiwa. Adam malik 1973 5,0 juta jiwa. Adapula 4,00% - 5,00 % tahun berapa saja, berbagai angka semacam ini tidak satupun didasarkan pada hasil survei atau sensus disebabkan pasca kemerdekaan tidak ada sensus berdasarkan etnisitas.¹¹

Sampai tahun 1980 tidak ada yang tahu persis pastinya jumlah penduduk Tionghoa di Indonesia. Data statistik yang akurat sulit ditemukan karena setiap kali sensus penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru secara khusus dilakukan penghilangan atau manipulasi identitas suku bangsa tertentu yang dianggap berlawanan dengan kepentingan negara.¹²

Jumlah penduduk keturunan Tionghoa pada tahun 1980 diperkirakan sekitar tiga persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia yang pada waktu itu berjumlah 147,5 juta jiwa.¹³ Sumber lagi menyebutkan bahwa orang tionghoa di Indonesia jumlahnya hanya

¹¹ Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin, Aris Ananta. *Penduduk Indonesia, Etnisitas, dan Agama Dalam Era Perubahan Politik*. (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2003). Hlm : 77

¹² Iwan Awwluddin Yusuf. *Media Kematian dan Identitas Budaya mayoritas (Representasi Etnik Tionghoa dalam Iklan Dukacita)*. (Yogyakarta: UII Press, 2005). Hlm: 105

¹³ Nurhadiantomo. *Op.cit.*, hlm: 192

sekitar dua persen dari penduduk Indonesia sekitar tiga juta yang merupakan keturunan Tionghoa yang sudah lama hidup di Indonesia selama ratusan tahun.¹⁴ Pemusatan golongan orang Tionghoa terbesar di Indonesia pada masa itu terdapat di wilayah Jawa tengah sekitar 180 ribu dari jumlah penduduk kota di Jawa tengah sekitar 900 ribu. Sedangkan jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 1980 berjumlah 450.00 jiwa dan hanya sekitar 10% dari warga kota Surakarta adalah *nonpri* atau keturunan Tionghoa. Orang Tionghoa di Surakarta memusatkan tempat tinggalnya di kampung Balong, kelurahan Sudiprajan, Jebres dan sekitar 6.00 jiwa dari 90% merupakan penduduk keturunan Tionghoa. Daerah – daerah lain yang banyak ditempati oleh orang Tionghoa dan menjadi kampung pecinan adalah Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Slamet Riyadi.¹⁵

Secara umum stratifikasi sosial masyarakat Surakarta pada masa Orde Baru dibagi menjadi tiga. Pada strata paling atas diduduki oleh birokrasi sipil dan militer serta keraton. Pada strata tengah diduduki oleh pengusaha – pengusaha dan pedagang besar yang mayoritas adalah orang – orang keturunan Tionghoa dan Arab, serta sebagian kecil sekali golongan orang – orang pribumi yang duduk pada strata kedua ini. Sedangkan pada strata paling bawah mayoritas diduduki oleh para buruh, tukang becak, pegawai rendahan yang mayoritas masyarakat miskin.

Kota Surakarta merupakan pusat kebudayaan Jawa sekaligus tempat muara bertemunya etnik baik itu Tionghoa, Arab dan etnik yang

¹⁴ *Tempo*, TH X, 27 Desember 1980. Hlm: 15

¹⁵ *Tempo*, TH X, 13 Desember 1980. Hlm: 58

menjadi penduduk pendatang. Kadang para penduduk *nonpri* tidak bisa lepas dari Surakarta yang merupakan satu kota dengan penghasil batik di Indonesia. Sejak masa Kolonial sampai Orde Baru terjadinya persaingan dagang antara pedagang *pri* dan *nonpri* yang pada akhirnya melahirkan kecemburuan sosial dan prasangka ras.

Sistem politik Indonesia yang diterapkan pada masa Orde Baru merupakan satu sistem pemerintahan yang sentralistik, dimana kekuasaan negara yang ada didominasi oleh presiden. Kekuasaan dipegang oleh para politikus, birokrasi sipil dan militer dan beberapa kelas konglomerat. Dalam pelaksanaannya pembangunan di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru menjadi tumpuan utama adalah ekonomi dengan menggunakan sistem akumulasi modal. Berbagai bentuk kebijakan – kebijakan pemerintah hanya menguntungkan minoritas golongan tertentu saja baik itu politikus, birokrasi sipil, militer maupun pengusaha asing dan *nonpri*.

Politik pribuminisme dilegalkan oleh pemerintah dengan dikelurkannya undang – undang bidang kependudukan dan kewarganegaraan seperti Surat Menteri Kehakiman kepada Pengadilan Negeri seluruh Indonesia No. DTA/60/24/1968, Inpres RI. No 2/1980 dan SK bersama Menteri Kehakiman dan Menteri dalam negeri No.01-UM.09.80 No. 42 tahun 1980. Semua peraturan ini tentang pelaksanaan undang –undang kewarganegaraan dan Surat Bukti kewarganegaraan. Tujuan negara untuk melakukan penyeleksian tentang kewarganegaraan memang harus diatur, akan tetapi sebuah undang – undang itu harus jelas dan tidak mengandung cacat hukum.

Pribuminisme akan melahirkan sentimen dan primordialisme, ketika faktor migrasi dan para migran mulai menyisihkan orang pribumi dari berbagai sektor kehidupan. Yang pada akhirnya menimbulkan problem kesenjangan ekonomi terpenting negara, dengan sumber – sumber terpenting yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tetapi dalam pelaksanaan pembangunan aset penting itu dikuasai dan dikelola oleh para politisi, teknokrat, birokrasi sipil maupun militer yang bekerja sama dengan pihak swasta sebagai distributor dan perdagangan perantara yang banyak dikuasai oleh orang Tionghoa. Kebijakan ekonomi Orde Baru sangat erat sekali dengan kebijakan politik pada masa itu yang memberikan hak istimewa pada orang – orang Tionghoa untuk menjalankan sektor swasta dan perdagangan.

Pandangan tentang identitas akan membawa pada kondisi masyarakat pada kesadaran untuk mengklasifikasikan masyarakat pada golongan hanya berdasarkan pada batasan fisik, warna kulit, ras, etnis, dan bahasa agama. Hal itu akan membawa pada terbentuknya perilaku dan cara pandang sosial yang berbeda dalam segala aktivitas politik toleransi atau saling menghormati perbedaan akan mampu menekankan terjadinya suatu konflik.

Pluralisme dan multikultur merupakan konsep politik perbedaan disebabkan adanya sebuah pengakuan atas legitimasi perbedaan yang berlawanan dengan kekuasaan dan membawa pengaruh terhadap budaya didalamnya juga terlibat perbedaan politik, sosial, ekonomi, agama dimana masyarakat harus menerima

eksistensi perbedaan, sehingga politik identitas ini tumbuh di Indonesia.¹⁶

Negara Indonesia adalah negara dengan paham kesatuan dan persatuan sehingga politik identitas di Indonesia any menjadi wacana pembangunan negara. Segala bentuk perbedaan kelompok serta etnisitas selalu di prasangka sebagai gerakan oposan dan perlawanan terhadap kebijakan atau kepentingan politik pemerintah pusat. Adanyan penekanan dalam segala bidang kehidupan, negara harusnya mampu membangun kebersamaan bukannya penyeragaman karena di negara Indonesia merupakan masyarakat majemuk.

Politik asimilasi atau startegi pembauran Tionghoa oleh Soeharto sebagai orang pertama di Indonesia pada masa Orde Baru dimulai tahun 1967. Dalam politik asimilasi pemerintah Indonesia menghapus tiga pilar kebudayaan Tionghoa yaitu organisasi tionghoa, media massa Tionghoa, dan pendidikan Tionghoa.¹⁷ Politik asimilasi pada masa itu memiliki keberhasilan yang semu karena pada masa tertentu pemerintah mampu mengintegrasikan masyarakat Tionghoa untuk lebih membaur dari pada masa – masa sebelumnya.

Peristiwa pertengakaran antar pelajar misalnya yang terjadi pada tanggal 19 November itu mengakibatkan rasa tidak puas, sehingga sejumlah besar pelajar SLTA di Surakarta melakukan pengrusakan dengan pelemparan batu terhadap beberapa rumah dan toko – toko di Sepanjang Jl. Urip Sumoharjo. Aksi itu berhasil diatasi oleh pihak berwajib dan tidak ada korban hanya beberapa cendela

¹⁶ *Ibid.*, 148 - 149

¹⁷ Leo Suryadinata. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900 - 2002*. (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2003). Hlm : 363

pecah dan mengalami kerusakan.¹⁸ Dan Resta (Komandan Resort sekarang setingkat dengan Kapolres) 951 Surakarta Letkol Mashadi di tempat kejadian memimpin pengamanan. Pipis Supriyadi dibawa Letda Soetjipto Kasi 1 Kodim 0735 Surakarta untuk dimintai keterangan dan dibebaskan kembali. Diminta datang juga kepala sekolah dan ibu Pipis Supriyadi untuk membuat surat pernyataan.¹⁹ Dari pihak berwajib yang hadir dalam mengamankan kejadian kerusuhan Dan Rem (sekarang setara dengan Kapolwil) 074 Koloner Sudarmadi. Walikotamadya Surakarta Soekamto Prawiro Hadisebritto SH dan beberapa pejabat lainnya.

Walikota menghimbau kepada masyarakat Surakarta khususnya para pelajara agar tetap bersikap tenang, bekerja dan belajar seperti biasa jangan terpancing emosi hasutan yang tidak bertanggung jawab”.²⁰

Pukul 17.00 orang bergerombol dan menyebabkan terganggunya lalu lintas tetapi sekitar 19.00 massa meninggalkan tempat. Kamis malam tidak terjadi pengrusakan ulang, massa banyak yang berkumpul dan berhasil dibubarkan setelah mobil pemadam kebakaran menyemprotkan air. Akibat peristiwa kerusuhan 20 November 1980 itu banyak toko – toko yang ditutup seperti toko di Jl. Urip Sumohadjo, sepanjang Jl. Coyudan yang merupakan kompleks pertokoan emas, toko sekitar pasar besar dan pasar Klewer karena takut menjadi sasaran amukan massa. Hari jum’at suasana agak tenang

¹⁸*Suara Merdeka*, TX XXXI, 21 November 1980. Hlm : 8

¹⁹*Kedaulatan Rakyat*. TX XXXIV, 21 November 1980. Hlm : 1

²⁰*Suara Merdeka*, TX XXXI, 21 November 1980. Hlm : 8

segerombolan pemuda dari luar kota yang datang dengan beberapa truk dapat dicegah oleh pihak berwajib.²¹

Berita peristiwa itu menyebar sampai pada mahasiswa Universitas Sebelas Maret. Salah satu mahasiswa yang mendapat informasi yaitu Hari Mulyadi aktivis IIMI dari program studi bimbingan penyuluhan. Ia kemudian mengajak temannya Endu Marsono, Kelik dan Bambang Tri untuk menemui Pipit Supriyadi di rumahnya. Mahasiswa UNS itu menawarkan kepada Pipit untuk mengorganisasi ketua OSIS di Kota Surakarta untuk melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk ketidakpuasan.

Kemuculan dan penyebaran pandangan atau ide dengan cara menyebarkan informasi yang dipercayai oleh masyarakat. Dengan penyebaran suatu sumber ancaman, cara penyelesaian dan pencapaian tujuan akan menyamakan pandangan bersama sehingga memperkuat perasaan kebersamaan sehingga dapat memperkuat terjadinya gerakan social tidak penyebaran ide atau pandangan dilakukan para mahasiswa dengan cara mengumpulkan semua para wakil OSIS di Surakarta tanggal 21 November di jembatan Jurug dan dalam pertemuan itu Pipit diisukan meninggal.

Tindakan mobilisasi masa sangat ditentukan oleh peran pemimpin sejauh mana ide itu mampu menggerakkan massa, peran mahasiswa terutama ide muncul dari hari mulyadi untuk menggerakkan massa sebagai bentuk adanya kondisi kekhawatiran dan perasaan adanya ketidakadilan serta merasa adanya ancaman akan kehilangan hak – hak istimewanya sebagai bangsa pribumi mempercepat

²¹ *Tempo*, TX XI, 6 Desember 1980. Hlm : 12

sekelompok pelajar dan pemuda untuk melakukan aksi kolektif. Pelajar dijadikan pelaku utamanya karena dengan pertimbangan kalau para pelajar yang bergerak maka hanya dianggap sebagai kenakalan remaja. Dalam pertemuan itu Hari Mulyadi tidak hadir tetapi diwakilkan kepada Endu Marsono dalam hal mengatur strategi demonstrasi, selain anak SLTA, mahasiswa juga dihadiri GALI (Gabungan Anak Liar) yang bernama Begi=ong sebagai raja dunia hitam. Dalam pertemuan tersebut merumuskan beberapa kesepakatan diantaranya akan diadakan aksi pengrusakan toko – toko milik Tionghoa. Mereka bersama–sama ke toko Cayudan pada tanggal 22 November, membuat pamflet – pamflet untuk menggerakkan massa, tidak boleh menghina alat negara atau petugas keamanan.²²

Gerakan kolektif yang dilakukan para mahasiswa dari pelajar meletus karena didukung oleh beberapa faktor, menurut J. Smelser menjelaskan gerakan massa atau kolektif ditentukan oleh beberapa faktor yang mendukung yaitu: (1) adanya kesesuaian struktural (*strutural conduciveness*) bahwa aksi kolektif atau gerakan massa akan mudah terjadi jika didukung oleh struktur masyarakat atau suatu lingkungan masyarakat tertentu untuk melakukan sebuah gerakan massa (2) adanya ketegangan struktural (*Structural Strain*) seperti kondisi adanya kekhawatiran, perasaan adanya ketidakadilan serta merasa adanya ancaman akan kehilangan hak – hak istimewa akan mempercepat sekelompok orang untuk melakukan aksi kolektif. (3) kemunculan penyebaran pandangan atau ide dengan cara menyebarkan informasi yang dipercayai oleh masyarakat. Dengan penyebaran suatu sumber

²²Wasino. *Loc.Cit.* hal: 8

ancaman, cara penyelesaian dan pencapaian tujuan akan menyamakan pandangan bersama sehingga mempercepat (*precipitating factors*) penyebaran isu – isu yang bisa membangkitkan kesadaran kolektif. (5) mobilisasi tindakan yaitu usaha yang dilakukan dalam memobilisasi massa untuk melakukan tindakan yang telah direncanakan. (6) Pelaksanaan kontrol sosial, bahwa semua faktor yang ada di pengaruhi oleh para pemimpin dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk melakukan sebuah tindakan aksi kolektif.

Aksi tanggal 19 dan 20 November merupakan aksi murni dari para pelajar, tetapi aksi kolektif pada tanggal 21 sudah merupakan hasil provokasi dari mahasiswa. Penyebaran isu menjadi faktor mempercepat (*precipitating factors*) yang bisa membangkitkan kesadaran kolektif pelajar, mahasiswa dan GALI. Adanya mobilisasi tindakan yaitu usaha yang dilakukan dalam memobilisasi massa untuk melaksanakan tindakan yang telah direncanakan. Hal itu dapat dilihat pada kerusuhan meledak 22 November 1980. Ratusan pelajar dengan naik sepeda motor (identitas mereka sulit dikenali sebab memakai baju terbalik) menyerang toko dan bangunan milik keturunan Tionghoa dengan lemparan Batu.²³ Dalam aksi bukan hanya berupa pelemparan batu akan tetapi juga pembakaran rumah, toko dan kendaraan bermotor.

²³Daerah yang menjadi sasaran massa yaitu di kompleks pasar pon, Sepanjang jalan nonongan, Jl. Singosari, Jl. Slamet Riyadi, Jl Yos Sudarso, Jl. Cayudan, Jl. Kraton, Jl. Gading Timur, Jl. Gading Selatan, Jl. Imam Bonjol, kampung Baru, laweyan, Sondakan, Jl.Dr. Rajiman, Gilingan, Nusukan, Kadipari, Jl. Gatot Subroto, Jl. Hanggowongso, dan daerah lainnya. Aksi itu mengakibatkan seorang pelajar STM Tunas Pembangunan meninggal karena peluru satpam di Jl. Singosari, Wasino.*Op.Cit.* hlm:9

Dalam peristiwa pembakaran dan pengrusakan rumah pada tanggal 22 November itu Suparno Pelajar STM Muhammadiyah meninggal akibat kakinya tergilas panser dan meninggal dunia di rumah sakit. Indra Cahyono juga meninggal akibat luka serius. Demonstrasi merebak sore harinya dilakukan pemakaman Pramudya Adji Nusukun, Surakarta. Dalam pidato pemakamannya Kepala Desa mengatakan bahwa dia adalah seorang pahlawan penegak hukum dan keadilan. Solidaritas kelompok berkembang menjadi solidaritas etnis bahwa identitas sebagai pribumi dianggap memiliki kekuasaan penuh terhadap wilayah yang ditempati massa mengamuk dengan melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap toko, rumah dan kendaraan milik Tionghoa. Dalam insiden itu 10 mobil dan satu sepeda motor terbakar.²⁴

Kerusuhan meluas Minggu 23 Novemer 1980 para pencoleng dan penjahat ikut memanaskan dan menunggangi situasi GALI (Gabungan Anak Liar) berhasil mengobarkan dan menunggangi sentimen massa. Dalam demonstrasi itu terjadi aksi menjarah barang – barang milik Tionghoa oleh kelompok Gali yang membaur dengan ribuan mahasiswa dan pelajar. Ternyata yang menjarah dan mencuri bukan GALI tetapi masyarakat umum. Meninggalnya seorang pelajar itu juga ikut memanaskan dan meningkatkan suhu ketegangan. Malam pukul 21.00 masih terjadi kerusuhan di Surakarta terjadinya aksi pembakaran di pasar legi, pembakaran rumah milik keturunan Tionghoa dan pabrik plastik Cemani.

²⁴*Ibid.*

Terjadinya pengrusakan serta pembakaran terhadap harta benda milik Tionghoa yang menjadi simbol kekayaan dan status ekonomi orang Tionghoa menjadi sumber kemarahan. Menurut Robbert Guur yang menyatakan bahwa individu yang melakukan sebuah tindakan pemberontakan atau kekerasan sebelumnya dilatarbelkangi oleh situasi seperti terjadinya ketidakadilan, munculnya kemarahan pada sumber kemarahan tersebut.

Peristiwa kerusuhan anti tionghoa di Surakarta semakin besar diakibatkan adanya *Blackout*²⁵ yang pada akhirnya menyebarkan *desas - desus*²⁶ atau penyebaran isu tentang peristiwa Surakarta semakin di besar – besarkan. Media massa sebagai alat penyebar informasi publik pada masa itu tidak berperan dengan baik, karena adanya tekanan kebebasan pers pada masa itu. Penyebaran berita melalui mulut – ke mulut serta berita radio asing sangat berpengaruh terhadap pembentukan opini, sehingga secara tidak langsung ikut memanaskan situasi. Masyarakat lebih percaya pada berita dari radio asing (luar negeri) seperti yang pernyataan Said Budairy wakil pimpinan redaksi Pelita bahwa pemberitaan oleh radio Australia beberapa hari setelah kejadian diniali telah merugikan kepentingan umat islam, dalam pemberitaannya seolah adanya sentimen umat Islam terhadap modal milik tionghoa. Perembesan

²⁵ Blackout merupakan lokalisasi peristiwa kerusuhan yang dilakukan oleh pihak militer untuk menuntaskan penyelesaian peristiwa kerusuhan agar tidak berkembang menjadi kerusuhan yang lebih besar.

²⁶ Desas – desus adalah berita yang disebarkan secara cepat dan tidak berlandaskan fakta. Masyarakat cenderung mempercayai dan akan menyebarkan desas – desus, jika itu membenarkan ketidaksenangannya atau meredakan ketengangan emosinya. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. *Op.Cit.* hlm: 184 - 185

isu (*penetration*) melalui siaran radio luar negeri, para pelancong, dan komunikasi lewat telepon sulit dibendung.²⁷

Dalam memberikan keterangan resmi didepan komisi I DPR Mawardi Fraksi Persatuan Pembangunan mengatakan bahwa blackout menyebabkan berita berkembang dari mulut ke mulut. Tetapi Sudono memberikan jawaban atas pertanyaan Komisi I DPR bahwa Blackout bertujuan untuk :

“ agar Pers tidak turut serta memanaskan dan memperluas peristiwa tersebut, dia juga mengakui hal itu justru menyebabkan desas – desus berkembang pesat. Black out bukan untuk menutup – nutupi sesuatu tepi untuk melakukan lokalisasi peristiwa dan penyelesaian secara tuntas.”²⁸

Dalam pernyataannya Sudomo sendiri mengandung kontroversibahwa tujuan Blackout itu sebenarnya adalah untuk meminimalisir konflik.tapi dia juga menegaskan hal itu melahirkan isu – isu, sehingga seakan – akan pemerintah sendirilah yang telah membuat sebuah skenario berita dan isu – isu panas di masyarakat. Karena media publik tidak memilliki hak untuk memberitakan peristiwa kerusuhan dengan benar hanya secara umum. Hal itu menimbulkan masyarakat tidak percaya dengan berita media massa maupun elektronik Indonesia.

Setelah terjadinya peristiwa kerusuhan Anti Tionghoa di Surakarta November 1980 itu sejumlah pernyataan bersama dikeluarkan dari kelompok – kelompok masyarakat antara lain:

²⁷ *Tempo*, Th X, 13 Desember 1980. Hlm: 43

²⁸ *Tempo*, Th X, 13 Desember 1980. Hlm: 43

1. Walikotamadya Surakarta Prawirohadi Sebrotto SH. Menghimbau masyarakat dan pelajar agar tidak terpancing emosi dan hasutan.
2. Pernyataan dari pemuda – pemuda sospol, para alim ulama serta kalangan muda yang tergabung dalam KNPI dan AMPI yang telah memberikan dukungan secara moril.
3. Seruan Pangdam VII/ Diponegoro agar masyarakat tetap tenang menahan diri.
4. Penyatuan Kekuatan Sospol yang terdiri dari DPD GOLKAR tingkat II Semarang, DPC PDI Kodya Semarang, DPC PPP Kodya Semarang, komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kodya Semarang, angkatan 66 Semarang, angkatan 45 Kodya Semarang. Pada tanggal 25 November mengeluarkan seruan bersama tentang agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh hasutan yang mengganggu ketertiban umum dan masyarakat hendaknya tetap mempercayakan sepenuhnya persoalan – persoalan yang terjadi kepada pemerintah bersama aparaturnya.²⁹

Segala bentuk aktivitas politik Mahasiswa berhasil ditekan, pernyataan KNPI dan AMPI tidak mewakili seluruh pemuda yang ada di Indonesia atau di Surakarta dan Jawa Tengah, tetapi mewakili minoritas pemuda yang merupakan organisasi bentukan GOLKAR. Sehingga Mahasiswa yang tidak bergabung dalam Organisasi KNPI dan AMPI seperti HMI dianggap sebagai lawan politik dan sangat membahayakan bagi kehidupan pemerintahan. Dengan dikeluarkannya

²⁹ *Suara Merdeka*, Th XXXI, 26 November 1980. Hlm: 11

kebijakan tentang konsep Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) pada tahun 1978 merupakan bentuk penekanan pemerintah. Dengan cara melarang semua kegiatan politik mahasiswa di Indonesia dan seluruh mahasiswa hanya diperbolehkan melakukan kegiatan belajar mengajar.³⁰

Kebijakan di atas memberikan dampak bagi kepercayaan mahasiswa terhadap seluruh kebijakan pemerintah. Mahasiswa yang tergabung dalam KNPI dan AMPI dianggap sebagai mahasiswa yang mengambil keuntungan materiil dan individu memikirkan nasib rakyat. Mahasiswa tidak memiliki hak untuk melakukan evaluasi dan masukan terhadap tindakan pemerintah. Segala bentuk kegiatan dan protes mahasiswa selalu diatasi dengan pendekatan hukuman militer. Melihat bahwa kasus kerusuhan pelajar di Surakarta tanggal 19 – 21 November 1980 merupakan peristiwa yang tepat untuk menunjukkan protes terhadap pemerintah. Karena jika bentuk kritis mahasiswa dilakukan perorangan atau kelompok maka akan membahayakan nyawa dan keberlangsungan organisasi mahasiswa yang ada.

Tidak berfungsinya peran lembaga maupun organisasi sosial politik maupun keagamaan mengakibatkan tertutupnya saluran komunikasi politik dan perbedaan pendapat yang semakin tajam dengan pemerintah. Sehingga mengkomunikasikan perbedaan pendapat itu ditujukan dalam bentuk kekuatan dan kekerasan dianggap lebih efektif.

³⁰ Beny G Setiono. *Loc.Cit.* hlm: 996 - 997

Kerusuhan anti Tionghoa di Surakarta pada tanggal 19 sampai 25 November 1980 mengakibatkan banyak jatuh korban dan kerugian, baik itu berupa materi dan luka hati serta retaknya hubungan antara pri dan non pri. Kerusakan yang berlangsung selama satu minggu akhirnya berakhir dan dapat diatasi oleh aparat keamanan dan pemerintah. Walaupun aparat keamanan berjaga – jaga tetapi massa tetap melakukan aksi kerusuhan.

Pada akhir kerusuhan ada sekitar 150 pelajar yang ditahan oleh polisi dan telah dilepaskan kembali.³¹ Tetapi dalam sebuah sumber lain dikatakan mereka yang ditahan dan disidik di Detasmen Intelejen Kodam IV Diponegoro sebanyak 201 Orang.³² Kerusuhan itu membawa korban antara lain korban materi dan harta benda, korban jiwa dan luka – luka, keamanan dan stabilitas nasional terganggu. Antara korban materi dan korban Harta Benda.

Pada peristiwa pertama kali tanggal 20 November hari Kamis karena luapan emosi sejumlah toko di Jalan Urip Sumoharjo Surakarta di rusak. Akibatnya menderita kerusakan ringan dan kaca – kaca banyak yang pecah dan mobil juga menjadi sasaran pelemparan batu.³³ Berlanjut pada peristiwa Jumat tanggal 21 November 1980 kerusakan menjalar ke Pasar Gede, Widuran, Coyudan, Singosaren, Pasar Legi dan beberapa tempat lain seperti Gading, Jebres, jalan Honggowongso.³⁴

³¹ *Tempo*, Th X, 13 Desember 1980. Hlm: 12

³² Wasino. *Op.Cit.* hal: 10

³³ Sejumlah toko di jalan Urip Sumoharjo Solo di rusak, akibatnya Toko No 97, 99, 107, 119, 131, 163, 167 menderita kerusakan ringan dan kaca – kaca banyak yang pecah dan mobil juga menjadi sasaran pelemparan batu. *Suara Merdeka*. Th. XXXI. 21 November 1980, hlm: 8

³⁴ *Suara Merdeka*. Th. XXXI. 22 November 1980, hlm: 8

Sedangkan pada aksi setelah pemakaman tanggal 23 November massa melakukan pergeseran dan pembakaran terhadap toko, rumah dan kendaraan milik Tionghoa. Dalam Insiden itu 10 mobil dan satu buah sepeda motor terbakar.

Diawali di Surakarta dalam waktu satu minggu telah banyak membakar kota lain, seperti Semarang, Kudus, Purwodadi dan Pati bahkan nyaris merembet ke Jawa Timur walaupun hanya sampai di wilayah Ngawi, Madiun, dan Jombang. Semarang menderita paling parah akibat kerusuhan itu 15 pabrik besar dan kecil di kota ini rusak dan terbakar. Kerugian terbesar diderita PT Arta Elektronik yang bernilai sekitar 1,2 milyar dan PT standart Battery sekitar Rp. 600 Juta. Terbakarnya banyak pabrik, toko – toko dan ratusan kendaraan bermotor, terutama bis dan truk, jelas mempengaruhi roda perekonomian, tidak semua perusahaan yang rusak bisa segera dibangun sehingga banyak buruh yang menganggur.³⁵

Sasaran massa yang utama adalah materi atau harta benda milik keturunan Tionghoa. Karena materi atau harta benda merupakan bukti atau simbol yang menunjukkan status ekonomi dan sosial masyarakat Tionghoa. Bentuk kemarahan diluapkan dengan tindakan kekerasan pada harta benda milik Tionghoa dianggap sebagai sumber kemarahan. Karena aset ekonomi, perdagangan, dan pabrik – pabrik hanya dimiliki oleh golongan Tionghoa.

Aksi pada tanggal 22 dan 23 November itu mengakibatkan seorang pelajar STM Tunas Pembangunan meninggal karena peluru satpam di Jl. Singosari sedangkan dalam peristiwa pembakaran dan

³⁵ *Tempo*. Th. X. 13 Desember 1980, hlm: 12

pengrusakan itu Suparno Pelajar STM Muhammadiyah meninggal akibat kakinya tergilass panser. Indra Cahyono juga meninggal akibat luka serius. Pramudya Adji Nusukun juga meninggal.

Karena adanya *blackout* dari pemerintah dan media massa tidak diperbolehkan memberitakan peristiwa, sehingga korban baik itu berupa materi, harta benda maupun nyawa tidak seluruhnya diberitakan kepada masyarakat umum. Pemerintah tidak menginginkan peristiwa Semarang dan Surakarta menjadi masalah Nasional. Itulah sebabnya ketika Pikiran Rakyat tanggal 24 Novemer 1980 memberitakan peristiwa kerusuhan anti Tionghoa dan menulis pernyataan Pangdam VII Diponegoro Mayjen Soekotjo mendapat teguran dari pemerintah karena dianggap akan dapat memanasakan situasi di masyarakat. Suara Karya juga mendapat peringatan karena tajuknya (29 November 1980) yang mengupas pergolakan di Surakarta. Media masa lain seperti Suara Merdeka (26 November 1980) juga mendapat teguran karena memberikan kerusuhan anti Tionghoa di Surakarta. Laksamana Sudomo memberikan himbauan kepada seluruh pimpinan redaksi agar tidak memberitakan peristiwa Surakarta.³⁶

Kerusuhan Surakarta tanggal 19 sampai 25 November 1980 mengakibatkan terjadinya ketegangan sosial dan diberlakukan jam malam dari pukul 20.00 sampai pukul 05.00 untuk daerah Jawa Tengah. Semua sekolah serta Perguruan Tinggi di liburkan mulai tanggal 25 – 29 November 1980. Beberapa tempelan tulisan milik pribumi terlibat di beberapa tempat. Semarang merupakan daerah yang paling parah

³⁶ *Tempo*, Th X, 13 Desember 1980. Hlm: 12

kerusakannya akibat kerusuhan dan Pemda melarang adanya corat – coret serta larangan tempelan tulisan pribumi dan nonpri.

Ketika kerusuhan telah menjalar ke beberapa kota, Sudomo Pangkoptantib memberikan jaminan peristiwa pengrusakan di Surakarta, Semarang dan beberapa kota lainnya telah dapat diatasi dan keadaan pulih. Para Pemerintahan yang otoriter dan bersifat sentralistik pada masa itu mampu menekan peristiwa kerusuhan sampai tingkat bawah.

Tindakan pemerintahan yang otoriter membuat ketidak puasan rakyat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berbagai bentuk tuntutan terhadap pemerintah sering kali dianggap sebagai perlawanan. Kasus kerusuhan di Surakarta sebenarnya merupakan kasus lokal. Tetapi dalam mengatasi kerusuhan itu yang menanggapi adalah Kodam IV Diponegoro militer AD yang berkedudukan di tingkat propinsi dan Panglima Pangkoptantib Sudomo yang berada di tingkat nasional yang melaporkan secara langsung kepada Presiden.

RUJUKAN

- Peter Carey. *Orang Jawa dan masyarakat Cina*. (Jakarta : Pustaka azet, 1986)
- Takashi Shiraishi. *Hantu Digoel (Politik Pengamanan Zaman Kolonial)*. (Yogyakarta: LKIS, 2001). Hlm: 57
- Cris Barker (terjemahan Nurhadi). *Cultur Studies Teori dan Praktek*.(Yogyakarta: Kreasi wacana, 2004). Hlm: 201
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm: 41
- Riza Sihbudi dan Moch Nurhasim, *Kerusuhan Sosial di indonesia*. (Jakarta : Gramedia, 2001). Hlm: 13
- D. Douglas dan frances Caput Waksler dalam Thomas Santose. *Teori – teori Kekerasan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia). Hlm: 9
- Achmad Habib, *Konflik Antar Etnik Di Pedesaan Pasang Surut Hubungan Cina – Jawa*,(Yogyakarta: LKIS, 2004). Hlm: 25
- Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin, Aris Ananta. *Penduduk Indonesia, Etnisitas, dan Agama Dalam Era Perubahan Politik*. (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2003). Hlm : 77
- Iwan Awwluddin Yusuf. *Media Kematian dan Identitas Budaya mayoritas (Representasi Etnik Tionghoa dalam Iklan Dukacita)*. (Yogyakarta: UII Press, 2005). Hlm: 105
- Leo Suryadinata. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900 - 2002*. (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2003). Hlm : 363

B. KRIMINALITAS MASA KOLONIAL DI BATAVIA TAHUN 1870 – 1930

NUR A'INI

Dalam perjalanan sejarah Batavia ada hal yang sangat menarik untuk dikaji yaitu masalah kriminalitas yang terjadi pada masa kolonial. Kriminalitas yang terjadi pada masa sekarang ini merupakan ulangan kejadian pada masa sebelumnya dalam kurun waktu yang berbeda dengan pola yang serupa. Sehubungan dengan itu perlu dirunut kembali ke masa lampau yang memungkinkan Jakarta mengalami kondisi yang kurang menguntungkan di masa sekarang ini dalam masalah kriminalitas.

Beberapa peristiwa kriminalitas dan pergolakan sosial yang muncul pada masa kolonial di Hindia Belanda memperlihatkan bahwa kolonialisasi di Hindia Belanda bukan hanya merupakan bentuk penjajahan saja, tetapi mengandung pula permasalahan – permasalahan sosial di dalamnya. Masa kolonial tidak saja menimbulkan konflik politik hubungan antara penjajah dan yang terjajah, tetapi juga konflik sosial seperti, pemberontakan dan kegelisahan sosial di dalam masyarakat, seperti: adanya pembunuhan, pencurian, perampokan, pembakaran rumah, dan pengerusakan perkebunan. Banyak masalah yang terjadi di Batavia selama masa kolonial tetapi Batavia tetaplah merupakan kota yang normal dengan berbagai komunitas didalamnya.

Kriminalitas pada dasarnya adalah perbuatan yang menyimpang dari ketentuan umum. Kriminalitas merupakan fenomena yang menarik selama berlangsungnya kolonialisme. Bentuk – bentuk kriminalitas seringkali dilakukan oleh para jagoan atau bandit – bandit yang menguasai suatu wilayah tertentu. Para korban yang menjadi sasaran

kekasaran dan kejahatan adalah orang – orang yang dianggap dekat dengan Belanda atau memperoleh keuntungan dari perkebunan seperti orang – orang Cina dan orang – orang yang memiliki kekayaan. Sementara, daerah pedesaan Jawa didominasi oleh para jago lokal, wilayah Batavia-*Buitenzorg* sebagian besar di kontrol oleh apa yang sekarang ini dinamakan preman (dari *vrijman* dalam bahasa Belanda yang berarti Orang bebas atau mandiri).³⁷

Dibandingkan dengan desa – desa di Jawa, orang – orang kuat lokal atau jagoan di sekitar Batavia, merupakan ancaman langsung bagi masyarakat Eropa dan itu merupakan sebab mengapa keberadaan mereka tidak dapat dibiarkan begitu saja. Aktivitas mereka juga merupakan hal yang memalukan pejabat pemerintah kolonial yang tengah mengemabngkan ambisinya.³⁸

Kriminalitas yang terjadi pada masa kolonial kurun waktu 1870 – 1930 memiliki tingkat yang tinggi, hal ini dikarenakan situasi masyarakat dan pemerintah yang mengalami suatu pergeseran dari sistem kolonial *cultuurstelsel* menuju liberalisme ekonomi pada tahun 1919 – 1930 juga terjadi melaise, yang tentunya berpengaruh terhadap kehidupan sosial di Batavia. Bagi masyarakat agraris masa ini barangkali merupakan suatu masa penderitaan yang semakin berat. Jumlah penduduk terus bertambah, sehingga semakin memperbesar tekanan terhadap sumber – sumber bahan pangan, tanah yang terbaik sudah digunakan sehingga tanaman padi hanya dapat di perluas ke kawasan – kawasan yang kurang subur. Terdapat bukti bahwa

³⁷ Henk Schulte Nordholt. 2002. *Kriminalitas, Modernitas dan Identitas dalam Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar ., hlm: 53

³⁸ *Ibid.*, hlm:63

konsumsi beras perkapita didalam negeri dan kebutuhan atas tekstil import, dua petunjuk utama tentang kesejahteraan rakyat, agaknya meningkat sekitar tahun 1870 – 1875, tetapi tampaknya setelah itu merosot dengan cepat. Penanaman padi meluas, tetapi kalah cepat dengan pertumbuhan jumlah penduduk.³⁹ Akibat dari ekonomi liberal ini, penduduk Jawa makin didorong ke dalam ekonomi uang, karena hilangnya mata pencaharian tradisional memaksa penduduk Jawa mencari pekerjaan pada perkebunan – perkebunan milik Belanda dan orang – orang Eropa lainnya.⁴⁰ Adanya fenomena tersebut memunculkan masalah – masalah perkotaan, sebagai contoh adalah urbanisasi yang mengakibatkan bertambahnya pengangguran dan tindak kriminalitas di Batavia.

Aksi – aksi kriminalitas pada tahun 1870 – 1930 terjadi pada saat Indonesia di bawah kekuasaan penjajahan dan pada saat pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaannya. Kekerasan lokal tidak hanya dominan di daerah pedesaan, melainkan juga di pusat pemerintahan kolonial yaitu Batavia. Aksi – aksi kriminal pada masa kolonial itu terus berlanjut hingga masa kemerdekaan.

Sebagaimana yang dikutip oleh Julianto Ibrahim dari Boger dan Hobsbawm bahwa kriminalitas atau tindak kejahatan merupakan perbuatan anti sosial dan anti kesusilaan yang secara sadar mendapat reaksi dari negara maupun dari masyarakat berupa pemberian derita. Perbuatan anti sosial yang terjadi pada masa kolonial seperti fenomena bandit, jagoan tidak bisa dipisahkan dengan kondisi sosial ekonomi

³⁹ M. C. Rickleft. 1993. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press., hlm: 190

⁴⁰ Marwati Djoenad P. Dan Nugroho Noto susanto. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka., hlm: 119

masyarakat. Hobsbawn mengemukakan bahwa, kriminalitas atau banditisme yang didasarkan pada ketidakpuasan terhadap “penguasa” yang pernah menindasnya merupakan bagian dari protes sosial. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk – bentuk kriminalitas pada masa kolonial mempunyai dimensi sosial dan politik, sehingga tanpa mengabaikan kriminalitas murni atau asli kriminalitas yang muncul bersifat bentukan.⁴¹

Para ahli sosiologi berpendapat bahwa kejahatan disebabkan karena kondisi – kondisi dan protes – protes sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku – perilaku sosial lainnya. Analisis terhadap kondisi yang proses – proses sosial tersebut menghasilkan dua kesimpulan, yaitu pertama terdapat hubungan antar variasi angka kejahatan dengan variasi organisasi sosial di mana kejahatan tersebut terjadi. Maka angka – angka kejahatan dalam masyarakat, golongan – golongan masyarakat dan kelompok – kelompok sosial mempunyai hubungan dengan kondisi – kondisi dan proses – proses. Misalnya, gerakan sosial, persaingan serta pertentangan kebudayaan, ideologi politik, agama, ekonomi, dan lain – lain. Kedua, para sosiolog berusaha untuk menentukan proses – proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat. Analisis ini bersifat sosial psikologis. Beberapa orang ahli menekankan pada beberapa bentuk proses seperti imitasi pelaksanaan peran sosial, asosiasi diferensial, kompensasi, konsep diri pribadi dan kekecewaan yang agresif sebagai proses – proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat.⁴²

⁴¹ Julianto Ibrahim. 2004. *Bandit dan Pejuang di Simping Bengawan Kriminalitas dan Kekerasan Masa revolusi di Surakarta*. Surakarta : Bina Cipta Pustaka., hlm: 13

⁴² Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Grafindo., hlm. 366 - 367

Seperti yang dirujuk oleh Topo S dan Eva Achjani Z dalam bukunya yang berjudul *Kriminologi* dari teori Strain, Robert K. Merton. Dalam teori Strain Robert K. Merton disebutkan bahwa masalah kriminal sesungguhnya, tidak diciptakan oleh *Sudden Social Change* (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh *Social Structure* (Struktur Sosial) yang menawarkan tujuan – tujuan yang sama untuk semua anggota tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Kekuangpaduan tentang apa yang diminta oleh budaya *(yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperolehkan oleh struktur (yang mencegahnya memperoleh kesuksesan) dapat menyebabkan norma – norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku. Merton meminjam istilah “Anomie” dari Durkheim guna menjelaskan keruntuhan sistem norma ini. Menurut Merton, didalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori Anomie Merton menekankan pentingnya dua unsur penting di setiap masyarakat. Yaitu: (1) *Cultural aspiration / culture goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkannya, dan (2) *institutionalised means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan – tujuan yang berharga bagi mereka. Berdasarkan perspektif tersebut, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. Teori Strain ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi dibawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparasi antara tujuan dan sarana inilah yang memberi tekanan tadi.⁴³

⁴³ Topo S dan Eva Achjani Z. 2004. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm:

Pada masa kolonial bentuk – bentuk kriminalitas yang terjadi pada umumnya adalah pencurian, perampokan, pembakaran rumah, perampokan perkebunan dan pembunuhan, dan tindakan – tindakan kriminal itu yang paling sering terjadi adalah pencurian hewan karena barang yang dianggap berharga pada masa itu adalah hewan ternak, seperti yang dilaporkan dalam *Algemeent Batavia 1891*, sebagai berikut.

Tabel 1
Kasus – kasus kriminal yang terjadi di Batavia
pada tahun 1891

No.	Kasus Kriminal	Jumlah
1.	Perampokan, kecu	10
2.	Pembunuhan	19
3.	Perampokan Perkebunan tebu	1
4.	Pembakaran rumah	1
5.	Pencurian hewan (<i>afdeling</i> tanggerang dan <i>Meester cornelis</i>) Di Bogor atau <i>Buitenzorg</i>	10 20 Kerbau 12 Kuda 84 kambing

Sumber : *Algemeent Batavia 1819*, Arsip Nasional Republik Indonesia

Diduga tingginya tingkat kriminalitas, adalah karena beredarnya secara bebas senjata api gelap di tangan sipil.⁴⁴ Kriminalitas tidak hanya terjadi pada bidang pembunuhan, peredaran

61 - 64

⁴⁴ AB No. 354 6 1. ANRI

senjata gelap, pencurian dan penipuan. Ternyata peredaran candu menjadi kejahatan umum waktu itu. Banyak ditemukan pecandon atau rumah – rumah candu di daerah Glodok yang saat itu masih berupa lapangan terbuka, dikenallah Glodok sebagai tempat peredaran candu gelap.⁴⁵

Sementara di daerah pedesaan Jawa kriminalitas didominasi oleh para jago lokal, kriminalitas di wilayah Batavia sebagian besar di kontrol oleh preman. Preman atau jagoan Batavia adalah orang – orang yang dianggap lebih pandai dan lebih sakti daripada penduduk biasa. Dengan kesaktian yang dimilikinya para gerombolan penjahat dalam melakukan aksi kejahatannya bisa tidak terlihat, mereka bisa melumpuhkan atau menidurkan lawan – lawannya, selama mereka masih percaya pada ilmu dan kesaktiannya, sehingga mereka bisa merampok tanpa mendapatkan perlawanan.⁴⁶

Perilaku kejahatan yang terjadi di Batavia beragam dan dikelompokkan menjadi empat perilaku kejahatan yang paling penting yaitu kejahatan melawan pemerintah dan agama, kejahatan terhadap seseorang, perampokan, pencurian dan penyalahgunaan jabatan, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

⁴⁵ Fitri R Ghozally. 2004. *Op.cit.*, hlm: 18 - 22

⁴⁶ P. M. Van Wulfften Palthe. 1949. *Over Het Bendewezen Op Java*. Oud-hoogleaar te Batavia., hlm : 3 - 5

Tabel 2

Kalsifikasi hukuman menurut suku bangsa, jenis kelamin dan empat jenis penting perilaku kejahatan

No.	Perilaku Kejahatan	Tahun	Eropa		Pribumi		Timur Asing		Total	
			Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1.	Kejahatan terhadap pemerintah	1931	19	-	1.669	123	226	5	1.914	128
		1930	13	1	1.464	114	279	2	1.756	117
2.	Kejahatan terhadap seseorang	1931	109	5	7.976	606	733	24	8.818	635
		1930	126	5	7.609	567	649	21	8.384	593
3.	Kejahatan kekayaan/rampok	1931	170	13	19.189	873	1.172	32	20.531	918
		1930	119	15	20.981	937	1.201	45	22.301	997
4.	Pencurian	1931	24	2	12.153	323	365	8	12.542	333
		1930	11	3	13.849	356	325	7	14.185	366
	Penyalahgunaan jabatan	1931	28	-	440	-	7	-	475	-
		1930	20	-	431	-	6	-	457	-
	Total	1931	326	18	29.274	1.602	2.138	61	31.738	1.681
		1930	278	21	30.485	1.618	2.135	68	32.898	1.707

Sumber: *Crimineele Statistiek Van Nederlandsch- Indie* 1931.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa, kejahatan yang dilakukan oleh orang – orang di Batavia lebih banyak dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang – orang Timur Asing dan Eropa, dan jenis kejahatan yang paling tinggi dilakukan adalah kejahatan kekayaan (perampokan dan pencurian) misalnya pada tahun 1931 pencurian yang dilakukan oleh Pribumi adalah sebesar 12.476 kasus, sedangkan Timur Asing sebesar 373 kasus dan Eropa sebesar 26 kasus kejahatan. Dari tabel di atas terlihat adanya penurunan jumlah kejahatan yaitu pada tahun 1930

terjadi 34.605 kasus kejahatan dan menjadi 33.419 kasus pada tahun 1931. Dengan demikian dalam waktu selang satu tahun jumlah kejahatan di Batavia mengalami penurunan sebesar 1.186 kasus.

Diantara empat jenis kejahatan di atas yang paling sedikit terjadi adalah kejahatan penyalahgunaan jabatan. Di dalam lembaga peradilan pada masa kolonial, juga terjadi penyalahgunaan jabatan, misalnya terjadi beberapa peristiwa pergantian dan pemecatan Jaksa dan pejabat peradilan lainnya karena penyalahgunaan jabatan, seperti pada tahun 1891 terjadi pemecatan terhadap Jaksa *Meester Cornelis*.⁴⁷

Kejahatan pada masa kolonial juga dilakukan oleh orang – orang dari berbagai tingkatan usia mulai dari anak – anak sampai dewasa, seperti yang diperlihatkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3
Klasifikasi hukuman menurut usia dan jenis kelamin

No	Umur	Tahun	Hukuman		Laki - laki		Perempuan	
			Total	%tase	Total	%tase	Total	%tase
1.	< 16 tahun	1931	564	1,7	539	1,6	25	0,1
		1930	679	2	650	1,9	29	0,1
2.	16 – 30 tahun	1931	18.067	54	17.119	51,2	948	2,9
		1930	18.673	54	17.688	51,2	985	2,8
	> 31 Tahun	1931	14.788	44,3	14.080	42,1	708	2,1
		1930	15.252	44	14.560	42,1	693	2
3.	Total	1931	33.419	100	31.738	94,9	1.681	5,1
		1930	34.605	100	32.898	95,1	1.707	4,9

Sumber: *Crimineele Statistiek Van Nederlandsch- Indie 1931*.

⁴⁷ AB No. 354 61. ANRI

Tabel diatas memperlihatkan bahwa, pelaku kejahatan paling besar berasal dari kempok usia 16 – 30 tahun dan pada umumnya dilakukan oleh laki – laki. Hal ini diakibatkan pada tingkatan usia 16 – 30 tahun, seseorang telah mencapai usia produktif dan dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya, tetapi tuntutan itu tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan tetap dan keterampilan yang terdapat di andalkan. Di batavia keadaan seperti itu di alami oleh penduduk pendatan baru yang datang ke Batavia dengan utjuan untuk memperoleh pekerjaan.

Situasi di Batavia pada tahun 1870 – 1900 merupakan suatu kondisi yang sarat kan perbuatan kriminal. Setiap hari ada saja berita perampokan, pencurian, dan pembunuhan. Nampaknya tingkat kriminalitas saat itu cukup tinggi, dan pemerintah Belanda pada waktu itu bertindak keras dalam menghadapi kriminalitas, dengan memberlakukan hukum gantung, bagi siapa saja yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Hukum gantung menjadi hal yang cukup menakutkan, dengan tindakan hukum yang tegas maka keamanan bagi masyarakat umum lebih terjamin, hukum gantung biasanya dilakukan di *Meester Cornelis* (Jatinegara), hukuman itu dilakukan dilapangan terbuka dan biasanya banyak orang yang berlalu – lalang berdatangan den berkumpul di *Meester Cornelis*.⁴⁸

⁴⁸ Fitri R Ghozally. 2004. *Op.cit.*, hlm: 18 - 22

Tabel 4
Daftar Orang – Orang yang dihukum mati

Tahun	Jenis Kejahatan	Sex	Putusan Hukuman						Pelaksanaan Hukuman Mati						Permohonan hak Meminta Ampunan			
			Sipil			Tentara			Sipil			Tentara			Sipil			Ten-tara
			E	Pb	TA	E	TA		E	Pb	TA	E	Pb		E	Pb	TA	E
1931	Pembunuhan	Laki – laki	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1930	Pembunuhan	Laki – laki	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
1929	Pembunuhan	Laki – laki	-	12	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	
		Laki – laki																

Sumber: *Crimineele Statistiek Van Nederlandsch- Indie 1931.*

Dari tabel diatas terlihat bahwa hukuman mati tidak hanya diberlakukan bagi orang – orang pribumi tetapi juga untuk orang – orang Timur Asing, pada tahun 1930 dan 1931 hukuman mati mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hukuman mati yang diberlakukan pada tahun 1929. Terpidana mati pada masa hindia Belanda juga dapat mengajukan hak untuk meminta ampunan, seperti pada tahun 1929 dari 12 orang yang dihukum mati 6 diantaranya mengajukan permohonan ampunan.

Selain diberlakukan hukuman mati (gantung) pada masa kolonial juga dilaksanakan hukuman penjara dan kerja paksa. Terjadinya perubahan sistem peradilan di negeri Belanda, mengakibatkan prosedur dan hukuman di Hindia Belanda juga berubah, karena pembentukan negara kebangsaan Belanda berjalan terus dan timbul dugaan mengenai hukuman yang lebih beradab, pemecatan di depan umum di hapuskan

dan tipe baru dari penjara direncanakan dan dikembangkan, isolasi diri penjahat perorangan di pertegas. Sebagai kelanjutan dari reformasi di negeri Belanda, hukuman cambuk Hindia Belanda dihapuskan pada tahun 1864, tetapi daripada dikurung dalam sel perorangan dalam penjara orang Jawa dihukum untuk melakukan kerja paksa. Penjara dianggap bukan merupakan hukuman yang cocok bagi orang Jawa, karena pengurungan secara perorangan akan mengakibatkan jadi gila dan juga bisa bunuh diri.⁴⁹ Dalam pelaksanaan hukuman penjara tentunya sangat berkaitan dengan penyediaan rumah tahanan. Pada masa kolonial, menurut arsip Batavia 1873, dilakukan pembangunan rumah – rumah tahanan dan poliklinik kota bagi para tahanan yang baru. Pembangunan rumah – rumah tahanan diatur dengan sistematis dan disediakan anggaran untuk proyek pembangunannya.⁵⁰

Kriminalitas yang terjadi di Batavia pada masa kolonial, dari tahun ke tahun rata – rata memiliki pola yang meningkat, seperti yang dilaporkan di arsip *Algemeen* Batavia 1891 bahwa terjadi kenaikan jumlah kejahatan, pada tahun 1891 sebanyak 4.523 kasus yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 1890 sebanyak 4.004 kasus yang sampai di depan pengadilan. Dari kasus – kasus kriminal yang terjadi tersebut beberapa ada yang dilengkapi dengan senjata api. Keamanan di Batavia pada tahun itu dinilai cukup baik walaupun dengan sarana keamanan yang sangat terbatas.⁵¹ Penyelesaian kasus – kasus kriminal tersebut dilakukan melalui pengadilan, pada masa itu terdapat tiga macam pengadilan yaitu

⁴⁹ Henk Schulte Nordholt. 2002. *Op.cit.*, hlm: 69

⁵⁰ *Algemeen Verslag Over 1870*. ANRI.

⁵¹ AB No. 35 4/6 1. ANRI

pengadilan peralihan, pengadilan negara dan kepolisian, pengadilan yang banyak menangani kasus – kasus kriminal adalah pengadilan kepolisian.

Tabel 5
Kasus – kasus kriminal yang masuk di pengadilan
pada tahun 1891

No.	Kasus Kriminal	Jumlah
1.	Pengadilan peralihan	16
2.	Pengadilan Negara	201
3.	pengadilan Polisi	4.366
	Jumlah	4.583

Sumber : *Algemeen Batavia 1819*, Arsip Nasional Republik Indonesia

Pelaku – pelaku kejahatan pada masa kolonial pun beragam dari berbagai kalangan yang memiliki pekerjaan yang berbeda – beda, dari petani, nelayan pedagang, pekerja kantor, buruh, kuli dan lain – lain, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.:

Tabel 6
Klasifikasi hukuman menurut pekerjaan
dan empat kelompok penting dari perilaku kejahatan

No.	Perilaku Kejahatan	Tahun	Petani, Pemburu & Nelayan	Pedagang & Industri	Pelayan	Pekerja Kantor	Buruh Kuli	Pekerjaan Lain
1.	Kejahatan terhadap	1931	808	561	17	90	405	161
		1930	604	570	10	90	466	133
2.	pemerintah	1931	4.205	2.110	252	252	2.143	665
		1930	3.666	2.005	287	287	2.320	534

3.	Kejahatan terhadap seseorang	1931	8.038	3.195	518	518	6.482	2.946
		1930	8.884	3.206	613	613	7.277	3.014
	Kejahatan kekayaan/ rampok	1931	4.895	1.075	182	86	4.765	1.872
		1930	5.275	1.219	275	315	5.424	2.043
4.	Pencurian	1931	-	-	-	475	-	-
		1930	-	-	-	457	-	-
	Penyalahgunaan jabatan	1931	-	-	-	-	-	-
		1930	-	-	-	-	-	-
Total		1931	13.051	5.866	365	1.335	9.030	3.772
		1930	13.154	5.781	379	1.447	10.063	3.781

Sumber: *Crimineele Statistiek Van Nederlandsch- Indie 1931.*

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pelaku kejahatan yang terbesar adalah dari kalangan yang bekerja sebagai nelayan, petani, buruh dan kuli, dengan perilaku kejahatan yang paling banyak dilakukan adalah kejahatan kekayaan dan pencurian. pada tahun 1931 kejahatan kekayaan yang di lakukan oleh petani, buruh dan nelayana sebanyak 8.038 kasus yang dilakukan oleh buruh dan kuli 6.482 kasus, jumlah itu lebih besar jika dibandingkan dengan kejahatan kekayaan yang dilakukan oleh pedagang, pekerja kantor dan jenis pekerjaan lainnya. Selama selang waktu satu tahun anantara 1930 – 1931 terjadi penurunan jumlah kejahatan yang dilakukan oleh petani dan nelayan sebesar 846 kasus kejahatan sedangkan kejahatan yang dilakukan oleh buruh dan kuli mengalami penurunan sebesar 795 kasus, dan secara umum jumlah kejahatan mengalami penurunan tahun 1931.

Tingginya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh petani, nelayan, buruh, dan kuli, terjadi karena jumlah penduduk yang bekerja

jumlah penduduk yang bekerja dalam sektor pertanian, nelayan, dan buruh adalah yang terbesar dari pada sektor pekerja yang lain, tetapi disamping sebab itu ada sebab lain, mengapa pelaku kejahatan lebih banyak berasal dari kalangan petani, nelayan, buruh dan kuli merupakan golongan yang selalu berada dalam posisi yang subsisten.⁵² Karena keadaan inilah maka petani, nelayan, buruh dan kuli terdesak untuk melakukan perilaku kejahatan berupa perampokan atau pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi disamping untuk memenuhi kebutuhan hidup perilaku kejahatan yang dilakukan oleh petani, nelayan, buruh dan kuli merupakan wujud dari refleksi terhadap kehidupan sosial saat itu, kejahatan pada sisi ini merupakan bentuk aksi protes dan kekecewaan terhadap struktur sosial masyarakat, ketidakadilan dan kesenjangan sosial – ekonomi dalam masyarakat kolonial.

Perilaku kejahatan yang dilakukan oleh petani, nelayan, buruh, dan kuli sebagai golongan yang selalu berada dalam posisi subsisten, tersebut sesuai dengan teori Strain Robert K. Merton yang menyebutkan bahwa masalah kriminal sesungguhnya, tidak diciptakan oleh *sudden Social Change* (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh *social structure* (struktur sosial) yang menawarkan tujuan – tujuan yang sama untuk semua anggota tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Kekuarang paduan tentang apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperoleh oleh struktur (yang mencegahnya memperoleh kesuksesan) dapat menyebabkan norma – norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk

⁵² Sri Mastuti P. 2003. "Kekerasan Anti Cina pada masa Awal Kemerdekaan (Studi Kasus Tangerang dan Bagan Siapiapi)". Jurnal Pendidikan Sejarah. Vol. 1 No. 2., hlm:137

membimbing tingkah laku. Merton meminjam istilah “Anomie” dari Durkheim guna menjelaskan keruntuhan sistem norma ini. Menurut Merton, didalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori Anomie merton menekankan pentingnya dua unsur penting di setiap masyarakat. Yaitu: (1) *Cultural aspiration / culture goals* yang diyakini berharga untuk dijuvangukan, dan (2) *institutionalised means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan – tujuan yang berharga bagi mereka. Berdasarkan perspektif tersebut, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. Teori Strain ini berasumsi bahwa orang itu taan hukum, tetapi dibawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparasi antara tujuan dan sarana inilah yang memberi tekanan tadi.⁵³ Dalam hal ini petani, nelayan, buruh, dan kuli merupakan anggota masyarakat yang juga memiliki tujuan yang sama seperti anggota masyarakat yang lainnya yaitu ingin memperoleh kemakmuran dan dapat menikmati semua fasilitas yang ada dalam masyarakat, tetapi tujuan – tujuan itu tidak diiringi dengan pemberian sarana yang sama kepada mereka untuk mencapai tujuannya, melainkan yang terjadi adalah struktur masyarakat kolonial terjadi diskriminasi terhadap petani, nelayan, buruh, dan kuli sebagai golongan yang menempati posisi bawah dalam stratifikasi sosial masyarakat kolonial. Ketidakadilan dalam mencapai tujuan hidup itulah yang mendorong orang – orang golongan bawah untuk melakukan

⁵³ Topo S dan Eva Achjani Z. 2004. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm: 61 - 64

perilaku – perilaku kejahatan. Struktur sosial masyarakat kolonial merupakan akar dari masalah kejahatan pada masa itu.

Kejahatan terjadi tidak hanya dikarenakan oleh faktor ekonomi, tetapi kejahatan merupakan bagian dari protes sosial dari kelompok masyarakat tertentu terhadap struktur sosial pemerintahan yang berkuasa, yang memposisikan kelompok tersebut berada pada posisi yang tersingkirkan dalam bidang sosial dan ekonomi.⁵⁴

Kriminalitas yang terjadi di Batavia merupakan salah satu perwujudan dari protes yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tersingkirkan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Batavia, dalam hal ini kejahatan dijadikan sebagai kompensasi atas posisi yang didapatkannya, karena kejahatan merupakan jalan yang dianggap paling mudah untuk mewujudkan protes. Kriminalitas merupakan aksi dari sebagian kelompok masyarakat yang berada pada posisi – posisi yang tidak menguntungkan dalam bidang sosial dan ekonomi, kejahatan sendiri ditujukan kepada kelompok – kelompok yang menduduki yang menduduki posisi yang menguntungkan dalam bidang sosial dan ekonomi seperti tuan – tuan tanah pribumi maupun cina dan juga kepada lembaga pemerintahan. Kejahatan pada masa kolonial pada dasarnya tidak saja ditujukan kepada tuan – tuan tanah Cina, pemerintah kolonial atau kepada orang – orang Eropa pemilik perkebunan tetapi pada awalnya aksi kriminal ditujukan kepada tuan – tuan tanah pribumi yang

⁵⁴ Hobsbwan membedakan bandit menjadi dua yaitu bandit biasa (*ordinary bandits*) dan bandit sosial (*Social Bandits*). Bandit biasa adalah seseorang yang melakukan kejahatan dengan merampok tanpa latar belakang apapun, sedangkan bandit sosial adalah perbuatan seseorang untuk merampok dengan latar belakang sosial ekonomi. Keterangan ini dapat dilihat dalam, J.E. Hobsbwan. 2000. *Bandit Sosial*. Jakarta : Templok Press., hlm: 1 - 16

kaya raya tetapi berperilaku tidak adil terhadap orang – orang yang berada pada posisi bawah.

Dalam perkebunan juga terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi yang sangat tajam antara pemilik perkebunan, pegawai eropa dan mandor, terhadap buruh. Pekerja perkebunan hanya mempunyai pertahanan yang sangat primitif, mereka lari dari perkebunan, mencuri tebu, atau dalam kasus yang ekstrem membakar kebun atau menghajar mandor atau pengawas. Setelah tahun 1900 jumlah ladang tebu yang terbakar meningkat dengan angka yang sangat mengherankan. Hal ini menimbulkan kesan banyaknya keluhan petani yang merasa hak nya atas tanah dan air telah dicatut, dan para pekerja dituntut dengan disiplin yang tinggi.⁵⁵

Kriminalitas masa kolonial di Batavia pada tahun 1870 – 1930 terjadi pada masa transisi yaitu perubahan dari sistem ekonomi *cuulturestelsel* ke sistem ekonomi liberal dan kemudian berubah lagi menjadi politik etis.⁵⁶ Tetapi dalam kaitannya dengan masalah kriminal lebih dititik beratkan kepada masalah perubahan dari *cuulturestelsel* ke ekonomi liberal karena perubahan yang diakibatkan pada masa ini adalah sangat besar, tidak saja terjadi perubahan sistem ekonomi tetapi juga terjadi perubahan sosial dalam masyarakat Batavia.

Perkembangan ekonomi semakin cepat dalam fase kebijakan ekonomi liberal. Undang – Undang agraria yang terbit pada tahun 1870 – an, di satu pihak berusaha melindungi petani dari penguasaan asing,

⁵⁵ W.F. Wertheim. 1993. *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara WacanaYogya., hlm:193

⁵⁶ Politik etis adalah politik balas budi pemerintah Hindia Belanda kepada penduduk pribumi. Dalam hal edukasi, irigasi, dan imigrasi, yang di mulai pada tahun 1901

tetapi pada waktu yang sama membuka peluang investasi modal barat dalam pertanian swasta dalam skala besar. Pada periode inilah tanaman tebu, teh, kopi, dan pohon kina dikembangkan di pulau Jawa dan tembakau di Deli. Perusahaan – perusahaan swasta dapat menyewa sawah – sawah yang beririgasi dari pemilik penduduk pribumi untuk penanaman tebu secara bergantian dengan penanaman padi oleh penduduk pribumi, tetapi proses ini juga membuat semakin melemahnya pemilikan tanah penduduk pribumi.⁵⁷

Berdirinya perkebunan – perkebunan besar, banyak mengurus tanah – tanah yang dimiliki oleh pribumi sehingga orang – orang pribumi Batavia semakin terdesak ke wilayah pinggiran, tetapi sebenarnya sudah sejak diduduki oleh pihak Belanda, tanah – tanah di sekitar Batavia telah disewakan dan dijual kepada pihak swasta/partikelir dan memasuki masa ekonomi liberal maka makin banyak tanah partikelir yang diciptakan.⁵⁸ Tanah – tanah partikelir yang luas ini diusahakan oleh para pemiliknya atau oleh wakil pemilik dan akibatnya pemerintah Hindia Belanda tidak mempunyai kontrol atas wilayah tanah partikelir. Pemilik tanah pajak khususnya yang dinamakan cuke (cukai) sebesar 20 sampai 40% dari panen padi petani di tanah partikelir.⁵⁹

⁵⁷ W.F. Wertheim. 1993. *Op.cit.*, hlm: 68

⁵⁸ Di Kresidenan Batavia terdapat pranata dalam kepemilikan tanah yang jarang terdapat di daerah – daerah lain, yaitu pranata pemilikan tanah partikelir. Tanah partikelir hampir terdapat semua distrik, kecuali distrik Blajara. Keterangan ini dapat dilihat dalam memori”Residen Batavia (P.H. Willemse), 26 Oktober 1931” memori serah terima jabatan 1921 – 1930 (Jawa Barat). ANRI Penerbitan Sumber – Sumber Sejarah No. 8. 1976. Jakarta: ANRI., hlm : 30

⁵⁹ Henk Sculte Nordhoul.2002. *Op.cit.*, hlm : 53

Pungutan yang besar dan berbagai kewajiban yang dibebankan oleh pemilik tanah kepada rakyat yang bertempat tinggal di tanah partikelir membuat kehidupan rakyat semakin sulit, sehingga keadaan yang buruk itu menyebabkan terjadinya beberapa aksi kriminalitas, misalnya pada tanggal 9 dan 10 April 1916 terjadi aksi protes dan kekerasan yang dilakukan oleh Entong Gendut. Dari Entong Gendut asisten wedana mendapat keterangan bahwa Entong Gendut dan pengikut – pengikutnya berkumpul untuk menghalang – halangi Asisten Wedana melaksanakan eksekusi di kampung Batuampar dan kampung balekambang terhadap penduduk yang tidak melunasi hutang dan kewajiban pada tuan – tuan tanah.⁶⁰ Entong Gendut dan pengikut – pengikutnya melakukan protes karena merasa kasihan terhadap penduduk yang rumahnya dibakar karena tidak mampu membayar hutang kepada tuan tanah. Bagi tuan tanah pungutan dan kewajiban yang dituntut dari penduduk di tanahnya memang menjadi penghasilan yang menentukan, terutama uang sewa tanah pekarangan dan uang penggantikerja wajib. Meskipun besarnya pungutan yang ditarik oleh pemilik tanah dari penduduk penyewa tanah cukup beralasan, yaitu 1/5 dari hasil tanah pekarangan, tetapi besarnya pungutan ditentukan sepihak oleh pemilik tanah dan penduduk penyewa tidak punya hak untuk menolak, sehingga besarnya pungutan menjadi tinggi dan dapat berubah – ubah. Besarnya pungutan yang tidak pasti menyebabkan

⁶⁰ “berita acara dibuat oleh asisten wedana pasar Rebo, Meester Cornelis (R. Pringgodimedjo), 17 April 1916”. Laporan tentang Gerakan protesdi Jawa Pada Abad XX. ANRI Penerbitan Sumber Sejarah. 1981. Jakarta: ANRI., hlm : 40 - 42

timbulnya kerusuhan dan aksi – aksi kriminal yang dilakukan oleh penduduk penyewa kepada tuan tanah.⁶¹

Dengan demikian, abad ke – 19 dapat dicirikan sebagai periode keberantakan sistem ekonomi tradisional. Meskipun ada upaya dari pemerintah Hindia Belanda untuk sebanyak mungkin menggunakan tatanan sosial yang ada, tetapi tidak dapat menghadapi terganggunya masyarakat dan akhirnya mereduksi anggota masyarakat tradisional menjadi bentuk – bentuk tunggal dan individualis. Struktur masyarakat Batavia dengan demikian juga terpengaruh oleh dampak Kapitalisme. Bagaimana struktur masyarakat itu terpengaruh, bergantung pada situasi ekonomi dan politik.

Pada akhirnya kebijakan ekonomi liberal dikeluarkan pada tahun 1870 belum mencapai peningkatan kesejahteraan petani Jawa. Sebaliknya, keluhan umum yang tanpak pada pergantian abad itu adalah kondisi yang semakin buruk. Oleh karena itu, dengan bantuan parlemen Belanda, merangsang dikeluarkannya sebuah kebijakan ekonomi baru, yang kemudian disebut dengan Kebijakan etik (*ethical policy*), yang bertujuan melakukan tindakan positif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, terlepas dari kegagalannya, sistem ekonomi liberal telah terbukti dapat merubah struktur dan tatanan dalam masyarakat Hindia Belanda secara umum dan masyarakat Batavia pada Khususnya.

⁶¹ “asisten Residen Meester Cornelis (D. Heyting) kepada Residen Batavia (H. Rijsnijder) 18 April 1916”. Laporan – laporan tentang Gerakan protes di Jawa Pada Abad XX. ANRI Penerbitan Sumber Sejarah. 1981. Jakarta: ANRI., hlm: 42 - 43

Selain menyebabkan perubahan pada pola pemilikan tanah, perubahan sistem ekonomi tersebut juga menyebabkan masuknya ekonomi uang ke Hindia Belanda sebagai akibat pertama dari kapitalisme barat modern, sehingga pada masa ini petani tidak bisa memusatkan hasil produksinya pada pemenuhan pangan untuk konsumsi rumah tangga, tetapi juga harus mencari pendapatan uang tambahan, untuk memenuhi kebutuhan akan uang maka sebagian petani menjadi penanam tanaman dagang dan yang sebagian lainnya menjadi pekerja di perkebunan – perkebunan tanaman komersial, keadaan ini menjadi penduduk kehilangan mata pencaharian mereka yang tradisional. Dengan bekerja di perkebunan maka mereka menerima upah dalam bentuk uang, yang mengakibatkan penduduk pribumi Batavia semakin didorong kedalam ekonomi uang.

Keadaan yang terjadi pada masyarakat Batavia ini sesuai dengan teori struktural fungsional yang mengatakan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian – bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain.⁶² Sebagaimana diketahui, didalam pendekatan fungsional terdapat prinsip yang paling penting, yaitu adanya saling keterkaitan antar bagian – bagian dalam suatu sistem. Apabila saling keterkaitan antar bagian – bagian dalam suatu sistem. Apabila saling keterkaitan ini diabaikan maka mekanisme system itu

⁶² Muhammad Basrowi dan Soernyono. 2004. *Teori Sosiologi dala Tiga Paradikma*. Surabaya : Yayasan Kampusina Surabaya., hlm: 2

akan terganggu.⁶³ perubahan sistem ekonomi selain mendorong terjadinya perkembangan ekonomi, tetapi turut pula mempengaruhi kehidupan sosial dan nilai yang dianut oleh penduduk Batavia dan apabila saling keterkaitan antara perubahan ekonomi dan kehidupan sosial diabaikan maka akan mengakibatkan terjadinya gangguan dan menimbulkan masalah sosial, yaitu kriminalitas, karena semua bagian yang ada dalam masyarakat Batavia merupakan satu ikatan, jika terjadi perubahan pada suatu bagian maka akan mengakibatkan perubahan pada bagian yang lainnya.

Dalam hal ini, kriminalitas yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Batavia terjadi dalam masa transisi, sebab kriminalitas terjadi menyangkut masalah – masalah sosila ekonomi atau secara umum menyangkut kepentingan hidup manusia di dalam masyarakat. Proses – proses sosial ekonomi inilah di dalam dinamika sosial dapat melatar belakangi lairnya perilaku menyimpang dalam bentuk perilaku kejahatan.⁶⁴ Jika kepentingan – kepentingan hidup itu tidak dimiliki atau terjadinya tekanan sosial – ekonomi, maka kecendrungan akan timbulnya perbuatan kejahatan akan semakin bertambah. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 7, bahwa yang paling banyak melakukan kriminalitas ternyata berasal dari golongan masyarakat tertentu, khususnya masyarakat yang berstatus sosial ekonomi lemah, yaitu penduduk pribumi yang mayoritas bekerja sebagai petani, nelayan, buruh, dan kuli di Batavia mereka berada pada posisi yang lemah dalam proses transisi ekonomi, dan tidak mengalami perbaikan hidup,

⁶³ *Ibid.*, hlm:5

⁶⁴ Abdulsyani. 1987. *Op.cit.*, hlm : 34

sehingga kekecewaan atas ketidak mampuannya dalam menghadapi perubahan transisi ekonomi salah satunya diwujudkan dalam perilaku kejahatan. Ketidak mampuan dalam proses perubahan itu terjadi karena penduduk pribumi tidak memiliki modal yang dapat digunakan untuk memperbaiki posisinya dalam proses perubahan itu, selain keadaan seperti di atas sebagai salah satu penyebab terjadinya kejahatan, sistem ekonomi liberal telah mendorong masyarakat Batavia ke dalam kehidupan industrialisasi.

RUJUKAN

- Henk Schulte Nordholt. 2002. *Kriminalitas, Modernitas dan Identitas dalam Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar ., hlm: 53
- M. C. Rickleft. 1993. *Sejarah Indonesia Modern*. Yongyakarta: Gajah Mada University Press., hlm: 190
- Marwati Djoenad P. Dan Nugroho Noto susanto. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka., hlm: 119
- Julianto Ibrahim. 2004. *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan Kriminalitas dan Kekerasan Masa revolusi di Surakarta*. Surakarta : Bina Cipta Pustaka., hlm: 13
- Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Grafindo., hlm. 366 – 367
- Topo S dan Eva Achjani Z. 2004. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm: 61 – 64
- P. M. Van Wulfften Palthe. 1949. *Over Het Bendewezen Op Java*. Oud-hoogleaar te Batavia., hlm : 3 – 5
- Topo S dan Eva Achjani Z. 2004. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm: 61 – 64
- J.E. Hobsbwan. 2000. *Bandit Sosial*. Jakarta : Templok Press., hlm: 1 – 16
- W.F. Wertheim. 1993. *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya., hlm:193
- Muhammad Basrowi dan Soernyono. 2004. *Teori Sosiologi dala Tiga Paradikma*. Surabaya : Yayasan Kampusina Surabaya., hlm: 2

C. PEMBANGKANGAN PENDUDUK TERHADAP TUAN – TUAN TANAH DI KOTA SURABAYA PADA AWAL ABAD KE – XX

MINARSIH

Pada tahun 1916 penduduk di kota Surabaya melakukan aksi pembangkangan terhadap para tuan tanah. Sumber kekacauan ini disebabkan karena penduduk mendapat hasutan yang menyatakan bahwa tanah tempat tinggal dan tanah garapan yang mereka kerjakan itu, sebenarnya milik mereka sendiri.⁶⁵

Kasus serupa memang kenyataannya sudah banyak terjadi dan telah mewarnai kehidupan masyarakat agraris pada abad XIX dan awal abad XX, baik di kota maupun di pedesaan, yaitu pada waktu masyarakat tradisional mengalami berbagai perubahan sosial sebagai akibat penetrasi pemerintahan kolonial yang semakin kuat.⁶⁶ Sebut saja misalnya kasus di desa Patik (Kawedanan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Karesidenan Madiun), pemberontakan Cilegon 1888, peristiwa Entong Gendut di Condet 1916 dan masih banyak lagi.

Aspek lain dari pemberontakan petani sebagai gejala sejarah ialah bahwa dalam masyarakat petani, perubahan yang datang merupakan akibat dari hubungan dengan masyarakat luar yang sering membangkitkan perlawanan atau penolakan. Hubungan yang

⁶⁵ ANRI, *Laporan – Laporan tentang Gerakan Protes di Jawa Pada Abad XX*. Penerbitan Sumber – Sumber Sejarah, Jakarta . 1981: hlm LI

⁶⁶ Sartono Kartodirjo, "Gerakan Protes dan Ketidakpuasan Dalam Masyarakat Tradisional". LP3ES, dalam Prisma. 1977. Tahun – VI. No. 1., hlm: 38

berkembang pada sektor agraris berupa dominasi oleh penguasa terhadap penduduk melalui eksploitasi tanah dan tenaga.⁶⁷

Umumnya kasus seperti diatas berawal dari adanya penjualan tanah negara / pemerintah kepada pihak swasta.⁶⁸ Terutama pada orang Cina yang mempunyai kemampuan untuk membeli petak – petak tanah seluas mungkin dengan modal yang mereka miliki. Melalui pembelian tanah negara, orang Cina telah memperoleh posisi dengan memiliki status yang lebih tinggi sebagai orang – orang swasta diatas penduduk pribumi.⁶⁹ Dengan demikian orang Cina berkuasa atas petak – petak tanah yang dimilikinya sebagai tuan tanah.

Sebagai konsekuensi penduduk terhadap hak yang telah diberikan oleh penguasa dalam perjanjian sistem sewa menyewa maka penduduk berkewajiban membayar uang sewa. Sistem sewa, atau sewa gadai, ialah pembayaran harga sewa dari tanah garapan, baik berupa uang maupun bagian dari hasil panen dalam bentuk natura (maro, marepat, dan merlima). Bentuk paling umum yang didapat pada sewa ialah satu bentuk bagi hasil yang dibau tiap kali untuk satu tahun atau untuk satu kali panen. Disamping itu ada juga sewa yang disetujui bersama sebelumnya.⁷⁰

⁶⁷ Sartono Kartodirdjo, "Gerakan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah", Jakarta: Gramedia, 1993., hlm 192, LP3S dalam Prisma 1977. Tahun – VI. No. 1., hlm: 38

⁶⁸ Putri Agus W. "*Tanah dan Sistem Perpajakan Masa Kolonial Inggris*". Yogyakarta : Tarawang Press. 2001., hlm: 2

⁶⁹ *Ibid.*, hlm:3

⁷⁰ A.M.P.A. Scheltema, *Bagi Hasil di hindia Belanda* . Pengantar: S.M.P. Tjondronegoro, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1985., hlm : 22

Secara perlahan hasil bumi ini kemudian diubah menjadi pajak sebagai penggantian dan dengan demikian pajak tanah muncul.⁷¹

Membahas masalah tanah, tentunya kita tidak dapat lepas dari persoalan pemilikan dan penugasan tanah yang ada di Jawa umumnya, dan Surabaya khususnya. Raja bukanlah pemilik tanah dalam pengertian pemilik pribadi, tetapi hanya mempunyai hak atas sebagian tanah yang diserahkan kepada penyewa.⁷²

Apabila ditelusuri lebih jauh mengenai konflik masalah tanah, kesimpulan umum senantiasa menyebutkan bahwa rakyat menggarap tanah tanpa dasar hukum yang jelas. Perbedaan penerapan konsep hak milik atas tanah, baik hukum adat maupun hukum barat juga seringkali memicu munculnya konflik atas pemilik tanah.⁷³

Dalam konflik hukum adat, tumbuh kembang dan menyusutnya hak milik tergantung pada interaksi dengan hak ulayat.⁷⁴ Makin kuat hak milik maka makin lemah identitas dengan hak ulayat, sebaliknya makin kuat hak ulayat maka makin mengecil identitas hak milik. Sekuat apapun hak milik namun yang primer adalah hak ulayat. Adapun pada konsep barat membalikkan konsep adat, yaitu *Ipsa Jure*⁷⁵ yang menimbulkan hak

⁷¹ J.H. Heslinga. *De Retchen op Ground en Water op Java en Madoera- Verklaard*, Weltevreden: N.V. Boekhandel Visser 7 Co, 1928, hlm:8-9

⁷² Putri Agus W., *Op.Cit.*, hlm :5; Werner Roll, *Op.Cit*; hlm v-vi

⁷³ H. Achmad Sodiki. "Konflik kepemilikan Hak Atas Tanah Perkebunan", dalam Prisma, tanggal 9 September 1996., hlm: 3

⁷⁴ Hak ulayat adalah hak bersama segolongan penduduk atas sebidang tanah. Hak Ulayat juga dikatakan sebagai tanah desa / tanah komunal yaitu tanah milik bersama masyarakat desa yang dikerjakan secara bergilir

⁷⁵ *Ipsa Jure* adalah pemilikan tanah yang berada di tangan penguasaan pemerintah, lihat H. Achmad Sodiki., hlm: 5

dan hak inilah yang melahirkan kekuasaan, karena itu untuk dapat menyatakan bahwa negara menguasai tanah harus dinyatakan terlebih dahulu kepemilikannya yang juga disebut dengan *Domein Verklaring*. Dengan demikian, jika seseorang tidak dapat membuktikan bahwa, tanah yang dikuasai adalah tanah miliknya, maka tanah yang bersangkutan adalah tanah negara atau *Eigendom* Negara. Apabila negara dapat memiliki tanah, maka dapat pula ia menjual atau menyewakan tanah itu. Perbedaan penerapan konsep anatar hukum adat.⁷⁶ Dan hukum barat inilah yang menyebabkan keberadaan hukum adat tersisih dan terabaikan, karena tidak mampu menghadapi kekuasaan negara dari kepentingan swasta yang menginginkan tanah luas untuk usahanya.⁷⁷ Atas dasar perbedaan – perbedaan seperti itulah, pada tahun 1916 terjadi keributan di tanah – tanah partikelir sekitar Surabaya yang para penghuninya menolak untuk menyerahkan separuh dari hasil panen kepada tuan tana yang mayoritas adalah Orang Cina.⁷⁸

Mengenai bentuk sistem kepemilikan tanah di Karesidenan Surabaya ini pada awalnya hak milik individu atas tanah merupakan hak buka pertama. Pemilikan ini ada kesamaan dengan nama tradisional yang berlaku hampir di seluruh Jawa yaitu *yasa* (membuat). Orang yang membuka liar atau tanah tak bertuan dengan tenaga pertama akan memperoleh hak *yasa*. Tanah dengan hak *yasa* dapat dialihkan kepada

⁷⁶ Hukum adat menurut penjelasan UUPA angka III/1 adalah hukum asli golongan pribumi yang berbentuk tidak tertulis dan mengandung unsur – unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan/ kekeluargaan yang berasaskan kesimbangan dan diikuti oleh suasana keagamaan. Lihat H. Achmad Sodiki., *Ibid.*, hlm: 5

⁷⁷ *Ibid.*, hlm: 5

⁷⁸ A.M.P.A. Scheltema. *Op.Cit.*, hlm : 413

keturunan pembuka pertama yang menurut suatu penelitian dinamakan *Eindresume*⁷⁹ disebut milik perorangan yang turun temurun.⁸⁰ Pemilik perorangan turun – temurun (*Enfelijk Individueel Ground – Bezit*) merupakan suatu bentuk penguasaan tanah secara kekal dapat diserahkan kepada ahli warisnya.⁸¹

Disamping hak buka pertama yang melahirkan hak milik individu secara turun – temurun. Juga terdapat hak milik atas tanah pada orang pribumi yang bersifat komunal. Pemilihan komunal adalah suatu bentuk penguasaan oleh seseorang dalam memanfaatkan tanah yang merupakan bagian dari tanah komunal desa. Dalam hak milik komunal, desa adalah pemilik tanah yang dibagi diantara penduduk oleh pemerintah desa setiap desa akan menerima setiap petak tanah untuk digarap.⁸² Untuk karesidenan Surabaya sistem kepemilikan tanah merupakan jenis pemilikan komunal “dengan pembagian bergantian” yaitu bentuk penguasaan dari tanah komunal berputar setiap tahun sebagai pengganti bagi penanam yang diminta melakukan kerja wajib dan upeti pemerintah desa.⁸³ Sedangkan tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang maupun milik komunal menjadi tanah pemerintah sebagaimana yang dirumuskan dalam

⁷⁹*Eindresume* kepanjangan dari *Eindresume* van het onderzoek naar de Rechten van den inlander op de ground. Suatu penelitian tentang hak – hak penduduk Jawa atas tanah yang dilakukan di 808 desa di Jawa pada tahun 1868. Hasil penelitian diterbitkan dalam 3 jilid pada tahun 1876, 1880, dan 1896, lihat dalam bukunya Putri Agus W, *Tanah dan Sistem Perpajakan Masa Kolonial Inggris*. Yogyakarta: Tarawang Press. 2001., hlm:26

⁸⁰Tanah Jenis ini disebut juga tanah pusosko yaitu hak milik atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan, *Ibid*, hlm: 26

⁸¹*Ibid*

⁸²*Ibid.*, hlm : 28

⁸³*Ibid.*, hlm : 29

Undang – Undang *Agrarische Besluit Staatsblaad* 1870, No. 118, Pasal 1 bahwa semua tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang tanpa bukti kepemilikan akan menjadi tanah milik pemerintah. Padahal di awal abad ke – 19 penguasaan tanah tradisional sulit dibuktikan secara formal bahwa petak – petak tanah tidak ada pemiliknya (baik individu maupun komunal).⁸⁴

Tanah – tanah yang menjadi hak milik komunal / pemerintah ini kemudian banyak yang dijual pada pengusaha asing yang mengakibatkan munculnya tanah – tanah partikelir (*particuliere Landerijen*). Kemudian tanah yang dimiliki oleh penguasa asing ini *dierfphakkan*⁸⁵ pada penduduk pribumi dengan sistem pajak tanah (*land rente*). Sistem penyewaan ini bisa berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama antara 5 sampai 20 tahun atau selama 75 tahun (tergantung pada persyaratan hak kepemilikan tanah).⁸⁶

Surabaya mempunyai pajak pendapatan sendiri dengan kebutuhan yang paling mendesak untuk kerumah tanggian dan untuk orang – orang yang menjadi beban pembayar pajak maka perlu di ketahui keadaan warganya dan susunan keluarganya maupun tempat tinggal wajib pajak.⁸⁷ Ini semua pertama kali pada kenyataanya sangat sulit dilakukan dan bahkan masih ada sekelompok penduduk yang tidak terdata untuk

⁸⁴ *Ibid.*, hlm : 30

⁸⁵ Tanah erphacht adalah tanah yang disewakan secara turun – temurun dengan batas waktu tertentu untuk menarik keuntungan sepenuhnya dari suatu benda tidak bergerak milik orang lain dengan pembayaran tahunan berupa uang dan barang.

⁸⁶ M.C. Riecklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 1998., hlm : 190

⁸⁷ Joy Suys, *Op.cit*; hlm:263

sementara waktu tidak menjadi masalah yang besar karena kelompok penduduk yang tidak terdata hanya merupakan sebagian kecil saja dari yang menjadi wajib pajak. Pendataan ini dilakukan tidak hanya meliputi penduduk pribumi saja tetapi juga untuk orang – orang Eropa maupun orang – orang timur asing yang tinggal di Kota Surabaya juga mulai di data.

Adanya sistem tata buku kependudukan yang teratur memudahkan setiap orang untuk membeli tanah maupun menjualnya seperti yang dilakukan oleh Raden Pandji Soenarjo Gondokoesoemo yang meminta permohonan kepada dewan kota untuk mendapatkan hak *erfpacht* atas tanah seluas 500 bau. Demikian halnya dengan sistem pembayaran pajak lebih mudah seperti yang dilakukan F.J. Hartsteen yang membayar persil – persil *erfpacht* atas daerah Wonokerto I dan II serta Tjarangwoelang I dan II.⁸⁸

Menurut konsep hukum adat oleh Soepomo disebut dengan cara berpikir yang *participierend*, hubungan manusia dengan tanahnya sangat ditentukan oleh intensitas de facto penggunaan atau penggarapan manusia atas tanahnya. Makin intens penggarapan maka makin kukuh pulalah penguasaan atas tanah itu.⁸⁹

Berbicara mengenai masalah tanah kita tidak dapat lepas dari konsep pemilikan dan penguasaan tanah. J.H. Heslinga dalam bukunya yang berjudul *De Retchen op Ground en Water op Java en Madoera*

⁸⁸ Agrarische aangeleggenheid, 1916, ANRI, A.D. Surabaya, No. Reel : 142, hlm: 929 N

⁸⁹ H. Achmad Sodiki. "Konflik kepemilikan Hak Atas Tanah Perkebunan", dalam Prisma, tanggal 9 September 1996., hlm: 4

menyebutkan bahwa pemilikan mengandung pengertian hak menggunakan tanah sesuai dengan hak nya, bisa dipindahkan hak nya kepada orang lain melalui pewarisan, penjualan, menggadaikan, atau menyewakan. Di samping itu terdapat pula hak menggunakan atau menguasai tanah atas dasar hubungan sewa menyewa atau kontrak yang disebut dengan istilah penguasaan tanah. Dalam hal ini penguasa tanah tidak memiliki hak untuk menjual kepada orang lain untuk mewariskan kepada keturunannya.⁹⁰

Bentuk penyewaan March Bloch bahwa penguasaan atas sebidang tanah berarti juga menguasai segala isinya, termasuk penduduk yang tinggal diatas tanahnya. Di sini berlangsung proses menguasai dan dikuasai, proses penghambaan dan pengabdian yang sangat intens.⁹¹ Nantinya akan melahirkan perbedaan antara tuan tanah dengan petani penggarap atau dalam istilah Jawa digambarkan sebagai hubungan anatar Kawula – Gusti (hamba dan tuan). Menurut istilah modern Kawula – Gusti ini dapat diterjemahkan sebagai “bapak anak buah” (Patron – client).⁹²

tanah di Surabaya pada abad ke – XX mempunyai sistem penyewaan dalam bentuk perjanjian bagi hasil masing – masing sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Untuk karesidan Surabaya bagi hasil yang paling banyak digunakan dan sudah ditetapkan adalh sistem bagi

⁹⁰ J.H. Heslinga. *De Retchen op Ground en Water op Java en Madoera- Verklaard*, (Weltevreden: N.V. Boekhandel Visser & Co, 1928 7 Co, 1928), hlm: 21 – 22 dan Putri Agus W, *Op.cit*: hlm : 25

⁹¹ Putri Agus W, *Op.cit*: hlm : 9

⁹² Onghokham, “ Elite dan Monopoli Dalam Perspektif Sejarah” dalam *Prisma*, Monopoli, No. II, 1985, tahun XIV: hlm: 3

hasil yang bersifat maro (yaitu perjanjian bagi hasil dengan perbandingan 1:1). Dalam sistem ini sejumlah uang sebelum tanah garapan diserahkan kepada para penggarap yang dalam sistem ini biasanya disebut pemaro.⁹³

Selain mendapatkan uang muka dari penggarap tanah untuk sebidang sebidang tanah yang digunakan, pemilik tanah juga menerima 50% dari hasil panen pada tiap – tiap musim penanaman. Bagi si penggarap tanah yang biasanya harus menyediakan alat – alat produksi lainnya, memperoleh sisa bagian 50% dari tiap hasil panen. Oleh karena itu cara ini merupakan perpaduan setengah dari hasil panen dan sebagainya dengan uang.⁹⁴

Untuk memperkuat ada dua bentuk perpaduan antara sistem bagi hasil tanah 1 dibanding 1 dan sistem sewa tanah yang dibayar dengan hasil tanah yaitu:

1. Sebelum tanah penduduk digarap, maka para pemilik tanah meminta dari penggarap bukan sewa dalam bentuk hasil tanah.
2. Pada permulaan, pemilik tanah meminta bagian tertentu dari hasil kotor panen. Biasanya 1/8 bagian dari para penggarap tanah supaya mereka memperoleh hak sepenuhnya atas tanah garapan. Sisa dari bagian yang sudah di kurangi 1/8 bagian dibagi rata antara kedua belah pihak. Penggarap tanah biasanya menanggung semua biaya dan pekerjaan yang berhubungan dengan pembagian hasil panen ini.⁹⁵

Dengan sistem penyewaan tanah seperti itu memungkinkan hak *erfpacht* tumbuh semakin kuat di kalangan masyarakat feodal. Hak

⁹³ *Ibid*, hlm: 103.

⁹⁴ *Ibid*, hlm: 103.

⁹⁵ Werner Roll, *Ibid*, hlm: 103.

erfpacht adalah hak untuk menarik keuntungan sepenuhnya dari suatu benda tak bergerak milik orang lain dengan pembayaran tahunan berupa uang atau barang (hak guna pakai).⁹⁶

Agitasi kaum petani yang timbul di tanah partikelir (*Particuliere landerijen*) sepanjang abad ke – 19 dan awal abad ke – 20 merupakan suatu gejala historis dari masyarakat petani. Umumnya hampir semua kerusuhan – kerusuhan yang terjadi di tanah partikelir merupakan akibat dari adanya pungutan pajak yang tinggi dan tuntutan pelayanan kerja yang berat terhadap kaum petani di daerah itu.⁹⁷

Tanah partikelir sendiri timbul sebesar akibat dari praktek penjualan tanah yang dilakukan oleh Belanda semenjak permulaan zaman VOC sampai perempat abad ke – 19. Tanah semacam itu banyak terdapat di Batavia, Bogor, daerah Banten, Krawang, Cirebon, Semarang, dan Surabaya.⁹⁸ Pada tahun 1813 tanah – tanah yang menjadi milik orang Cina ini diambil alih oleh pemerintah Inggris dan sejak itu Ujung Timur Jawa tidak memiliki bentuk penguasaan tanah yang dimiliki secara luas oleh tuan tanah Cina yang disebut tanah partikelir.⁹⁹

Hal semacam ini pula nampaknya juga memicu terjadinya pergolakan di tanah – tanah partikelir kota Surabaya pada tahun 1916. Akibat dari tindakan ini tuan tanah yang sewenang – wenang seperti memaksakan segala macam kehendak, menuntut penyerahan tenaga kerja,

⁹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1990, hlm: 236

⁹⁷ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1992., hlm: 282

⁹⁸ *Ibid*, hlm: 283

⁹⁹ Putri Agus W, *Op.cit*: hlm : 33

dan mengusir para petani apabila mereka tidak dapat membayar hutangnya atau memenuhi pekerjaan yang diminta, serta membayar pajak sebagaimana mestinya seringkali menambah beban penderitaan penduduk yang semakin mencekik.

Berbeda halnya dengan peristiwa pergolakan di daerah – daerah lain, peristiwa pergolakan di tanah partikelir Surabaya mempunyai sifat khas yaitu radikal atau malahan revolusioner. Dikatakan radikal atau revolusioner.¹⁰⁰ Karena gerakan ini cenderung menghendaki adanya suatu perubahan secara menyeluruh dan mendasar yang dilakukan dengan kekerasan maupun dengan perlawanan. Ciri khas lainnya gerakan tersebut bersifat sekuler dalam pengertian bahwa tidak adanya tanda – tanda ideologi agama atau upacara – upacara keagamaan. Padahal jarang ditemukan gerakan yang betul – betul sekuler dalam pergolakan sosial tradisional Jawa yang mayoritas dari setiap gerakan itu bersifat keagamaan.¹⁰¹

Faktor utama pada pembangkangan penduduk terhadap tuan tanah di kota Surabaya yang terjadi pada tahun 1916 seperti yang dinyatakan oleh Korver bahwa beberapa tuan tanah mengupayakan untuk mengusir penduduk dari pertanahan mereka, sehubungan dengan semakin banyaknya permintaan untuk tanah bangunan yang diperlukan bagi rumah orang – orang Eropa.¹⁰²

¹⁰⁰ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Op.cit.*, hlm: 283-293

¹⁰¹ *Ibid*, hlm: 294

¹⁰² A.P.E. Korver, *Serekat Islam Gerakan Ratu Adil*. Jakarta, Grafitipers, 1985: hlm. 117

Menurut sumber tertulis kedua tokoh ini merupakan penduduk pribumi yang bermukim di kampung Ondomohen, tanah Ketabang Kota Surabaya. Beliau bernama Prawirodihardjo yang bertindak sebagai salah satu tokoh penggerak aksi pembangkangan yang bekerja sebagai pengawas pembangunan. Tokoh lainnya yakni Pak Siti alias Sadikin yang bekerja sebagai mandor pada perusahaan Staatsspoorwegen (Jawatan Kereta Api Negara) yang tinggal di Kampung Kedondong, tanah Keputran Lor, Kota Surabaya.¹⁰³

Kedua orang ini secara giat dan rutin mengadakan pertemuan dengan penduduk kampung – kampung di kota Surabaya dan berseru agar mereka menghentikan pembayaran kepada tuan tanah serta kewajiabn lain yang harus mereka penuhi. Menurut sumber tertulis karya A.P.E. Korver yang berjudul *Serekat Islam Gerakan Ratu Adil* Prawirodihardjo dan Pak Siti dalam menjalankan aksinya mendapat bantuan dari organisasi besar Serekat Islam cabang Surabaya.

Dalam pertemuan – pertemuan yang di adakan lebih lanjut antara Prawirodihardjo dan Pak Siti dengan penduduk kampung secara keseluruhan, penduduk secara tegas menyetujui mendukung aksi pembangkangan itu karena mereka telah termakan hasutan keduanya yang menyatakan bahwa tanah yang mereka kerjakan dan mereka garap

¹⁰³ ANRI, *Laporan – laporan tentang Gerakan Protes di Jawa pada abad ke XX*, Penerbitan Sumber – sumber Sejarah, Jakarta. 1981, hlm 11 A.P.E. Korver, *Ibid*, hlm: 117

sebenarnya adalah tanah mereka sendiri. Bahkan dalam pertemuan itu penduduk di paksa untuk mengucapkan Sumpah Rahasia.¹⁰⁴

Perlawanan penduduk pun tak ter elakkan gerakan protes tersebut meluas ke tujuh belas areal pertanahan yang mencapai puluhan sampai ribuan pengikut. Diantara tujuh belas areal pertanahan itu sebelas diantaranya adalah milik kalangan swasta Cina, empat milik Naamloze Vennootschap, satu ari swasta Eropa dan satu dari swasta Arab.¹⁰⁵ Berikut secara lebih rinci areal pertanahan yang penduduk lakukan aksi protes diantaranya:

1. Penduduk tanah Partikelir Ketabang Kidoel kota Surabaya
2. Penduduk tanah Partikelir Kepoetran Lor kota Surabaya
3. Penduduk tanah Partikelir Kepoetran Kidoel kota Surabaya
4. Penduduk tanah Partikelir Ketabang Lor kota Surabaya
5. Penduduk tanah Partikelir Manukan kota Surabaya
6. Penduduk tanah Partikelir Tandjoeng Anom kota Surabaya
7. Penduduk tanah Partikelir Simau kota Surabaya
8. Penduduk tanah Partikelir Djagir atau Ngagel kota Surabaya
9. Penduduk tanah Partikelir Bagong kota Surabaya
10. Penduduk tanah Partikelir Sawaan kota Surabaya
11. Penduduk tanah Partikelir Dinojo kota Surabaya
12. Penduduk tanah Partikelir Groedo kota Surabaya

¹⁰⁴ ANRI, *Laporan – laporan tentang Gerakan Protes di Jawa pada abad ke XX. Op. Cit*, hlm: 98 disini juga tidak diperjelaskan secara rinci apa isi dari sumpah rahasia yang diucapkan oleh penduduk.

¹⁰⁵ A.P.E. Korver.*Op. Cit*, hlm: 99

13. Penduduk tanah Partikelir Patemon dan Embong Malang kota Surabaya
14. Penduduk tanah Partikelir Kembang Koening kota Surabaya
15. Penduduk tanah Partikelir Dagong Manyar kota Surabaya
16. Penduduk tanah Partikelir Gamboean Lor kota Surabaya.¹⁰⁶

Keresahan – keresahan yang mengarah kepada pemberontakan atau gerakan tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi seperti yang sudah dijelaskan di muka, yaitu tekanan pajak, beban ikatan feodal, persewaan tanah, fragmentasi tanah, dan lain – lain. Dengan demikian keresahan itu di dukung oleh konflik – konflik yang lebih luas yang tidak lepas dari keanekaragaman yang muncul bersamaan dengan timbulnya hubungan sosial ekonomi, patron – klien.¹⁰⁷

Kedudukan petani secara politis memang lemah karena tidak memiliki organisasi.¹⁰⁸ Namun demikian perlu diingat mereka juga mempunyai titik batas tertentu. Suatu titik batas apabila dirasakan terlalu jauh dilanggar akan terdorong untuk melakukan perlawanan atau protes.¹⁰⁹

Begitu juga dengan gerakan pembangkangan yang dilakukan oleh penduduk dari tujuh belas areal pertanahan di kota Surabaya yang tidak hanya mengakibatkan kerugian pada pihak penguasa maupun (tuan tanah).

¹⁰⁶ ANRI, *Laporan – laporan tentang Gerakan Protes di Jawa pada abad ke XX. Op. Cit*, hlm: 98

¹⁰⁷ Suhartono, *Apange dan Bekel (Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1983 – 1920)*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1991., hlm : 139 - 140

¹⁰⁸ Onghokham, “ Pajak dalam Perspektif Sejarah” dalam *Prisma*, no. 4, tahun –VIV, 1985., hlm:71

¹⁰⁹ Putri Agus W. *Tanah dalam Sistem Perpajakan Masa Kolonial Inggris*, Yogyakarta, Tarawang, 2001, hlm: 102 – 103

Akan tetapi, akibat itu juga dirasakan oleh penduduk yang menjadi terganggu akan hilangnya perasaan aman dan tentram yang selama ini sudah terjalin. Akibat lainnya para tuan tanah dari tujuh belas areal pertanahan di kota Surabaya melalui pengacara pengadilan tinggi Meester Beerend Hermannus Drijber secara besar – besaran mengajukan perkara atas penduduk yang melakukan pembangkangan dan menindak tegas dua tokoh penggerak yaitu Prawirodihardjo dan Pak Siti(Sadikin) kepada Gubernur Jendral A.F. W. Idenburg.

Sebelum para tuan tanah secara besar – besaran melaporkan tindakan penduduk yang telah menghentikan pembayaran, maka penduduk sudah terlebih dahulu meminta bantuan kepada para pejabat untuk melindungi hak – hak mereka kepada pemerintah. Akan tetapi pemerintah melalui gubernur Jendral menerangkan bahwa untuk sementara waktu pemerintah tidak ingin mencampuri persoalan ini karena persoalan ini merupakan masalah perdata antara tuan tanah dan penghuni (penduduk).¹¹⁰

Para tuan tanah lewat pengacara dan kuasa hukumnya B.H. Drijber meminta kepada pemerintah untuk melarang yaitu Prawirodihardjo dan Pak Siti(Sadikin) bertempat tinggal di Karesidenan Surabaya atau merujuk suatu tempat tertentu di hindia Belanda, kemana mereka harus pergi sambil menunggu kesempatan untuk menyingkirkan

¹¹⁰ A.P.E. Korver, *Serekat Islam Gerakan Ratu Adil*. Jakarta, Grafitipers, 1985: hlm. 118

mereka, memerintah orang – orang yang dimaksud untuk dimasukkan kedalam tahanan.¹¹¹

Sebenarnya gerakan penduduk terhadap tuan tanah yang muncul di pertengahan tahun 1915 dan berakhir di ujung tahun 1916 itu tidak akan terjadi jika Dewan Kota Surabaya sudah memutuskan dan mengeluarkan sertifikat *Erphact* tanah – tanah daerah kota yang dapat dengan jelas mengetahui secara pasti.¹¹² nama – nama pemilik tanah yang syah menurut undang – undang agar apa yang terjadi terhadap tanah partikelir yang *diephact* jika terjadi suatu maslaha, dapat diajukan melalui hukum perdata.¹¹³ Oleh karena itu keterlambatan Dewan Kota Surabaya untuk mengeluarkan sertifikat *Erphact* itu juga yang menimbulkan penduduk yakin terhadap apa yang dikatakan oleh Prawirodihardjo dan Pak Siti(Sadikin) bahwa tanah yang mereka tempati dan mereka garap itu sebenarnya adalah tanah milik mereka sendiri.

Akibat yang ditimbulkan dari pembangkangan yang terjadi pada tahun 1916 ini seperti yang telah di jelaskan di atas, membawa dampak yang tidak sedikit bagi tuan tanah maupun juga penduduk. Akan tetapi yang dirasakan adalah hilangnya perasaan tentram, aman, di lingkungan mereka tinggal. Tuan tanah sebagai pemilik tanah juga mengalami kerugian karena banyak penduduk yang menghentikan untuk membayar pajak. Di samping itu penduduk juga mengambil tanah – tanah dan mengklaimnya sebagai hak milik mereka. Ini jelas sangat merugikan tuan

¹¹¹ ANRI, *Op.cit.*, hlm : 102

¹¹² Jos Suys, *Orgaan Van de Vereninging voor Locale Belagen*, Semarang, tanggal 16 Juli 1918, tahun ke –Vi, hlm: 46

¹¹³ *Ibid*, hlm: 47

tanah dalam berbagi segi baik dari segi pendapatan maupun status sosial yang lebih tinggi menjadi tidak dihargai lagi. Kerugian lain yang dirasakan penduduk adalah hilangnya mata pencaharian mereka yang sebelumnya bergantung pada hasil penggarapan tanah hal ini menjadikan keadaan ekonomi penduduk yang semakin bertambah parah.

RUJUKAN

- Sartono Kartodirdjo, “Gerakan Protes dan Ketidakpuasan Dalam Masyarakat Tradisional”. LP3ES, dalam Prisma. 1977. Tahun – VI. No. 1., hlm: 38
- Sartono Kartodirdjo, “Gerakan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah”, Jakarta: Gramedia, 1993., hlm 192, LP3S dalam Prisma 1977. Tahun – VI. No. 1., hlm: 38
- Putri Agus W. “*Tanah dan Sistem Perpajakan Masa Kolonial Inggris*”. Yogyakarta : Tarawang Press. 2001., hlm: 2
- A.M.P.A. Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda* . Pengantar: S.M.P. Tjondronegoro, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1985., hlm : 22
- J.H. Heslinga. *De Retchen op Ground en Water op Java en Madoera-Verklaard*, Weltevreden: N.V. Boekhandel Visser 7 Co, 1928, hlm:8-9
- H. Achmad Sodiki. “Konflik kepemilikan Hak Atas Tanah Perkebunan”, dalam Prisma, tanggal 9 September 1996., hlm: 3
- M.C. Riecklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 1998., hlm : 190
- Onghokham, “ Elite dan Monopoli Dalam Perspektif Sejarah” dalam *Prisma*, Monopoli, No. II, 1985, tahun XIV: hlm: 3
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1992., hlm: 282

A.P.E. Korver, *Serekat Islam Gerakan Ratu Adil*. Jakarta, Grafitipers,
1985: hlm. 117

Suhartono, *Apange dan Bekel (Perubahan Sosial di Pedesaan
Surakarta 1983 – 1920)*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya,
1991., hlm : 139 – 140

Jos Suys, *Orgaan Van de Vereniging voor Locale Belagen*,
Semarang, tanggal 16 Juli 1918, tahun ke –Vi, hlm: 46

D. PEMIKIRAN FEMINISME KARTINI

LILIS MUCHOIYYAROH

Awal abad ke-20 dilakukan pembukaan sekolah-sekolah Eropa Belanda untuk priyayi Jawa. Hal itu memungkinkan anak-anak priyayi Jawa mendapatkan pendidikan Eropa. Pendidikan memungkinkan transformasi ide-ide Eropa menyebar ke timur. Kebebasan dan kemerdekaan adalah salah satu pemikiran Eropa yang paling berpengaruh terhadap bangsa pribumi. Kesadaran Kartini atas ketertindasan perempuan priyayi Jawa memunculkan pemberontakan terhadap posisi social perempuan. Kartini menggugat belenggu adat budaya feodal Jawa dan menuntut kebebasan dan kemerdekaan perempuan. Suara perempuan harus didengar, perempuan harus dibebaskan memilih hidupnya dan harus berpendidikan. Kemajuan perempuan hanya dapat diperoleh melalui pendidikan. Dan pendidikan pula yang membebaskan dan menempatkan perempuan setara dengan laki-laki. Pemikiran “feminis” yang muncul di tengah-tengah budaya feodal patriarki masyarakat Jawa adalah bentuk pemberontakan Kartini atas posisi sosial perempuan Jawa yang dipinggirkan.

I. Pendahuluan

Jauh sebelum gerakan Politik Etis diresmikan, Kartini dalam masyarakat Jepara sudah memikirkan, bahkan telah melakukan usaha-usaha untuk memperbaiki taraf bangsa I(Soeroto, Sitisundari, 1984: 199). Sejak Kartini keluar dari masa pingitan, Kartini sudah mengetahui satu-satunya cara untuk memperbaiki taraf hidup rakyat pribumi melalui pendidikan.

Tetapi apa daya Kartini yang hanya putri seorang bupati. Apapun yang yang dikerjakan dan diusahakan Kartini tidak banyak membantu taraf hidup bangsa karena kekuasaan tertinggi ada di tangan pemerintah kolonial Belanda. Usaha Kartini akan lebih berhasil apabila dari pemerintah kolonial Belanda memperhatikan pendidikan rakyat Hindia Belanda.

Dengan dibukanya akses pendidikan di Hindia Belanda, disambut Kartini dengan perasaan gembira karena apa yang selama ini diimpikan Kartini sejak kecil mendapat pertanda baik. Karena didikan Eropa yang diterima sejak kecil, Kartini sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang semena-mena terhadap rakyat pribumi. Kekritisannya Kartini semakin terlihat sejak Kartini berkesempatan berkiriman surat dengan orang-orang Eropa (Belanda) yang diawali dengan Stella H. Zeehandelaar pada Mei 1899. Pertengahan tahun 1899 merupakan tahun yang penting sebagai tanda perkembangan pemikiran Kartini bersilang budaya dengan bangsa Eropa.

Sahabat-sahabat pena Kartini bukanlah orang sembarangan. Sahabat-sahabat pena Kartini pada umumnya mempunyai pendidikan serta kedudukan yang tinggi di masyarakat Belanda pada saat itu. Tidak hanya sahabat Kartini yang laki-laki, sahabat-sahabat Kartini yang perempuan juga berpendidikan tinggi dan memiliki pengaruh setidaknya dalam bidang informasi dan komunikasi di masyarakat Belanda. Apabila dibandingkan dengan Kartini yang hanya lulus sekolah dasar Eropa dengan usia Kartini yang masih 20 tahun. Nyatanya dalam surat-surat Kartini tampak bahwa dengan basic yang

hanya lulusan sekolah dasar Eropa, Kartini mampu mengimbangi pemikiran-pemikiran dari sahabat-sahabat Belandanya.

Dalam terbitan kumpulan surat-surat Kartini yang disusun oleh Tuan Abendanon, Door Duistenis tot Licht terdapat sepuluh alamat dan lebih dari separuhnya adalah perempuan 2(Sumartana, Th. 2013: 14) secara psikologis tidaklah mengherankan apabila seorang perempuan muda yang beranjak dewasa seperti Kartini cenderung lebih leluasa menceritakan masalah-masalah, perasaan, penderitaan, dan pikiran kepada sesama perempuan. Pemikiran Kartini yang kompleks tentang bangsanya tidak murni dari hasil pengamatan dan pengalaman Kartini saja, ada kemungkinan pemikiran maju Kartini mendapat pengaruh dari sahabat-sahabat abstrak dan nyata Kartini. Sahabat-sahabat abstrak Kartini yang berupa buku-buku bacaan kebanyakan tentang keadaan Eropa dan masyarakat Eropa, sedangkan sahabat-sahabat nyata Kartini yang berkirim surat dengan Kartini banyak diantaranya adalah perempuan. Ada indikasi bahwa pemikiran Kartini tentang peran dan status sosial perempuan di Hindia Belanda mendapat pengaruh dari wanita-wanita Eropa sahabat pena Kartini.

Hasil penelitian dengan tema pemikiran Kartini diantaranya tesis karya Herlyn Djunina 3(2013) yang membandingkan representasi perempuan dalam sebuah karya tulis seperti Rubrik Tapale'uk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam Rubrik Tapale'uk adalah sebagai sosok istri dan ibu rumah tangga. Namun lebih lanjut, setiap penulis dalam Rubrik Tapale'uk ini menghadirkan representasi ibu rumah tangga yang berbeda-beda. Penulis laki-laki cenderung merepresentasikan perempuan bukan sebagai tokoh sentral

dalam teks, perempuan kerap hanya dijadikan “bumbu pelengkap”. Sedangkan penulis perempuan lebih menggunakan teks untuk merepresentasikan sosok ibu rumah tangga yang cerdas. Sosok yang bukan hanya sebatas pengurus rumah tangga saja, tetapi menjadi tokoh sentral yang kritis terhadap permasalahan sosial, berani mendobrak budaya patriarki dengan ide-ide yang tidak kalah dibanding laki-laki.

Karya kedua adalah disertasi Dri Arbaningsih Soeleiman 4(2004). Kajian dalam karya itu adalah filsafat tentang emansipasi wanita berdasarkan surat-surat dan nota Kartini. Hasil penelitian menunjukkan 1. Perjuangan Kartini memerdekakan rakyat dari derita akibat penjajahan kolonial Belanda yang tidak berkeadilan sosial; 2. Perjuangan Kartini memerdekakan wanita; 3. Keprihatinan Kartini mengenai ketidakadilan atas perlakuan pemerintah terhadap pegawai Jawa dibanding terhadap pegawai Belanda yang sama-sama bekerja pada Pemerintah Gubernur dan mempertanyakan kewajiban moral mereka kepada rakyat Jawa; 4. Filsafat pendidikan Kartini.

Karya ketiga adalah tulisan Khoirul Faizain 5(2007). Tulisan itu berisi tentang perbedaan feminisme dan gerakan perempuan. Istilah feminisme digunakan untuk memaknai gerakan perempuan yang bermaksud membebaskan perempuan dari segala hal yang mengekang kebebasan perempuan, salah satunya dominasi laki-laki di masyarakat Eropa dan masyarakat Islam. Sedangkan istilah gerakan perempuan sengaja dipilih untuk memaknai gerakan perempuan yang cenderung mengkritisi bahkan menolak gerakan feminisme. Pada karya itu Faizain bermaksud meluruskan atas gerakan feminisme yang dianggap sebagai pintu masuk menuju kondisi baru dari dominasi laki-laki yang berakibat

pada ketimpangan dan ketidakadilan bagi perempuan. Feminisme berkembang pesat di Eropa, tetapi jika diterapkan dalam masyarakat Islam feminisme justru mendapat gugatan dari gerakan perempuan karena dianggap terlalu bebas dan bahkan dapat merugikan perempuan sendiri. Solusinya adalah antara perempuan dan laki-laki sebaiknya tidak menganggap persoalan relasi gender yang dipahami sebagai persetujuan antar kelompok, melainkan dalam perspektif kerjasam dan hubungan timbal balik satu sama lainnya. Gerakan para pejuang gender muslim perlu bersikap hati-hati dan lebih bijak dalam mengutarakan gagasan dan agendanya. Sehingga tidak terkesan menjajakan gagasan-gagasan Eropa yang belum tentu cocok untuk diterapkan, bahkan bisa jadi bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Karya-karya penelitian tersebut belum secara jelas memperlihatkan feminisme dalam pemikiran Kartini. Diperlukan penelusuran lebih lanjut atas surat-surat Kartini untuk menggali pemikiran Kartini.

II. Metode Penelitian

A. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan langkah-langkah heuristik, kritik, inter[retasi dan historiografi. Heuristik atau penelusuran sumber menghasilkan temuan buku Door Duisternis tot Licht: Gedachten over en vor Javaansche volk van Raden Adjeng Kartini adalah kumpulan surat-surat Kartini yang dikumpulkan oleh J.H. Abendanon dan Allard Elizabeth dan diterbitkan 1976. Koran-koran dan majalah sejamin diperoleh dari krantendelpher.nl yaitu Kleine Courant, De Telegraaf dan Java Bode.

Kritik sumber berupa kegiatan memilah informasi berdasarkan kategori yang telah ditentukan indikatornya. Fungsi utama kritik adalah menguji kesahihan informasi yang ada dengan melakukan perbandingan dengan informasi yang bersesuaian pada beragam sumber. Kegiatan ini akan menghasilkan fakta sejarah yang akan menjadi kerangka konstruksi sejarah.

B. Tahap interpretasi adalah kegiatan analisa yang dilakukan dengan bantuan teori untuk membuktikan hipotesa atau argumentasi. Interpretasi adalah pemaknaan yang dilakukan berdasar teori. Teori feminisme menuntut adanya kesetaraan sosial antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam kesetaraan hak ekonomi dan hak politik bagi perempuan. Argumentasi yang melandasi adalah bahwa perempuan dapat mengklaim kesamaan dengan laki-laki atas dasar kodrat manusia sebagai makhluk yang bermoral, berakal, berpikir, dan terus bernalar bahwa ketimpangan gender adalah akibat dari pola seksis dan patriarkis (Ritzer, Goerge-Douglas JG. 2004: 420) Hubungan antar fakta dibangun berdasarkan analisa tersebut. Tahapan ini disebut historiografi. Historiografi dimaksudkan untuk mengkonstruksi pemikiran feminis Kartini dalam hal peran dan status sosial perempuan Jawa.

III. Hasil

A. Pemikiran Kartini tentang perkawinan

Dalam surat-surat Kartini baik yang ditujukan kepada Stella maupun nyonya Abendanon terutama menyinggung kedudukan perempuan dalam keluarga, khususnya pada keluarga bangsawan Jawa.

Surat-surat itu berisi tentang pendapat Kartini tentang posisi perempuan terutama istri dalam relasinya dengan suami. Secara pribadi Kartini sangat menentang posisi sub ordinan perempuan dalam keluarga bangsawan Jawa meskipun dia tidak berhasil keluar dari belenggu budaya tersebut. Perkawinan adalah fokus utama perjuangannya untuk “membebaskan” perempuan. Kartini sangat menentang perkawinan yang dijodohkan (hal yang lumrah di kalangan bangsawan Jawa). Kartini berpendapat bahwa suara perempuan seharusnya didengar ketika akan dikawinkan. Suatu hal yang tidak pernah terjadi pada masa itu.

Pemikirannya tentang “kebebasan” perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya banyak dituangkan dalam surat-suratnya kepada Nyonya Abendanon. Surat-surat Kartini secara terang mengungkapkan pemikirannya tentang kedudukan perempuan dalam ihwal perkawinan. Ketidaksetujuannya atas perjodohan tertuang dalam suratnya kepada Nyonya Abendanon tertanggal 7 Oktober 1900. Dengan penuh perasaan Kartini menyatakan bahwa ia akan menerima perjodohnya meskipun “batinnya mendidih dan bergelora” tetapi dia juga mengatakan bahwa dirinya adalah manusia dengan kepala dan hati yang dapat berpikir dan merasa. Frasa tersebut menunjukkan bahwa meskipun pada akhirnya Kartini tidak dapat menolak kehendak orang tuanya, Kartini akan “tunduk” sehingga kebebasan berpikirnya pun terbelenggu.

Kartini juga menolak poligami. Penolakan itu terkesan sangat tegas dan keras. Kartini dalam surat yang sama menyatakan dengan tegas tidak akan kawin. Dengan emosional Kartini menggambarkan

kemarahannya atas hal tersebut ketika mengomentari perkawinan cucu tunggal Bupati Priangan yang berpendidikan, terpelajar dan kaya raya namun kawin dengan laki-laki yang telah beristri tiga. Sorotan Kartini dalam kasus ini terarah pada ketiga istri terdahulu sang Bupati. Kartini mempertanyakan bagaimana perasaan para istri terdahulu, Kartini bisa merasakan ketidaknyamanan tersebut karena ibunya sendiri juga mengalami hal yang sama. Bagi Kartini hal itu adalah penghinaan terhadap kaum perempuan dan harus diakhiri. Hal itulah yang sangat diinginkan seperti tertuang dalam suratnya “tidak ada suatu apapun yang lebih sungguh-sungguh saya dambakan dan saya inginkan kecuali diperbolehkan berdiri sendiri” 7(Sutrisno, Sulastin 2000: 34-35)

Penolakan Kartini terhadap poligami secara tegas dan emosional tertuang pada suratnya kepada Stella tertanggal 6 Nopember 1899. Kartini menyebut poligami dengan perbuatan dosa karena perbuatan tersebut telah menyakiti manusia. Kartini menyebutkan semua perbuatan yang menyebabkan manusia menderita adalah dosa. Dalam hal ini Kartini menjelaskan bahwa perempuan tidak memiliki hak, semua hak milik laki-laki. Laki-laki boleh membawa perempuan lain sebagai istri yang sah ke dalam rumahnya yang telah dihuni istri dan anak-anaknya, sementara sang istri harus menerima “perempuan saingannya”. Karena itu Kartini menentang perkawinan yang diatur dalam hukum dan ajaran Jawa.

Kartini menyadari sepenuhnya bahwa pemikirannya tersebut tidak akan diterima oleh masyarakatnya. Masyarakat bangsawan Jawa dengan budaya feodal-patriarki tentu tidak akan menerima pemikiran tersebut. Perkawinan untuk gadis bangsawan atau priyayi Jawa diatur

dan ditentukan oleh pihak keluarga. Gadis priyayi tidak diperkenankan memilih calon suami sendiri. Hegemoni laki-laki atas perempuan di kalangan priyayi Jawa memperoleh legitimasi dari nilai-nilai sosial, agama, hukum negara, dan terisolasi secara turun temurun dari generasi ke generasi. Hal itulah yang menimbulkan perilaku bias gender.

Kuatnya dominasi budaya patriarki disadari oleh Kartini. Dalam suratnya Kartini menyatakan bahwa apa yang digagasnya tidak mudah. Jalan yang akan ditempuhnya sukar, penuh rintangan dan hambatan. Kartini menyadari karena dia berjuang sendiri maka dia tidak akan pernah sampai ke ujung jalan tersebut. Namun demikian Kartini menyatakan, setidaknya dia sudah membuatkan jalan untuk orang lain, dia sudah membuatkan jalannya meskipun tidak sempurna. Dalam suratnya dia menyatakan “... saya turut membantu meneratas jalan yang menuju ke kebebasan dan kemerdekaan perempuan” 8(Sutrisno, Sulastin 2000:35)

Alasan kuat Kartini sangat menginginkan kebebasan dan kemerdekaan perempuan pribumi adalah penderitaan perempuan yang disaksikannya di lingkungan priyayi. Kartini menggunakan frasa “neraka” untuk menggambarkan kehidupan ibu, dirinya dan saudara perempuannya di lingkungan priyayi. Ayah Kartini Bupati Jepara memiliki dua istri Raden Ayu dan ibu Kartini. Kartini menyaksikan bagaimana ibunya diperlakukan sebagai pesuruh yang harus mengasuh anak-anaknya sendiri dan anak-anak tirinya. Kartini merasakan bagaimana perlakuan Raden Ayu terhadap dirinya dan saudara-saudaranya, merasakan dibedakan dan merasa tidak dicintai. Kartini tidak menyalahkan Raden Ayu yang membencinya, dalam suratnya

Kartini menggambarkan bagaimana ia selalu berusaha mengambil hati Raden Ayu demi ibunya. Dalam suratnya Kartini menyatakan bahwa rasa cinta dan kasihnya pada sang ayah yang membuat dia bertahan. Kartini menggambarkan ayahnya sebagai orang yang penuh kasih sayang dan selalu mengabulkan permintaan anak-anaknya, bahkan anak perempuannya. Hanya satu yang tidak dapat dikabulkan olehnya yaitu kebebasan. Alasan itulah yang menguatkan tekad Kartini untuk memperjuangkan kebebasan dan kesamaan hak.

B. Pemikiran Kartini tentang posisi social perempuan

Dalam lingkungan masyarakat priyayi, nilai seorang perempuan lebih terikat pada rumah tangga sedangkan control laki-laki sangat besar atas seksualitas dan gerak perempuan. Gerak perempuan semakin terbatas apabila jabatan suami atau ayahnya semakin tinggi. Hal itu karena priyayi Jawa tidak berorientasi pada ekonomi, melainkan pangkat dan jabatan suami atau ayah seorang perempuan priyayi Jawa.

Dalam masyarakat Jawa yang menganut budaya patriarki, laki-laki diposisikan superior terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan, baik sektor publik maupun domestik. Dalam bidang sosial dan politik, peran perempuan pun sangat kecil. Gambaran perempuan dalam budaya priyayi Jawa adalah milik laki-laki yang seringkali digambarkan dengan istilah griyo (rumah), bondho (harta), turonggo (kendaraan), kukilo (burung atau binatang peliharaan) dan pusoko (senjata/kesaktian). Penguasaan terhadap perempuan adalah simbol kejantnan seorang laki-laki. Sebaliknya ketundukan, ketergantungan, dan kepasrahan perempuan atas laki-laki adalah gambaran kemuliaan

hati perempuan Jawa. Sedangkan konsep laki-laki ideal Jawa adalah memiliki benggol (uang) dan bonggol (kejantanan seksual) 9(Muhadjir, Darwin dan Tukiran (ed), 2001: 23-24) Itulah sebabnya ketika seorang anak perempuan telah menstruasi atau mencapai usia 12 tahun, dia harus menjalani pingitan (diisolasi di dalam rumah) sampai datang seorang laki-laki sebagai calon suaminya.

Kebebasan sebagai anak perempuan berhenti sejak memasuki masa remaja. Pada masa pingitan dunia perempuan priyayi Jawa adalah rumah dengan keluarga terutama kaum perempuan dan para pembantu perempuan. Anak perempuan tidak diperkenankan lagi keluar rumah kecuali atas perkenan ayah mereka dan ditemani dengan saudara atau pembantu. Perempuan priyayi Jawa juga tidak akan menemui dan menemani tamu kecuali dipanggil dan diijinkan oleh ayah mereka.

Ketidakterdayaan perempuan karena struktur sosial dan budaya dijabarkan oleh Kartini dalam suratnya kepada Ny. Abendanon Agustus 1900. Kehilangan kebebasan dan pengucilan dari dunia luar membuat Kartini sangat sedih. Kesedihan yang mendalam dituangkan pada surat tersebut. Kartini sangat sadar akan kemampuan akademisnya dan memiliki cita-cita untuk bersekolah di Belanda tetapi dia juga menyadari bahwa hal itu mustahil. Meskipun tahu bahwa masa kebebasan telah usai, Kartini berusaha meminta izin dari ayahnya agar ada pengecualian karena dukungan serta dorongan guru-guru dan teman-teman Belandanya. Ayahnya dengan tegas menolak keinginan Kartini.

Kekecewaan Kartini akan posisi sosial perempuan dituangkan dalam suratnya dengan penuh emosi. Dalam suratnya dia menyatakan bahwa karena perlakuan kuasa laki-laki yang telah berlangsung lama

menjadikan perempuan tidak lagi melihat penindasan dan ketidakadilan melainkan dengan penyerahan dan tawakal diterima sebagai hak yang wajar. Dalam hal ini kondisi itu membuat Kartini berusaha melawan. Kartini dengan terbuka menyatakan bahwa dirinya tidak mampu melawan kuasa tersebut, bukan saja karena kuatnya adat budaya tetapi juga karena perempuan sendiri mendukungnya. Kartini menyebut kuatnya dominasi laki-laki tersebut karena “dihidupi oleh kebodohan perempuan”.

Perempuan harus dibebaskan dari kebodohan dan caranya hanya melalui pendidikan. Bagi Kartini pendidikan akan membentuk “semangat dan jiwa”, sehingga pendidikan tidak hanya menyangkut intelektualitas tetapi juga watak atau karakter. Kartini lebih menekankan kepada pendidikan untuk perempuan karena menurutnya perempuan bukan hanya sebagai pendukung suatu peradaban tetapi karena perempuan membawa pengaruh kualitas manusia. Dari perempuan manusia menerima pendidikan yang paling awal, belajar bicara, belajar merasa, belajar berpikir dan belajar seluruh kehidupan. Dengan itu Kartini mempertanyakan bagaimana kaum ibu dapat mendidik anak-anak mereka apabila mereka tidak terdidik.

Pemikiran Kartini tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan tertuang pada suratnya kepada Ny. Abendannon tertanggal 30 September 1901. Menurut Kartini, kaum muda laki-laki dan perempuan wajib berhubungan. Secara sendiri-sendiri kaum muda tersebut dapat melakukan suatu hal untuk meningkatkan derajat dan memajukan bangsa pribumi. Tetapi apabila kaum muda tersebut dapat menyatukan tujuan dan kekuatan maka hasilnya akan lebih besar.

Kartini dalam surat tersebut menggunakan frasa “bersatu kita kukuh dan berkuasa”. Frasa itu menunjukkan keinginan Kartini mengubah kondisi sosial bangsa Jawa yang menjadi keprihatinannya.

Dalam menyuarkan kebebasan dan kesetaraan Kartini senantiasa berusaha mencari dukungan dari kalangan terpelajar baik bangsa pribumi maupun Belanda. Kartini aktif berkorespondensi dengan orang-orang Belanda yang memiliki pemikiran sama dan diharapkan dapat mendukung mewujudkan mimpinya. Selain pasangan Abendannon, Kartini banyak bertukar pikiran dan mencoba “berbicara” dengan tokoh-tokoh Belanda yang dirasa memiliki pengaruh seperti suami istri van Kol, Gubernur Jendral Van Der Wijck, J.M. Pijnacker, Van Overveldt dan pimpinan redaksi dari beberapa surat kabar Belanda terutama yang dipimpin oleh para perempuan. Pemikiran dan pandangan Kartini berhasil menarik simpati dan dukungan dari mereka namun untuk mewujudkan pendirian sekolah perempuan di Jawa sangat sulit. Van Overveldt mengatakan bahwa mereka tidak berani mengambil resiko. Hal itu sangat beralasan karena para bangsawan adalah tulang punggung birokrasi Belanda. Mengusik kehidupan budaya dan dunia sosial bangsawan Jawa masalah serius bagi pemerintahan Hindia Belanda, tanpa dukungan mereka dalam birokrasi pemerintahan maka pemerintahan kolonial Belanda atas Hindia Belanda tidak akan bertahan. Karena itu Belanda sejauh mungkin tidak mencampuri urusan budaya Jawa, meskipun Belanda juga memperkenalkan pemikiran dan budaya Eropa melalui sekolah-sekolah yang didirikan. Perubahan harus berasal dari bangsa pribumi sendiri dan berjalan dengan “tenang”, karena itu pemerintahan kolonial sebisa

mungkin menghindari hal-hal yang akan menimbulkan “keributan” di kalangan masyarakat bangsawan.

Meskipun Kartini tidak berhasil mewujudkan cita-citanya mendirikan sekolah resmi yang diakui pemerintah, Kartini berhasil memperoleh izin mendirikan sekolah putri untuk lingkungan terbatas. Sekolah untuk anak perempuan itu didirikan di dalam lingkungan rumahnya dan diperuntukkan bagi anak-anak perempuan di lingkungan rumahnya. Sekolah itu selain mengajarkan membaca dan menulis huruf latin juga mengajarkan tentang pengetahuan keputrian dan tata krama tidak hanya Jawa tetapi juga Eropa. Bersama saudara perempuannya Roekmini, Kartini mengelola sekolah tersebut. Dalam suratnya kepada Ny. Abendanon tertanggal 7 Juli 1903 Kartini bercerita bahwa dia dan Roekmini telah memiliki siswa sembilan orang dan menerima banyak permintaan siswa diantaranya dari bangsa Melayu. Dalam surat itu Kartini menyebutnya “suatu kemenangan!”¹⁰(Sutrisno, Sulastin.2000: 487-488)

IV. Kesimpulan

Perempuan priyayi Jawa secara budaya terikat dalam konstruksi patriarki yang mendudukan perempuan dibawah kuasa laki-laki. Perempuan dianggap benda yang dapat diperlakukan sekehendak hati, tidak memiliki hak menyatakan pendapat, tidak didengar suaranya dan seluruh geraknya bergantung dan ditentukan laki-laki. Perempuan tidak memiliki kebebasan menentukan nasib dan hidup mereka sendiri.

Kartini sebagai perempuan priyayi melihatnya sebagai ketidakadilan dan kesewenang-wenangan laki-laki. Tidak seharusnya perempuan diperlakukan sekehendak hati karena perempuan juga

memiliki jiwa dan pikiran. Perempuan seharusnya memiliki hak untuk menentukan sendiri nasibnya. Pemikiran feminis Kartini muncul karena sikap kritisnya terhadap kondisi di lingkungan keluarganya. Keberadaan dua orang ibu dengan status yang berbeda, perlakuan yang berbeda terhadap ibu kandungnya, dirinya dan saudara-saudara perempuan dan laki-laki menimbulkan banyak pertanyaan dan gugatan.

Sekolah Eropa-Belanda dan pergaulan dengan orang-orang Eropa yang memiliki budaya berbeda, menguatkan dan meluaskan pemikiran Kartini tentang kedudukan dan status perempuan. Pemikiran rasional yang diperoleh dari pendidikan Eropa tidak dapat menerima kenyataan sosial kedudukan perempuan di lingkungan priyayi Jawa. Pergaulan dengan orang-orang Eropa Belanda menyadarkannya perbedaan perlakuan terhadap perempuan. Korespondensi dengan perempuan-perempuan Eropa menguatkan kesadaran Kartini akan kesalahan relasi perempuan – laki-laki dilingkungan priyayi Jawa.

Pemikiran Kartini muncul ketika disadari bahwa perempuan Eropa dapat memiliki profesi lain selain ibu rumah tangga, boleh keluar rumah dengan bebas, memiliki pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Suatu hal yang tidak dijumpai di lingkungannya. Perlakuan sebagian besar laki-laki priyayi Jawa terhadap para istri dan anak perempuan memicu pemberontakannya atas ketidakadilan yang dialami dan disaksikan. Kartini menggugat perkawinan yang diatur oleh adat dan agama yang dipakai sebagai dasar untuk melegalkan kuasa laki-laki atas perempuan. Kartini menggugat dan menentang keras poligami sebagai perlakuan yang paling kejam terhadap perempuan. Kartini juga

mengecam “kebodohan” perempuan yang menganggap perlakuan terhadap mereka adalah wajar dan takdir.

Perjuangan Kartini untuk meraih kebebasan dan kesetaraan tidak hanya disuarakan di lingkungan keluarga tetapi juga disampaikan kepada kawan-kawan Eropanya melalui korespondensi. Pemikiran Kartini mendapat sambutan di kalangan Eropa meskipun untuk mewujudkan cita-citanya melalui pendirian sekolah gagal. Perjuangan agar perempuan memiliki kebebasan bertindak dan menentukan nasibnya sendiri belum berhasil terwujud sampai Kartini meninggal. Kebebasan memilih sendiri belum berhasil diraih Kartini karena ia harus menikah dengan orang yang menjadi pilihan keluarganya, namun demikian Kartini berhasil mendirikan sekolah untuk anak perempuan yang bertujuan agar perempuan berpengetahuan dan berpemikiran.

Pemikiran Kartini dapat dimasukkan dalam kategori pemikiran feminis. Pada jamannya Kartini telah memikirkan dan menggagas kebebasan dan kemerdekaan perempuan dalam menentukan pilihan atas nasibnya. Kartini mengecam segala macam adat budaya yang memperlakukan perempuan tidak adil serta mengkerdulkan perempuan. Kartini menuntut diberikannya kebebasan dan kemerdekaan terutama dalam hal perjodohan atau perkawinan karena hal itu sangat menentukan hidup seorang perempuan.

Bagi Kartini laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak ada yang memiliki kedudukan lebih tinggi antara satu dengan lainnya. Hubungan laki-laki dan perempuan adalah kesetaraan, perempuan bukan pelayan laki-laki dan laki-laki tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap perempuan. Suatu pemikiran yang maju

pada jamannya, terutama di lingkungan priyayi Jawa yang menganut budaya feodal patriarki. Tentu saja pemikiran itu dianggap gila dan banyak ditentang terutama oleh kalangan priyayi, bahkan untuk hal itu Kartini dan saudara-saudara perempuannya yang sepemikiran sering diasingkan.

Bagaimanapun pemikirannya terus bergulir dan menginspirasi banyak perempuan Jawa untuk berani menunjukkannya di muka umum. Perempuan-perempuan terpelajar kemudian tidak hanya tampil sebagai guru pada sekolah-sekolah perempuan, tetapi juga telah berani mengeluarkan penerbitan berkala yang dibuat dan diperuntukkan bagi perempuan sendiri seperti yang dilakukan Rohanna Kudus. Putri Hindia adalah salah satu terbitan yang menyuarakan pemikiran “feminis” dan mendorong perempuan untuk mengambil peran lebih aktif terutama dalam hal perkawinan yang diatur dan poligami. Selanjutnya perjuangan kebebasan dan kesetaraan perempuan tidak hanya terjadi di Jawa tetapi menyebar ke seluruh Hindia, terutama pada wilayah-wilayah yang telah memiliki sekolah Eropa Belanda. Perjuangan kebebasan dan kesetaraan perempuan akhirnya juga mendapat dukungan dari para pemuda dan orang-orang Belanda. Untuk selanjutnya perjuangan itu mendapat pengakuan dari masyarakat Hindia dengan diijinkannya sekolah-sekolah putri berdiri.

RUJUKAN

- S. Sitisoadari, *Kartini Sebuah Biografi*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Sumartana, *Kartini dan Agama Dalam Pergulatan batin Kartini*, 1st ed. Yogyakarta: Gading Publishing, 2013.
- H. Djunina, “Representasi Perempuan Dalam Surat Kabar (Analisis Wacana Kritis Rubrik ’Tapale ’uk di Surat Kabar Harian Pos Kupang Edisi Hari Kartini sejak Tahun 2008 hingga 2012),” Universitas Gajah Mada, 2013.
- D. A. Soelaiman, “Emansipasi Bangsa Dalam Surat dan Nota Kartini (Kajian Filsafat Atas Sebuah refleksi Etis). Unpublish Disertation,” 2004.
- K. Faizain, “Mengintip Feminisme Dan Gerakan Perempuan,” *EGALITA*, vol. 2, no. 1, 2007.
- G. D. Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2004.
- S. Sutrisno, *Kartini Surat-Surat Kepada Nyonya R.M. Abendanon-Mandri dan Suaminya*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- M. D. dan Tukiran, Ed., *Menggugat Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Dan Kependudukan Universitas Gajah Mada, 2001.

E. Ratu Adil, Rusuh Sosial: Perbanditan Jawa Masa Kolonial

Muhammad Subarkah

Perbanditan di Jawa sudah meluas semenjak dahulu, baik itu di Banten, Batavia, Surakarta dan Yogyakarta, maupun hingga Pasuruan dan Probolinggo. Aksi perbanditan dilakukan sebagai tindakan balas dendam terhadap penindasan kolonial. Jawa yang sempat dikatakan mendiang Gubernur Hindia Belanda asal Inggris, Thomas Stamford Raffles, sebagai sebuah tempat asri dan subur, di mana dari batas hutang yang ada di gunung hingga ke kawasan pantai penuh aneka rupa tetumbuhan, ternyata dalam sejarahnya terus menerus penuh pergolakan. Bahkan, dalam banyak kajian para sejarawan kerap kali disebut pulau Jawa itu tak pernah ‘benar-benar’ tentram. Keributan dan konflik, hingga peperangan terus terjadi sepanjang waktu.

Kenyataan itu, terlihat jelas ketika menelisik buku ‘Bandit-Bandit’ Pedesaan di di Jawa (Studi Historis 1850-1942), karya sejarawan Universitas Gadjah Mada, DR Suhartono. Dalam kajian mengenai dunia ‘perbanditan’ di Jawa pada kurun itu (penelitian dilakukan di tiga daerah: Banten dan Batavia di Jawa Barat, di Yogyakarta dan Surakarta di Jawa Tengah, dan Keresiden Pasuruan), maka kemudian tampaklah dengan sangat jelas situasi sosial seperti apa yang membuat munculnya aksi kekerasan tersebut.

Dalam kajiannya Suhartono menulis, memang perbanditan (kalau masa sekarang mungkin bisa disebut sebagai aksi premanisme, red) pada saat itu adalah bentuk dari kriminalitas yang berkembang di masyarakat agraris. Meski begitu, istilah perbanditan sebenarnya masih dapat

dibedakan , yaitu semata-mata kriminal dan ‘venal’ yang bertujuan mendapatkan hasil harta rampokan untuk hidup, sedangkan yang lain adalah bentuk perbanditan sosial model Robin Hood, yakni melakukan perbanditan yang hasil kejahatannya itu nantinya dibagikan kepada anggota masyarakat miskin.

Lalu model perbanditan apa yang kemudian terjadi di Jawa pada kurun itu? Dalam kajian Suhartono secara sekilas dapat dikatakan, meski ada sifatnya yang ‘murni kriminal’ itu, namun sebenarnya perbanditan di Jawa pada kurun tersebut lebih banyak bersifat sebagai protes sosial.

“Secara khusus perbanditan yang banyak terjadi di pedesaan Jawa adalah ‘kecu’, rampok, ‘koyok’, dan sejenisnya. Dan karena aksi ini secara sadar dilakukan sebagai usaha perbaikan kondisi ekonomi dari pihak pelakunya, maka aksi mereka dapat juga dikatakan sebagai perbanditan sosial. Di Jawa perbanditan politik yang mengarah pada pemberontakan untuk menderikan negara jarang terjadi,” tulis Suhartono.

Dalam buku itu, Suhartono menceritakan situasi perbanditan di ketiga wilayah di Jawa itu. Namun, sebelum menyoroti situasi perbanditan secara lebih rinci, Suhartono sempat menyebutkan berbagai jenis perbanditan yang ada di pedesaan Jawa pada saat itu. Menurut dia, pada dasarnya semua perbanditan muncul karena rakyat pedesaan kehilangan orientasi dan lepas dari kehidupan budayanya akibat kemiskinan, penindasan, dan penghisapan oleh pihak kolonial . Aksi ini bisa saja dilakukan oleh individual atau sekelompok orang untuk mendapatkan haknya kembali yang telah dirampas.

Uniknya, selain dilakukan dengan melakukan perampasan harta, aksi perbanditan yang merupakan ekspresi dari perlawanan rakyat

itu juga kerap kali diwujudkan dengan tindakan perusakan terhadap berbagai perusahaan milik penguasa saat itu. Di beberapa tempat misalnya, aksi perbanditan ini dilakukan dengan melakukan pembakaran terhadap kebun tebu, los tembakau, pengrusakan saluran irigasi, dan pengrusakan gudang dan bangunan.

Adanya fenomena seperti itu, bisa dirujuk pada sumber data yang didapat dari arsip *Kolonial Verslag*. Pada arsip itu dilaporkan bahwa tindakan ‘perbanditan’ terjadi hampir setiap hari dan dilakukan dalam frekuensi yang cukup besar. Di pihak lain, resistensi serupa berupa perlawanan terhadap penindasan kolonial yang diekspresikan dengan tindakan perbanditan itupun kerap kali diwujudkan dengan aksi perampokan dan kerusuhan yang serius.

Di Vorstenlanden (wilayah kerajaan yang ada di Yogyakarta dan Surakarta) dikenal munculnya ‘kecu’ (orang jahat) yang banyak melakukan perampokan di wilayah itu. Aksi mereka ini menyasar pihak pabrik, perkebunan, orang Cina, pemimpin wilayah setempat. Sedangkan di Batavia kerusuhan banyak ditujukan pada tuan tanah partikelir dan orang-orang Cina. Di Probolinggo dan Pasuruan aksi kekerasan itu memang seringkali dilakukan dengan cara melakukan pembakaran kebun tebu dan bedeng tempat penyimpanan tembakau.

Namun, selain ada yang dilakukan dengan maksud murni merampok, pada kenyataan lain aksi perbanditan itu juga kadangkala diekspresikan munculnya sebuah ‘kepemimpinan mistik’, (aksi mesianis). Hal ini ditandai dengan munculnya seseorang yang mengklaim dirinya sebagai ‘ratu adil’ atau utusan Tuhan untuk membebaskan segala derita rakyat yang tertindas. Para bandit ini acapkali mengaku punya kekuatan

supranatural yang dapat dibanggkan dalam menghadapi lawannya, yakni para penindas itu.

Suhartono menulis, salah satu sosok bandit yang mengaku sebagai ‘orang suci’ itu adalah Mas Zakaria, seorang bandit dari Banten. Karier bandit Zakaria ini berlangsung pada tahun 1811-1827. Zakaria mengaku sebagai keturunan orang suci dari bapaknya yang ternyata juga seorang bandit. Bahkan, dua dasa warsa setelah kematiannya, masih banyak orang di Banten yang percaya roh Zakaria berperan dalam mengobarkan pemberontakan Cikande yang pecah pada tahun 1847.

Para pelaku pemberontakan Cikande ketika ditangkap, banyak yang mengaku bila tindakan nekadnya mengobarkan aksi perlawanan kepada pemerintah kolonial Belanda itu adalah untuk meneruskan sepak terjang leluhurnya yang bernama Zakaria tersebut.

Di Batavia juga dikenal aksi perbanditan yang dilakukan oleh Entong Gendut, yang tinggal di kawasan Jatinegara. Dia melakukan aksi kekerasan kepada tuan tanah yang bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat kecil. Entong menolak melakukan kewajibannya dan melunasi hutang kepada tuan tanah. Akibatnya para tuan tanah naik pitam. Mereka kemudian meminta pemerintah kolonial bertindak dengan mengerahkan aparat keamanannya untuk menangkap ‘Bang Entong.’

Namun, Entong pun tahu bahwa dirinya akan segera ditangkap. Dia kemudian mengumpulkan massa untuk melawan usaha penangkapan tersebut. Maka kemudian terkumpullah sekitar 40 orang yang bersedia bergabung dengannya untuk melakukan perlawanan. Dan untuk lebih

menyakinkan pengikutnya bahwa dia seorang ‘ratu adil’ maka ketika melakukan perlawanan Entong pun membawa berbagai simbol tertentu yang dinilai punya kekuatan mistik, seperti mengibarkan bendera bergambar bulan sabit hingga melakukan pengajian bersama untuk membaca alquran dan membacakan wirid.

Sikap Entong sebagai seorang ‘ratu adil’ makin tampak ketika melihat cara dia melakukan perlawanan terhadap pasukan polisi kolonial yang hendak meringkusnya. Saat bertempur dia bersama pengikutnya secara terus menerus memekikkan teriakan ‘Sabilillah’ (perang suci di jalan Allah).

Aksi yang sama juga muncul di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Sekitar tiga dasa warsa sebelum meletusnya perlawanan Entong Gendut, di dua kawasan tersebut saat itu juga merajalela aksi perbanditan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Masyarakat setempat menyebut pihak pelakunya sebagai gerombolan ‘kecu’. Mereka mengincar aparat birokrat pemerintah tingkat desa, yang disebut ‘bekel’. Laporan Asisten

Residen Sragen misalnya menyatakan, pada 15 September malam 1873 sekitar dua puluh orang tak dikenal menyerbu rumah ‘bekel’ di desa Kretek, Sragen. Tak cukup membawa 11 ekor kerbau, beberapa pikul padi, dan membawa kekayaan seharga 108,84 gulden, mereka juga membunuh isteri tua dari bekel tersebut. Aksi mereka tergolong cerdik karena kemudian tak bisa ditangkap.

Dan berbagai aksi seperti ini kemudian terus berlangsung secara luas dalam waktu cukup lama. Malahan, sampai masa dasa warsa pertama abad ke-20, aktivitas ‘kecu’ itu masih menunjukkan frekuensi yang tinggi.

Daerah Klaten malah bisa disebut sebagai wilayah yang punya banyak kejadian ‘pengkecuan’. Antara tahun 1885-1900 tercatat di Klaten terjadi 23 kali tindak peng-*kecuan*, Sragen 16 kali, Surakarta, 15 kali, Boyolali 13 kali, dan Wonogori 8 kali.

‘‘Pada tahun 1915 peng-*kecuan* di Surakarta jumlahnya relatif besar, 51 kali, di bandingkan tahun-tahun sebelum 1900 yang rata-rata kurang dari 10 kali setahun. Rupanya hal ini ada korelasi antara resistensi petani dan gerakan Sarekat Islam sehingga gerakan ini mampu menampung aspirasi petani. Yang terhitung sangat tinggi adalah pengecualian yang terjadi tahun 1919 yang mencapai 85 kali setahun. Angka ini menurun drastis tinggal 24 kali setahun atau seperempatnya pada tahun 1924,’’ tulis Suhartono.

DAFTAR PUSTAKA

- Aitken, Hugh G.J. (ed.), 1954. *The Social Science in Historical Study*. New York: SSRC.
- Alfian, Ibrahim, “Sejarah dan Permasalahan Masa Kini” dalam *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Sastra Universitas Gajahmada* Yogyakarta, 12 Agustus 1985.
- Brown, A.R. Radcliffe, 1965. *Structure and Function in Primitive Society*. New York: The Free Press.
- Indriyanto, “Gagasan Teori dan Metodologi Sejarah Masih Mencari Sosoknya” *makalh* tugas MK Kapita Selekt, 1992/1993.
- Kartodirdjo, Sartono, “Metodologi Max Weber dan Wilhelm Dilthey”, dalam *Lembaran Sejarah* No. 6 Tahun 1970. Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Budaya UGM.
- Kartodirdjo, Sartono, 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono, 1984. *Pembrontakan Petani Banten Tahun 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kartodirdjo, Sartono, 1988. *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: P.AU. Universitas Gajahmada.
- Kartodirdjo, Sartono, 1990. *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*. Yogyakarta: Universitas Gajahmada Press.

- Kartodirdjo, Sartono, 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*. Jilid II. Jakarta: Gramedia.
- Ankersmit, F.R., 1987. *Refleksi Tentang Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Mayerhoff, Hans (ed.), 1959. *The Philosophy of History in Our Time an Anthology*. New York: Anchor Books.
- Olsen, Marvin E., 1968. *The Process of Social Organization*. New Delhi: Oxford and IBH Publishing Co.
- Poespoprodjo, 1987. *Subjektivitas dalam Historiografi*. Bandung: Remaja Karya.
- Suryo, Djoko, “Sekitar Masalah Sejarah dengan Ilmu-ilmu Sosial: Sebuah Catatan”, dalam *Bacaan Sejarah* No. 4 Tahun 1980. Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Budaya Universitas Gajahmada.
- Peter Carey. *Orang Jawa dan masyarakat Cina*. (Jakarta : Pustaka azet, 1986)
- Takashi Shiraishi. *Hantu Digoel (Politik Pengamanan Zaman Kolonial)*. (Yogyakarta: LKIS, 2001).
- Cris Barker (terjemahan Nurhadi). *Cultur Studies Teori dan Praktek*.(Yogyakarta: Kreasi wacana, 2004).
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005).
- Riza Sihbudi dan Moch Nurhasim, *Kerusuhan Sosial di indonesia*. (Jakarta : Gramedia, 2001).

- D. Douglas dan Frances Caput Waksler dalam Thomas Santose. *Teori – teori Kekerasan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Achmad Habib, *Konflik Antar Etnik Di Pedesaan Pasang Surut Hubungan Cina – Jawa*, (Yogyakarta: LKIS, 2004).
- Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin, Aris Ananta. *Penduduk Indonesia, Etnisitas, dan Agama Dalam Era Perubahan Politik*. (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2003).
- Iwan Awwluddin Yusuf. *Media Kematian dan Identitas Budaya mayoritas (Representasi Etnik Tionghoa dalam Iklan Dukacita)*. (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Leo Suryadinata. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900 - 2002*. (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2003).
- Henk Schulte Nordholt. 2002. *Kriminalitas, Modernitas dan Identitas dalam Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- M. C. Rickleft. 1993. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.,
- Marwati Djoenad P. Dan Nugroho Noto susanto. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Julianto Ibrahim. 2004. *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan Kriminalitas dan Kekerasan Masa revolusi di Surakarta*. Surakarta : Bina Cipta Pustaka.
- Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Grafindo.

- Topo S dan Eva Achjani Z. 2004. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- P. M. Van Wulfften Palthe. 1949. *Over Het Bendewezen Op Java*. Oud-hoogleaar te Batavia.
- Topo S dan Eva Achjani Z. 2004. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- J.E. Hobsbwan. 2000. *Bandit Sosial*. Jakarta : Templok Press.
- W.F. Wertheim. 1993. *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Muhammad Basrowi dan Soernyono. 2004. *Teori Sosiologi dala Tiga Paradikma*. Surabaya : Yayasan Kampusina Surabaya.
- Sartono Kartodirjo, “Gerakan Protes dan Ketidakpuasan Dalam Masyarakat Tradisional”. LP3ES, dalam Prisma. 1977. Tahun – VI. No. 1.
- Sartono Kartodirdjo, “Gerakan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah”, Jakarta: Gramedia, 1993., hlm 192, LP3S dalam Prisma 1977. Tahun – VI. No. 1.
- Putri Agus W. “*Tanah dan Sistem Perpajakan Masa Kolonial Inggris*”. Yogyakarta : Tarawang Press. 2001.
- A.M.P.A. Scheltema, *Bagi Hasil di hindia Belanda* . Pengantar: S.M.P. Tjondronegoro, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1985.
- J.H. Heslinga. *De Retchen op Ground en Water op Java en Madoera-Verklaard*, Weltevreden: N.V. Boekhandel Visser 7 Co, 1928.

- H. Achmad Sodiki. “Konflik kepemilikan Hak Atas Tanah Perkebunan”, dalam *Prisma*, tanggal 9 September 1996.
- M.C. Riecklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 1998.
- Onghokham, “ Elite dan Monopoli Dalam Perspektif Sejarah” dalam *Prisma*, Monopoli, No. II, 1985, tahun XIV.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1992.
- A.P.E. Korver, *Serekat Islam Gerakan Ratu Adil*. Jakarta, Grafitipers, 1985.
- Suhartono, *Apange dan Bekel (Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1883 – 1920)*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Jos Suys, *Orgaan Van de Vereninging voor Locale Belagen*, Semarang, tanggal 16 Juli 1918, tahun ke –Vi.
- S. Sitisoadari, *Kartini Sebuah Biografi*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Sumartana, *Kartini dan Agama Dalam Pergulatan batin Kartini*, 1st ed. Yogyakarta: Gading Publishing, 2013.
- H. Djunina, “Representasi Perempuan Dalam Surat Kabar (Analisis Wacana Kritis Rubrik ’Tapale ’uk di Surat Kabar Harian Pos Kupang Edisi Hari Kartini sejak Tahun 2008 hingga 2012),” Universitas Gajah Mada, 2013.

- D. A. Soelaiman, "Emansipasi Bangsa Dalam Surat dan Nota Kartini (Kajian Filsafat Atas Sebuah refleksi Etis). Unpublish Disertation," 2004.
- K. Faizain, "Mengintip Feminisme Dan Gerakan Perempuan," *EGALITA*, vol. 2, no. 1, 2007.
- G. D. Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2004.
- S. Sutrisno, *Kartini Surat-Surat Kepada Nyonya R.M. Abendanon-Mandri dan Suaminya*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- M. D. dan Tukiran, Ed., *Menggugat Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Dan Kependudukan Universitas Gajah Mada, 2001.

GLOSSARIUM

1. **Ilmu Sejarah Klasik** : Sejarah merupakan satu kajian guna menceritakan sebuah perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh, masyarakat, serta peradaban.
2. **Ilmu Sejarah Kontemporer**: masa lampau manusia serta seputarnya yang disusun dengan ilmiah dan juga lengkap yang meliputi urutan-urutan fakta masa tersebut dengan penjelasan yang memberi pemahaman tentang apa yang berlaku.
3. **Ilmu Sosial**: Suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai macam masalah sosial khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat umum dengan memakai berbagai macam pengertian seperti, fakta, konsep dan teori yang berasal dari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan keahlian dalam lapangan ilmu-ilmu sosial, misalnya: ekonomi, geografi sosial, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, sejarah dan lain sebagainya.
4. **Sejarah Sosial**: Sejarah Sosial adalah ilmu sosial yang digunakan dalam sejarah yang mengkaji tentang struktur atau bagian-bagian dan tentang proses hubungan timbal balik (interaksi) yang sebagaimana telah terjadi di dalam konteks sosio kultural pada masa lampau antar manusia sebagai pelaku sejarah.
5. **Gerakan sosial**: Menurut Anthony Giddens (Putra dkk, 2006), gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama

- melalui tindakan kolektif (collective action) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan.
6. **Collective Action:** merupakan tindakan yang dilakukan sekelompok individu dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi dari kelompoknya. Selain memperbaiki kondisi, tindakan collective action juga mampu meningkatkan status kelompok tersebut dari kelompok yang lain.
 7. **Revolusi:** perubahan dari sosial maupun budaya yang berlangsung cepat dan melibatkan poin utama dari dasar atau kehidupan masyarakat. Dalam revolusi, perubahan dapat direncanakan atau tidak direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran dari perubahan kecepatan relatif sebenarnya karena revolusi juga dapat memakan waktu yang lama.
 8. **Pendekatan Multidimensional dalam Sejarah:** pendekatan dimana dalam penelitian sejarah harus memerrtimbangankan berbagai aspek kehidupan sosial yang turut mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan sejarah.
 9. **Paradigma:** Dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertindak laku (konatif). Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang di terapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya, dalam disiplin intelektual.

10. **Teori:** serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antarvariabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Labovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran “pemikiran teoritis” yang mereka definisikan sebagai “menentukan” bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan.
11. **Konsep:** adalah suatu abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk ada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Istilah konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, artinya sesuatu yang dipahami. Aristoteles dalam "The classical theory of concepts" menyatakan bahwa konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik.
12. **Rapprochement:** Penyatuan atau koneksi dari dua hal
13. Fenomena: dari bahasa Yunani; *phainomenon*, "apa yang terlihat", dalam bahasa Indonesia bisa berarti:
1. gejala, misalkan gejala alam
 2. hal-hal yang dirasakan dengan pancaindra
 3. hal-hal mistik atau *klenik*
 4. fakta, kenyataan, kejadian

Kata turunan adjektif, *fenomenal*, berarti: "sesuatu yang luar biasa".

14. **Rasialisme:** suatu penekanan pada ras atau pertimbangan rasial. Kadang istilah ini merujuk pada suatu kepercayaan adanya dan pentingnya kategori rasial. Dalam ideologi separatis rasial, istilah ini digunakan untuk menekankan perbedaan sosial dan budaya antar ras. Walaupun istilah ini kadang digunakan sebagai kontras dari rasisme, istilah ini dapat juga digunakan sebagai sinonim rasisme. Penganut paham rasialisme, yang sering disebut **rasialis**, sering mengutip karya akademik kontroversial seperti *Race, Evolution and Behavior* karya J. Philippe Rushton, *IQ and the Wealth of Nations* karya Richard Lynn, serta *The Bell Curve* karya R.J. Herrnstein dan Charles Murray.
15. **Etnisitas:** merupakan kategori sosial atau identifikasi sosial. Artinya, etnis adalah konsep yang diciptakan berdasarkan ciri khas sosial yang dimiliki sekelompok masyarakat yang membedakannya dari kelompok yang lain. Etnisitas adalah properti hubungan antar kelompok di mana perbedaan budaya antar kelompok dikomunikasikan secara sistematis dan berlangsung secara terus menerus.
16. **Sistem Sosial:** Sistem sosial terdiri dari keragaman aktor individual yang berinteraksi satu sama lain dalam situasi sosial yang setidaknya berada dalam lingkungan atau ruang fisik, dimana aktor tersebut memiliki motivasi untuk cenderung mengoptimalkan gratifikasi, dan relasinya terhadap situasi dan aktor lain berlangsung dalam sebuah sistem yang melibatkan simbol-simbol yang secara kultural terstruktur”.

17. **Sruktur social:** merupakan salah satu konsep perumusan asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu.
18. **Sistem Politik:** merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang terkait dengan tujuan kebaikan bersama.
19. **Politik asimilasi:** segala upaya untuk menyamakan batin, pikiran dan fisik yang sebelumnya berbeda kepada satu ide yang diusung oleh pelaku asimilasi.
20. **Cultuurstelsel:** Sistem Kultivasi atau secara kurang tepat diterjemahkan sebagai Sistem Budi Daya) (Inggris: *Cultivation System*) yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai Sistem Tanam Paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum (nila).
21. **Domein verklaring:** pernyataan yang menegaskan bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu miliknya, maka tanah itu adalah milik (*eigendom*) negara.
22. **Eigendom:** Eigendom verponding adalah salah satu produk hukum terkait pembuktian kepemilikan tanah yang dibuat sejak era Hindia Belanda. Usai Indonesia merdeka, sistem hukum agraria warisan Belanda masih dipertahankan sebagai pengakuan kepemilikan yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

23. **Konsep Kawulo-Gusti:** Manunggaling kawulo Gusti, terjadi ketika manusia selaku pribadi telah mampu menyerahkan seluruh hidup untuk Tuhan, hingga kita mampu membiarkan Tuhan bekerja mengurus ciptaanya melalui diri manusia (manusia menjadi salah satu instrument Tuhan ketika mengurus alam semesta ini).
24. **Patron-Client:** pertukaran hubungan antara kedua peran yang dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari ikatan yang melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang individu dengan status sosio-ekonominya yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan, serta keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status yang dianggapnya lebih rendah (klien). Klien kemudain membalasnya dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan termasuk jasa pribadi kepada patronnya. Sebagai pola pertukaran yang tersebar, jasa dan barang yang dipertukarkan oleh patron dan klien mencerminkan kebutuhan yang timbul dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
25. **Kecu:** Secara khusus perbanditan yang banyak terjadi di pedesaan Jawa adalah 'kecu', rampok, 'koyok', dan sejenisnya. Dan karena aksi ini secara sadar dilakukan sebagai usaha perbaikan kondisi ekonomi dari pihak pelakunya, maka aksi mereka dapat juga dikatakan sebagai perbanditan sosial.
26. **Feudalisme:** feudalisme merupakan sistem sosial yang menciptakan masyarakat yang kehidupannya berpusat pada para pemilik tanah. Pemilik tanah tersebut berasal dari orang yang dianggap

memiliki *divine rights*, seperti misalnya raja-ratu, para bangsawan, dan agamawan yang dianggap sebagai manusia pilihan Tuhan.

27. **Priyayi:** adalah istilah dalam kebudayaan Jawa untuk kelas sosial dalam golongan bangsawan. Suatu golongan tertinggi dalam masyarakat karena memiliki keturunan dari keluarga kerajaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, priayi adalah orang yang termasuk lapisan masyarakat yang kedudukannya dianggap terhormat, misalnya golongan pegawai negeri.
28. **Feminisme:** serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan social. Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki, dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut.
29. **Radikal:** bermakna 'secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip)'. Nomor dua, radikal adalah istilah politik yang bermakna 'amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan)'. Arti selanjutnya, radikal juga berarti 'maju dalam berpikir atau bertindak'.
30. **Politik etis:** Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat di negara jajahan Hindia Belanda.